

SKRIPSI

DINAMIKA MINYAK SEBAGAI SARANA DIPLOMASI

(Studi kasus : Irak – Amerika Serikat Menjelang Perang Teluk III Tahun 2003)



Disusun Oleh :

Herman Kusharbianto

2004 051 0255

**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2008

Halaman Judul

**Dinamika Minyak Sebagai Sarana Diplomasi
(Studi Kasus: Irak - Amerika Serikat Menjelang
Perang Teluk III Tahun 2003)**

Skripsi

Diajukan guna melengkapi dan memenuhi persyaratan untuk meraih gelar kesarjanaan strata (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Konsentrasi bidang Ilmu Hubungan Internasional.



**Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

2008

Halaman Pengesahan

Skripsi ini berjudul

**Dinamika Minyak Sebagai Sarana Diplomasi
(Studi Kasus: Irak - Amerika Serikat Menjelang
Perang Teluk III Tahun 2003)**

Disusun :

**Herman Kusharbianto
2004 051 0255**

Foto

Telah dipertahankan dalam ujian pendadaran, dinyatakan lulus dan di sahkan didepan tim penguji Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 9 April 2008
Jam : 08.00 WIB
Ruang : Lab. HI. B

Tim Penguji
Ketua

DR. Sidik Jatmika

Penguji Samping I

Penguji samping II

Ratih Herningtyas., S.IP

Winner Agung. P., S.IP., M.Si

Motto



“Sesungguhnya orang-orang mukmin hanyalah mereka yang apabila disebutkan asma Allah maka bergetarlah hatinya, dan apabila disebutkan ayat-ayat-Nya menjadi bertambahlah imannya kepada Rabbnya mereka bertawakka.”

(Al Anfal: 2-4)



“Tanda-tanda kebahagiaan dan keberuntungan hidup seorang mukmin ada lima:

Pertama

setiap ilmunya bertambah, bertambahlah tawadhu' dan kasih sayangnya.

Kedua

setiap amalnya bertambah, bertambah pula rasa takut dan kehati-hatiannya.

Ketiga

setiap kali umurnya bertambah, berkuranglah ketamakan dan kerakusannya.

Keempat

setiap hartanya bertambah, bertambah pula kedermawanannya dan pengorbanannya.

Kelima

setiap kali kedudukannya bertambah, bertambah pula kedekatannya kepada sesama manusia, memenuhi kebutuhan mereka dan rendah hati terhadap manusia”

(Al Fawaid, Ibnu Zayyim Al Jawziyyah)



Persembahan

Skripsi ini kupersembahkan untuk orang-orang yang aku sayangi :

- + Ayahanda Sutarto dan Ibunda Nunuk Boedhaharijani yang selalu memberikan lafal doa dan kasih sayang pada Ananda.*
- + Adik-adikku, Darwan S, Rininta A, Nwrinta G, dan siKriting Wildan R. Widiyanto. Selalu membuat hati mas bahagia, dan akan membanggakan orangtua.*
- + Weni Kurniasari yang selalu ku sayangi, makasih atas cinta dan kesetian yang telah diberikan. Selalu tersenyum ya.....!*
- + Kristina Lina Dewi (alm) teman sekaligus saudaraku, tak akan ada yang pernah melupakan keceriaanmu. Kami selalu merindukan kecentilan dan cerewetmu, moga Dewi bahagia di sisi Allah SWT....Amin.*

Kata Pengantar



Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah SWT, *Rabb'* semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan limpahan kasih dan sayang-Nya. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, segenap keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Skripsi ini merupakan langkah awal bagi penulis untuk mendapatkan salah satu syarat kelulusan dari Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Skripsi ini terdiri dari lima bab yang terintegrasi dalam judul “**Dinamika Minyak Sebagai Sarana Diplomasi (Studi kasus : Irak – Amerika Serikat Menjelang Perang Teluk III Tahun 2003)**”

Terselesainya penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan serta motivasi baik secara moral dan material. Untuk itu, melalui buah tangan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada :

- **Ibunda** tercinta, atas segala kasih sayang , perhatian, kesabaran, dan doa-doa yang selalu terucap untuk ananda. (My Mother is my Haven).
- **Ayahanda** yang selalu bersabar dalam menciptakan karakter yang sempurna bagi ananda, dan atas kerja kerasnya yang diberikan secara ikhlas untuk keluarga. (My Father is my Hero).
- **Adik-adikqu** yang selalu memberikan keceriaan dan keramaian di rumah, kebahagiaan kalian selalu ada ditujuan mas_arbi.
- **Bpk. Khoiruddin Bashori** selaku rektor UMY, walaupun belum pernah satu kalipun berbincang.

- ❖ **Bpk. DR. Sidik Jatmika** selaku Pembimbing Skripsi yang selalu sabar membimbing penulis serta membantu kelancaran terselesainya skripsi ini serta memberikan masukan-masukan yang sangat berarti bagi penulis.
- ❖ **Ibu Ratih Herningtyas, S.IP**, selaku Penguji I yang telah memberikan masukan untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini.
- ❖ **Bpk. Winner Agung P., S.IP,M.Si**, selaku Penguji II yang memberikan kritik dan saran yang sangat membantu terselesainya skripsi ini.
- ❖ **Pak Djumari** matur suwun banget atas kesabarannya membantu proses pengurusan skripsi ini.
- ❖ **Seluruh Dosen-dosen HI UMY** atas ilmu yang telah diberikan, pasti akan berguna di kemudian hari.
- ❖ **Seluruh keluarga besar**, baik di Surabaya maupun di Tarakan. Semoga kita selalu berbahagia dalam kebersamaan. Mbah-qu yang di Tarakan, Arbi selalu berdoa atas kesehatan dan kebahagiaan mbah...Amin.
- ❖ **Keluarga di Samarinda**, buat bude Tatik makasih sudah nemenin Arbi n bapak waktu ibunda operasi. Moga keluarga di Samarinda selalu sehat n bahagia.
- ❖ **Keluarga Om Ibrahim** di Pontianak, atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada Arbi.
- ❖ **Weni (GeMBrouD Qu)** atas kesabarannya menghadapi keegoisan Arbi, dan telah menjadi Inspirasi yang sangat besar dalam hidup. Bi juga nggak lupa makasi banyak udah mau ng-edit format skripsi ini, capek banget y. Ingat loh....Dijaga makan n minumnya, selalu percaya diri n optimis dalam mengambil keputusan. (GeNDouD luv GeMBrouD)
- ❖ **Temen2 'TER'-ku**. Tergila, Tergokil, Terkompak, Terrame dan Terseru; Mbah Basit (jangan suka ngegombalin cewek), Barid Juri (biar cerewet yang penting item...), Fuad Ucup (sudah sikat gigi blum ?), Ca2 n Aa' Wisnu (selalu tetap berkasih), Adit Dolly n Isla (damai anak negeri).
- ❖ **Anak2 Basket** (Fandi, Rizal, Reza Kentung, Lukman Kucing, Sofyan Inyong, Toni, Aa' Dani, Del Yesus)

- ❖ **Temen2 Kontarakan**, selalu damai dalam ke-Ngapakan n Ps-an (Ipank, Hamdan, Soeleng, Badrun bin Said, Nasrullah, Agus, Mip, Wawan, Juki alias Fuad Hasan)
- ❖ **Temen2 HMI Kom.TB**, maaf tidak pernah aktif dalam organisasi (mas Fahru skripsinya dikelarin donk). YAKUSA.....!
- ❖ **Kota Jogja** yang telah mempertemukan aku dengan orang-orang yang istimewa dan arti persaudaraan.

Semoga karya tulis ilmiah ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Penulis mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Kesalahan dan kekhilafan penulis dalam proses penulisan dan penyusunan skripsi ini semoga dapat dimaafkan dan diikhhlaskan.

Wa billahit-taufiq Wal-hidayah.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, April 2008

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii

BAB I

Pendahuluan

A. Alasan Pemilihan Judul	1
B. Tujuan Penulisan	3
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Perumusan Masalah	11
E. Kerangka Berfikir	11
1. Konsep National Power.....	11
2. Oil Diplomacy (Diplomasi Minyak).....	13
F. Jangkauan Penulisan	14
G. Metode Penulisan.....	14
H. Sistematika Penulisan	15

BAB II

Dinamika Interelasi Diplomasi, Minyak, dan Politik.

A. Diplomasi.....	16
-------------------	----

1. Sejarah Diplomasasi.....	19
a. Masa Awal Pembangunan.....	19
b. Masa Renaissance.....	20
c. Diplomasasi di Kawasan Negara-Negara Eropa.....	21
d. Diplomasasi Modern.....	22
2. Mekanisme Diplomasasi.....	23
3. Konvensi Diplomatik.....	25
a. Protokol.....	25
b. Hak Istimewa dan Hak Imunitas.....	27
c. Bahasa yang Digunakan Dalam Diplomasasi.....	28
d. Negosiasi Diplomatik.....	29
B. Minyak Bumi.....	30
1. Ciri Khas.....	31
2. Pembentukan.....	31
3. Sejarah Perkembangan.....	33
4. Eksplorasi Minyak Bumi.....	35
5. Produksi Utama.....	37
6. Volume Produksi dan Cadangan Minyak.....	38
a. Cadangan Minyak.....	38
b. Proyeksi Kedepan.....	39
c. Alternatif-Alternatif.....	39
7. Kerusakan Lingkungan Akibat Penggunaan Bahan Bakar Minyak.....	40
C. Politik.....	41
D. Interelasi Diplomasasi, Minyak, dan Politik.....	43
1. Minyak Sebagai Isu Sentral Ekonomi dan Politik Internasional.....	45
a. Hubungan Minyak dan Ekonomi.....	46
b. Politisasi Minyak.....	48
2. Keterkaitan Diplomasasi dan Politik Terhadap Minyak.....	50

BAB III

Faktor Dan Tindakan Yang Dilakukan Amerika Serikat Dalam Rangka

Invasi ke Irak

A. Era BillClinton.....	53
1. Clinton dan Embargo.....	54
2. Clinton vs Arab-Irak.....	55
B. Kepemimpinan George Walker Bush.....	57
1. Perhitngan Ekonomi-Bisnis Bush.....	62
2. Propagandan AS.....	67
C. Kejahatan Politik dan Kemanusiaan AS.....	73
D. Pengaruh Perusahaan AS di Irak.....	81
E. AS Dibalik Permasalahan Irak-Kuwait.....	86

BAB IV

Irak Memanfaatkan Minyak Sebagai Alat Diplomasi Terhadap Amerika

Serikat

A. Diplomasi Sumber Alam Oleh Irak Kepada Amerika Serikat.....	91
1. Peran OKI Dalam Konflik Irak dan AS.....	92
2. Kepentingan Perancis dan Jerman.....	98
B. Kebijakan Saddam Menggunakan Euro.....	102
C. Saddam Hussein Membawa Sejarah Baru.....	106
1. Manuver-Manuver Presiden Saddam Hussein.....	109
2. Usaha-Usaha Penyelesaian Konflik Melalui Jalur Diplomasi.....	110
D. Perang Besar Irak di Kawasan Teluk.....	114
1. Perang Teluk I.....	115
2. Perang Teluk II.....	117

BAB V

Penutup

A. Kesimpulan	124
---------------------	-----

DAFTAR PUSTAKA

128

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Ladang-Ladang Minyak Irak Terbesar Dengan Kapasitas Produksi	91
Tabel 4.2	Perbandingan Cadangan Minyak dengan Produksi Rata-rata Minyak Per hari	95
Tabel 4.3	Persentase Minyak dari Seluruh Impor Amerika Serikat (Dalam miliar dollar)	96
Tabel 4.4	Masyarakat yang Mendukung Mata Uang Tunggal	103
Tabel 4.5	Kurs Euro Terhadap Mata Uang Kuat Lain per 1 Maret 2003	104
Tabel 4.6	Posisi Neraca Berjalan UE dan AS (Dalam miliar dollar)	105
Tabel 4.7	Perimbangan Kekuatan (sampai dengan tanggal 15 Januari 1991)	113
Tabel 5.1	Data Korban Pasca Perang Irak	126

DAFTAR LAMPIRAN

Perjanjian Irak Dengan Jerman, Perancis, dan Amerika Serikat

Kronologi Peristiwa-Peristiwa Besar di Irak

Profil Singkat Negara-Negara Timur Tengah

Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 242 dan No. 338

Teks Lengkap “Peta Jalan Damai” Timur Tengah

Peta Perbatasan Irak, Kuwait, dan Arab Saudi

Peta Cadangan Minyak Dunia

Peta Kuwait

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Perang Teluk yang terjadi dan melibatkan negara Timur Tengah dan Amerika Serikat pada Januari 1991, telah merubah keadaan negara yang terlibat. Perang Teluk sendiri terjadi karena invasi Irak atas Kuwait pada 2 Agustus 1990, dengan strategi gerak cepat yang langsung menguasai Kuwait. Akibat invasi yang dilakukan oleh Irak, Arab Saudi meminta bantuan kepada Amerika Serikat tanggal 7 Agustus 1990. Meskipun Perang Teluk tersebut hanya berlangsung empat bulan, tepatnya mulai bulan Januari hingga bulan April, namun telah banyak merugikan rakyat sipil hingga merenggut ribuan nyawa. Banyak masyarakat Irak merasakan kerugian yang sangat besar, bahkan generasi berikutnya pun akan masih terasa.

Telah lama negara-negara Timur Tengah memiliki hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Dapat dikatakan bahwa Irak merupakan salah satu Agenda politik penting negara-negara *Great Power*, dimana hampir selalu ada permasalahan yang terjadi antara kedua belah pihak. Banyak hal yang dilakukan oleh negara-negara *Great Power* untuk berhubungan dengan Irak, baik dalam hal perdamaian atau juga yang melakukan hubungan dengan kepentingan nasionalnya yang dapat merugikan dengan cara konflik atau perang (war).

Invasi Irak pada 20 Maret 2003 dengan kode “Operasi Pembebasan Irak” secara resmi dimulai. Tujuan yang telah ditetapkan Amerika Serikat tersebut untuk melucuti senjata pemusnah masal Irak, dan untuk mengakhiri dukungan Saddam Hussein kepada terorisme. Sebagai persiapan 100.000 tentara Amerika Serikat telah dimobilisasikan di Kuwait, Amerika Serikat menyediakan mayoritas pasukan untuk invasi tersebut. Dengan dukungan dari berbagai pihak, baik pasukan koalisi yang terdiri lebih dari 20 negara dan suku kurdi di utara Irak, dan invasi tersebutlah sebagai pembuka perang Irak.

Perlawanan dengan kekerasan yang dilakukan oleh negara tertuduh hanyalah perbuatan untuk dipenuhinya sendiri yang mengukuhkan tuduhan Amerika Serikat bahwa negara tersebut benar-benar sarang teroris. Menolak tuduhan Amerika Serikat adalah menyegerakan perang atau embargo yang berkepanjangan sebagaimana dihadapi Irak pasca-Perang Teluk 1991. Tidak ada pilihan bagi negara yang dianggap Amerika Serikat sebagai sarang teroris atau menyimpan ancaman bagi keamanan dunia, kecuali tunduk dan menyaksikan negaranya luluh lantak dibom dari berbagai penjuru, lalu disulap menjadi negara boneka mainan Amerika Serikat dan sekutunya.

Berbagai cara yang dilakukan Amerika Serikat untuk menghancurkan Irak, baik dengan cara menuduh bahwa Irak memiliki senjata yang sangat membahayakan dunia. Dan bahkan Amerika Serikat mengatakan bahwa Saddam Hussein terlibat dalam kasus-kasus terorisme yang dilakukan oleh kelompok Al-Qaeda. Meskipun hingga saat ini belum satupun yang terbukti kebenarannya, Amerika Serikat masih saja menyerang Irak dengan berbagai cara dan alasan. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk menetapkan “DINAMIKA MINYAK

SEBAGAI SARANA DIPLOMASI (STUDI KASUS: IRAK-AS MENJELANG PERANG TELUK III TAHUN 2003)” sebagai judul skripsi ini.

B. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memberikan bukti empiris tentang keuntungan apa yang di dapat oleh Irak dengan pasokan minyak terbesar kedua dunia.
- b. Untuk mengetahui bukti empiris tentang upaya yang dilakukan Irak untuk memanfaatkan minyak sebagai alat pertahanan terhadap ancaman Amerika Serikat.
- c. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh apa saja yang timbul dengan adanya minyak yang berlimpah.
- d. Untuk memberikan bukti empiris mengenai betapa besar keinginan Amerika Serikat untuk menguasai Irak.

C. Latar Belakang Masalah

Timur Tengah merupakan wilayah yang tidak henti-hentinya menimbulkan masalah-masalah keamanan. Masalah yang mempengaruhi keamanan, stabilitas, dan perdamaian yang terlalu banyak, tidak saja dalam dimensi eksternal antar negara di wilayah itu, tetapi juga dalam dimensi internal setiap Negara, khususnya Negara-negara Arab. Kedua dimensi masalah-masalah itu berkaitan satu sama lain. Semuanya menjadikan Timur Tengah seolah-olah satu gumpalan benang kusut yang harus ditelusuri dan diuraikan helai demi helai. Ini berada diluar kemampuan di Negara-negara itu sendiri. Mereka harus didorong

oleh kekuatan luar wilayah, suatu kekuatan yang mempunyai *Leverage* dan bobot. Satu-satunya kekuatan itu tidak lain ialah Amerika Serikat.

Irak memiliki perbatasan yang diciptakan pada tahun 1920 dari kepentingan negara-negara besar yang dominan pada waktu itu dan tanpa memperhatikan sisi dari kesatuan suatu etnis dan budaya. Ini menjelaskan bahwa mengapa Irak sampai saat ini selalu diwarnai dengan konflik politik internal maupun eksternal. Oleh karena itu di balik melimpahnya minyak dan sumber daya alam lainnya, Irak merupakan negara yang sangat rentan terhadap konflik internal maupun eksternal.

Amerika Serikat (AS) memang telah melibatkan diri langsung dalam masalah Timur Tengah, atas nama keamanan dan perdamaian. Dua kali sejak runtuhnya tembok Berlin pada akhir tahun 1989 yang sekaligus juga menandai akhir emporium Uni Soviet dan akhir pengaruhnya di dunia, termasuk di wilayah Timur Tengah. Satu kali dalam perang terdasyat tetapi tersingkat, sejak akhir Perang Dunia II, dan keduanya dalam mendorong terjadinya perundingan Timur Tengah keseluruhan.¹

Setelah berakhirnya Perang Dunia II perhatian AS pada kawasan Timur Tengah meningkat secara cepat. Masa ini bersamaan dengan surutnya kekuatan Inggris sebagai major-power tidak saja di Timur Tengah, tetapi juga di tingkat internasional pada umumnya.²

¹ A. Hasnan Habib, *Dimensi Keamanan dan Strategis Perkembangan Timur Tengah*, Jurnal Ilmu Politik 12, hal 27

² Sidik Jatmika, *AS Penghambat Demokrasi”membongkar politik standar ganda amerika serikat”*, Yogyakarta : BIGRAF Publishing, 2000, hal 134

Konflik yang bermula dari invasi Irak ke Kuwait pada Agustus 1990 dan meledak menjadi Perang Teluk pada awal tahun 1991 antara Irak dan negara-negara sekutu pimpinan Amerika Serikat (AS) telah mengubah drastis peta politik dan militer Timur Tengah. Setelah Irak mengalami kehancuran militer total, Israel menjadi *super power* regional di Timur Tengah sendirian tanpa memiliki saingan.

Perang Iran-Irak selama tahun 1980-1988 banyak menguras kemampuan ekonomi Irak dan merupakan salah satu faktor pendorong invasinya ke Kuwait. Sekarang dengan masih berlakunya sanksi ekonomi yang dimotori Amerika dengan menggunakan kedok Dewan Keamanan PBB, perekonomian Irak sangat mundur.³

Perang Teluk yang berlangsung 6 minggu mampu membuat wajah baru Timur Tengah di luar dugaan Saddam Hussein sendiri dan bahkan diluar perhitungan George Bush. Wajah baru Timur Tengah itu tercermin dalam berbagai perubahan. Salah satu, Irak kembali menjadi negara terkuat di teluk, setelah sebelumnya tampak berada dibawah Iran, terutama karena yang terakhir ini selama perang 8 tahun melawan Irak berhasil membangun angkatan bersenjata yang cukup di segani.⁴

Peranan Timur Tengah ini makin bertambah ketika dinasti Ottoman jatuh pada awal abad ke-20 dan Negara-negara barat masuk kekawasan, serta menemukan sumber-sumber minyak yang melimpah disana. Arti penting terutama sekali dari minyak itulah yang telah mengundang Negara-negara besar ikut

³ Harwanto Dahlan, "*Politik dan Pemerintahan Timur Tengah*" Diktat Kuliah, Yogyakarta 1997

⁴ M.Amin Rais, *Arah Perkembangan Timur Tengah*, Jurnal Ilmu Politik 12, hal 19

meramaikan kawasan Timur Tengah ini, masing-masing dengan alasan kepentingannya sendiri.⁵

Perseteruan yang terjadi di Timur Tengah sangatlah merugikan Negara-negara tersebut, baik permasalahan internal maupun eksternal. Minyak merupakan salah satu yang sangat dominan dalam permasalahan eksternal. Masalah minyak juga memerlukan penanganan yang serius, dan ternyata masih tetap berperan penting dalam geopolitik wilayah Timur Tengah. Masalah intinya adalah kenyataan, bahwa permintaan minyak dunia terutama Negara-negara industri maju masih tetap meningkat. Amerika itu mempunyai kebutuhan minyak yang amat sangat besar, 26% dari konsumsi minyak dunia. Kebutuhan minyak dunia sekarang ini 78 juta barel per hari. Sedangkan Amerika membutuhkan 20 juta barel per hari. Yang mampu dihasilkan oleh produk dalam negeri Amerika hanya 8 juta barel per hari. Jadi lebih banyak impor. Kalau Amerika tetap berproduksi pada 8 juta barel per hari, maka minyak yang ada di perut buminya itu akan habis dalam waktu 10 tahun.⁶ Dengan tingkat produksi saat ini cadangan itu di perkirakan akan habis pada abad ini, sedangkan cadangan yang dimiliki Timur Tengah ialah sekitar 65%. Hal ini terbukti bahwa AS sangat membutuhkan cadangan minyak yang sangat besar untuk kebutuhan baik industri maupun militer, salah satu jalan keluar yang dapat menutupi kekurangan pasokan minyak AS yaitu dengan menguasai salahsatu tambang minyak di kawasan Timur Tengah.

⁵ M. Nur EL. Ibrahimy, *Peran Minyak di Timur Tengah*, 1955. P.3.

⁶Ujung-ujungnya Israel yang menikmati dalam http://swaramuslim.net/more.php?id=A263_0_1_0_M , diakses tanggal : 09 Januari 2008

Terdapat dua proposal yang diajukan oleh Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-bangsa. Yang pertama adalah proposal penggunaan serangan militer untuk melucuti “senjata pemusnah massal” yang dimiliki oleh Irak. Sebuah proposal yang sebenarnya sebatas mencari legitimasi badan internasional tersebut dan dukungan dari negara-negara imperialis lainnya. Meskipun begitu, dengan ataupun tanpa resolusi Dewan Keamanan, Pemerintahan Bush dan Blair menyatakan akan tetap melakukan serangan. Sedangkan proposal kedua berasal dari para “penentang perang”, Perancis dan Jerman, yang mengajukan solusi damai atas Irak. Meski berbeda sikap dalam penyelesaian problem Irak. Kedua proposal sangat jelas mengatakan bahwa terdapat pelanggaran terhadap Resolusi 1441 Dewan Keamanan PBB, yang menyebutkan bahwa Irak harus memusnahkan semua program-program persenjataan nuklir, biologi, dan kimia.⁷

Kedua proposal adalah wujud adanya dua kepentingan imperialis yang bersaing dalam penentuan kontrol atas minyak Irak. Laporan yang dibuat Deutsche Bank dengan judul “Bagdad Bazaar: Big Oil in Iraq?” memperlihatkan bahwa hasil dari proposal yang dibuat Perancis adalah kontrak-kontrak minyak yang diberikan Saddam dalam tiga tahun terakhir kepada perusahaan-perusahaan minyak Perancis, Rusia, dan Cina akan segera diwujudkan. Sedangkan jika proposal AS yang disepakati Dewan Keamanan PBB, maka perusahaan-perusahaan AS-lah yang akan mendapatkan keuntungan, terutama pada pembukaan ladang-ladang baru di Padang Hijau (ChevronTexaco dan ExxonMobil dapat menjadi kontraktor manajemen cadangan minyak) ataupun rehabilitasi infrastruktur untuk mengembalikan kapasitas produksi Irak

⁷ Geopolitik dalam <http://abimanyu.free.fr/index.php/?p=71>, diakses tanggal 19 juli 2007

(Halliburton, misalnya, sewaktu di bawah kepemimpinan Wapres AS sekarang Dick Cheney mendapatkan keuntungan dari rehabilitasi fasilitas minyak Irak yang sebelumnya dihancurkan oleh serangan AS yang juga melibatkan Cheney sebagai salah satu perencananya).

Wilayah Irak merupakan wilayah konsentrasi minyak kedua terbesar di dunia setelah Arab Saudi dengan cadangan minyak yang telah diukur mencapai 110 milyar barel (Arab Saudi mencapai lebih dari 250 milyar barel). Bahkan, eksplorasi lebih lanjut diperkirakan akan menemukan cadangan minyak yang lebih besar, hingga mencapai lebih dari 200 milyar barel. Sementara negara-negara imperialis dan non-OPEC sebagian besar memiliki cadangan minyak sekitar 50 milyar barel. Karenanya wilayah ini menjadi fokus perhatian kepentingan imperialis, dalam konteks bahwa minyak adalah komoditas yang menggerakkan mesin-mesin kapitalisme global.

Kontrol atas minyak bukanlah sebatas keuntungan dari perdagangannya saja, akan tetapi merupakan salah satu bagian yang terpenting dari upaya menguasai dunia yang dilakukan sepanjang babak imperialisme abad 20. Pertama, tidak ada satupun aspek kehidupan masyarakat saat ini terlepas dari pengaruh pasokan minyak. Semua transportasi komoditas kebutuhan manusia terpengaruh oleh harga minyak. Dapat dikatakan, kapitalisme saat ini sangat bergantung pada harga dan pasokan minyak. Dan keberlangsungan ekonomi negara-negara imperialis sangatlah bergantung pada keamanan pasokan sumber energi utama

dunia ini. Selain itu, pertumbuhan baru ekonomi dunia (jalan kapitalistik untuk keluar dari resesi global) membutuhkan pasokan minyak yang lebih besar.⁸

Minyak merupakan sumber energi utama yang menopang pertumbuhan ekonomi. Sebanyak 40 persen total kebutuhan energi Amerika Serikat berasal dari minyak, 24 persen dari gas, 23 persen dari batu bara, 8 persen dari energi nuklir, dan 5 persen dari sumber lainnya. Amerika adalah negara yang paling keracunan minyak (*addicted to oil*). Menurut data dari BP *Statistical Review of World Energy* 2006, konsumsi minyak Amerika mencapai 20.655.000 bph atau 24,6 persen dari total konsumsi minyak dunia per hari. Dari jumlah tersebut, 45 persen dipasok dari impor dan 20 persen di antaranya dari Teluk Persia. Pada 2025, Amerika Serikat diperkirakan akan mengkonsumsi separuh minyak dunia atau sekitar 28,3 juta bph.⁹ Selama ini untuk memenuhi kebutuhan minyaknya, AS bergantung kepada Arab Saudi, bukan kepada Irak. Tapi dengan menguasai Irak, AS berarti menguasai sumber minyaknya. Karena perang yang lama dengan Iran, yang kemudian disusul dengan perang Kuwait, dan juga karena sanksi PBB, industri minyak Irak memang sangat terpuak. Paling tidak diperlukan tiga tahun dan investasi sebesar sekira tiga miliar dolar untuk membangun kembali industri minyak Irak.

Amerika sangat menginginkan menjadi penguasa tunggal minyak di Irak yang memiliki cadangan minyak 115 miliar barrel, terbesar kedua di dunia, setelah Arab Saudi. Dengan cara mengajukan kerangka resolusi kepada Dewan

⁸ Ibid

⁹ Jejak-jejak langkahku “strategi amerika menguasai minyak” dalam http://unisosdem.org/ekopol_detail.php?aid=7913&coid=3&caid=31, diakses tanggal 09 Januari 2008

Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk segera mencabut sanksi ekonomi Irak. Amerika beralasan dimana melalui kerangka resolusi itu, AS dengan tegas menyatakan akan "menyimpan" minyak Irak di dalam bentuk dana bantuan untuk Irak atau "*Iraq Assitance Fund*". Dana itu untuk bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi. Menurut AS, seluruh penghasilan dari minyak Irak akan disimpan di Bank Sentral Irak.

Realita ini dapat kita lihat dalam sebuah kasus yakni serangan invasi Amerika Serikat terhadap Irak. AS tidak bisa lepas, bahkan masih sangat tergantung pada suplai minyak Timur Tengah. Presiden AS George W Bush di depan Kongres pada 17 Mei 2001 menyampaikan strategis pengadaan energi AS, dengan slogan "Tingkatkan mengalirnya minyak".¹⁰ Memang pada awalnya Amerika Serikat memiliki berbagai alasan atas tindakannya, namun ditemukan fakta dimana terdapat sebuah kepentingan besar lain yakni menguasai control atas kepentingan sumberdaya minyak yang ada di Irak.

Oil diplomacy telah menjadi salah satu aspek dalam hubungan internasional sejak ditemukannya minyak di Timur Tengah pada awal tahun 1900an.¹¹ minyak mempunyai peranan penting dalam industri, pertanian, bahkan pada bidang politik. Kedudukan penting minyak dalam ekonomi industri modern dan pengaruhnya terhadap perang, tidak bisa diragukan lagi. Kandungan minyak dunia hanya terletak dua daerah saja, yaitu membentang dari Amerika Utara ke Selatan dan yang kedua terletak di Timur Dekat dan Timur Tengah.

¹⁰ Isu minyak dalam konflik AS-Irak, dalam <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0210/18/ln/isum34.htm>, diakses tanggal 09 Januari 2008

¹¹ Petroleum Politics dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Oil_diplomacy, diakses tanggal 10 juli 2007.

D. Rumusan Permasalahan

Berbeda dengan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka problematika yang dapat dirumuskan adalah **Bagaimana minyak digunakan Amerika Serikat dan Irak sebagai alat politik ?**

E. Kerangka Berfikir

Memiliki sumberdaya mentah yang sangat berlimpah merupakan kebanggaan yang sangat besar tinggi bagi negaranya. Irak memiliki persediaan minyak (115 miliar barrel) terbesar kedua didunia, namun dengan adanya minyak yang dimiliki Irak membuat Negara tersebut harus terus menerus membuat kebijakan yang dapat mempertahankan dan melindungi Negara ini. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Irak tidaklah lepas dari kebijakan yang di pegaruhi oleh Amerika Serikat. Irak selalu mempertahankan wilayah dan sumberdaya alamnya dari Negara-negara dunia ketiga dan terutama Amerika Serikat.

Kemudian teori yang digunakan oleh penulis adalah teori yang menyangkut ataupun berkorelasi dengan objek yang hendak diteliti dan oleh penulis akan diterapkan dalam penelitian ini sebagai kerangka berfikir dalam menganalisa fenomena politik yang terjadi, sehingga teori yang diambil oleh peneliti :

1. Konsep National Power

Kekuatan negara yang sangat mendasar menjadi modal penting bagi sebuah negara dalam memenangkan pertikaian dengan negara lain. Dalam

bukunya yang berjudul *Elements of National Power* (Calcutta: Scientific Book Agency, 1966) Hans J. Morgenthau, seorang Profesor Ilmu Hubungan Internasional Universitas Chicago, menyebut kekuatan ini sebagai kekuatan nasional. Dia membagi kekuatan nasional dalam beberapa elemen sebagai berikut:¹²

1. Geografi
2. Sumber-sumber alam
3. Kemampuan industri
4. Kesiagaan militer
5. Populasi
6. Karakter nasional
7. Moral nasional
8. Kualitas diplomasi¹³

Salah satu elemen yang di miliki oleh suatu negara (kekuatan nasional) dapat digunakan sebagai alat pelindung atau bahkan sebagai ancaman negara lain. National power itu sendiri mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kebijakan-kebijakan suatu pemerintah yang memiliki keterlibatan dan dapat dibidang telah menjadi kebutuhan mereka. Sumber daya alam atau khususnya minyak yang dimiliki oleh Irak, merupakan suatu kekuatan nasional yang sangat besar pengaruhnya. Dimana minyak merupakan kekuatan yang dapat melindungi Irak yang memilikinya dari suatu ancaman yang merugikan dan membahayakan.

¹² Kekuatan Negara dalam <http://iwansetiyabudi.blogspot.com/2006/10/aliansi-jepang-inggris-pada-perang.html> di akses tanggal 28 agustus 2007.

¹³ Morgenthau, 1966 seperti dikutip Frans-Bona Sihombing, *Ilmu Politik Internasional, Teori, Konsep, dan Sistem*, Ghalia, Indonesia, 1984: 111

Dan sumber-sumber alam juga dapat sebagai alat untuk meningkatkan kualitas diplomasi suatu negara (Irak).

2. Oil Diplomacy (Diplomasi dengan menggunakan minyak)

Diplomasi minyak merupakan salah satu katagori yang termasuk kedalam jenis diplomasi sumberdaya yang mana diplomasi ini menggunakan kekayaan sumberdaya alam untuk menjadikan suatu alat dan tujuan atas terlaksannya sebuah tindakan diplomatic. Sebagaimana di tulis oleh SL. Roy dalam bukunya “*Diplomas*” dikatakan bahwasannya sumberdaya bahan-bahan mentah penting seperti batubara, besi, minyak, uranium dan sebagainya, memainkan bagian penting dalam perkembangan industri. Bahan-bahan itu juga sangat banyak mendukung pertambahan kekuatan dan pertahanan suatu Negara.

Minyak yang sampai sekarang masih merupakan sumber energi utama, dengan demikian membuat banyak pengaruh pada politik-dunia. Inilah sebabnya mengapa dalam arena diplomatik dunia sekarang minyak memainkan peranan sedemikian penting dan diplomasi minyak telah menjadi bagian proses diplomatiknya yang terkenal.¹⁴ Namun realita yang banyak terjadi justru Oil Diplomacy banyak berujung pada “The end of line” dari sebuah proses diplomasi yakni perang, kekerasan, dan berbagai tekanan dari yang dimiliki power lebih kuat kepada yang lebih lemah

Sementara elemen kekuatan pertahanan yang terdiri dari informasi (*information*), kemampuan diplomasi (*diplomatic*), daya tahan ekonomi (*economic*), dan kekuatan militer (*military*) tidaklah semata-mata di tujukan untuk

¹⁴ SL.Roy, *Diplomasi*, PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1995. hal:168

melindungi integritas wilayah dan kedaulatan politik Negara, melainkan juga keamanan manusia.

Dimana sebuah diplomasi yang digunakan oleh Irak itu sendiri, merupakan sebuah alat pertahanan yang sangat kuat untuk melawan invasi Amerika. Pertahanan yang dimiliki Irak saat ini sangat berpengaruh terhadap kebijakan pemerintahan Irak, dengan menggunakan sumberdaya alam (minyak) sebagai alat pertahanan.

F. Jangkauan Penelitian

Dalam melakukan penelitian maka penulis berusaha memberikan batasan waktu data penelitian agar tidak terlalu membingungkan dan terlalu luas sehingga akan sulit untuk dipahami. Jangkauan penulisan dalam penelitian ini yaitu pada Perang Teluk yang terjadi tahun 1991 hingga dengan invasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Irak tahun 2003.

G. Metode Penelitian

Seperti halnya para penulis dan peneliti yang lainnya dalam jurusan Hubungan Internasional, penulis akan menggunakan metode kajian pustaka. Adapun sumbernya adalah berbagai buku, majalah, jurnal politik, media masa, dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah konflik Irak dan masalah tentang Amerika Serikat.

H. Sitematika Penelitian

Bab I Pendahuluan

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang mencakup alasan-alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, perumusan masalah, kerangka berfikir, hipotesa, metode penulisan, jangkauan penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II Dinamika Interelasi Diplomasi, Minyak, dan Politik

Bab ini membahas tentang dinamika interelasi Diplomasi, baik itu masa awal pembangunan zaman mesir kuna hingga pada abad 20. Dan membahas pula minyak dan politik pada umumnya.

Bab III Faktor dan tindakan yang dilakukan AS dalam invasi ke Irak

Bab ini berisi tentang penjelasan faktor-faktor yang mempengaruhi politik luar negeri Amerika Serikat, baik pada era Presiden Bill Clinton hingga Pemerintahan George Walker Bush. Dan menggambarkan tindakan-tindakan yang dilakukan Amerika Serikat dalam invasinya ke irak sampai tahun 2003.

Bab IV Irak Memanfaatkan Minyak sebagai Alat Diplomasi terhadap Amerika Serikat.

Bab ini membahas beberapa upaya yang dilakukan Irak untuk memanfaatkan minyak sebagai alat diplomasi kepada AS pada tahun 1991-2003

Bab V Penutup

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari apa yang telah diuraikan oleh penulis diatas.

BAB II

Dinamika Interelasi Diplomasi, Minyak, dan Politik

A. Diplomasi

Mungkin banyak puluhan definisi mengenai diplomasi. Mulai dari tokoh lama seperti Harold Nicholson sampai tokoh baru semacam Morgenthau berusaha membuat definisinya sendiri tentang diplomasi. Menurut Nicholson sendiri kata “diplomasi” diyakini berasal dari kata Yunani “*diploun*” yang berarti “melipat”.¹⁵ Pada masa Kekaisaran Romawi semua paspor atau dokumen yang melewati perbatasan atau jalan Negara disebut “*diplomas*”, bahkan sampai berkembang dan mencakup dokumen-dokumen resmi yang memberikan hak istimewa dan perjanjian dengan suku bangsa lain asing diluar bangsa Romawi. Karena banyaknya perjanjian dan hubungan luar dengan bangsa lain, maka banyak pula tumpukan dokumen yang sangat merepotkan Kekaisaran. Oleh sebab itu Kekaisaran merasa perlu untuk mempekerjakan seseorang yang dapat mengindeks, menguraikan, dan memelihara dokumen dan arsip Negara yang berhubungan dengan hubungan internasional, yang dikenal pada zaman pertengahan sebagai “*diplomatique*”. Jadi siapapun yang berhubungan dengan dengan surat-surat tersebut dikatakan sebagai milik bisnis diplomatic. salah seorang pengkaji dan praktisi yang pandai dalam hal diplomasi di abad keduapuluh ini, menegaskan bahwa dalam bahasa yang mutakhir kata diplomasi secara gegabah diambil untuk menunjukkan paling tidak lima hal yang berbeda.

¹⁵ S.L.Roy, Diplomasi, Raja Grafindo Perasada, Jakarta, 1995, hal 1

Dari kelima hal tersebut empat hal yang pertama menyangkut:¹⁶ (1) politik luar negeri, (2) negosiasi, (3) mekanisme pelaksanaan negosiasi tersebut, dan (4) suatu cabang Dinas Luar Negeri. Ia selanjutnya mengatakan bahwa interpretasi kelima merupakan suatu kualitas abstrak pemberian, yang dalam arti baik mencakup keahlian dalam pelaksanaan negosiasi internasional; dan dalam arti yang buruk mencakup tindakan taktik yang lebih licik.

Menggunakan definisi yang dikemukakan oleh Bruce Russett dan Harvey Starr dalam bukunya *World Politics : The Menu for Choice*, maka diplomasi adalah “a means by which a state directly influences another” (sarana yang dipakai oleh suatu negara untuk secara langsung mempengaruhi negara lain). Namun mengingat banyak teoritis yang mengemukakan definisi tentang diplomasi, maka sebagai penambah wawasan, kita perlu juga menyimak beberapa definisi lain sebagaimana yang dikemukakan oleh John T. Rourke dalam bukunya *International Politics on the World Stage*. Dalam buku ini kata diplomasi didefinisikan sebagai sebuah proses komunikasi yang mempunyai dua elemen utama, yaitu *negotiation* dan *signaling*, mengucapkan dan mengerjakan sesuatu dengan maksud mengirim pesan kepada pemerintah lain. Unsur kedua dimaksud untuk mencakup antara lain penggunaan “*threat*” (ancaman) seperti misalnya pemutusan hubungan diplomatik sampai pada gerakan militer. Untuk lebih komprehensif, maka pemikiran Nicholson juga perlu dikemukakan di sini. Menurutnya diplomasi paling tidak mempunyai beberapa poin:¹⁷

1. Pernyataan yang penting dari kata diplomasi adalah perundingan.

¹⁶ Ibid, hal 3

¹⁷ Harwanto Dahlan, Modul Mata Kuliah “Diplomasi”, Yogyakarta, 2002

2. Perundingan dilakukan untuk memajukan kepentingan suatu negara yang dimaksud.
3. Tindakan diplomatik diambil untuk menjaga dan memajukan kepentingan suatu negara sejauh mungkin bisa dipraktekkan dengan cara damai. Oleh karena itu, pemeliharaan perdamaian tanpa mencederai kepentingan negara merupakan tujuan utama diplomasi, tetapi apabila cara damai gagal, kekuatan bisa digunakan. Sudah diketahui bahwa terdapat hubungan dekat antara diplomasi dan perang.
4. Suatu teknik diplomasi yang sering digunakan untuk mempersiapkan perang dan tidak untuk menghasilkan perdamaian.
5. Diplomasi sering dihubungkan dengan tujuan politik suatu negara.
6. Diplomasi modern sangat dekat hubungannya dengan sistem kenegaraan.
7. Diplomasi juga tidak bisa dipisahkan dengan kaitan perwakilan antar negara.

Diplomasi, praktek-praktek dan lembaga-lembaga yang ada pada negara tertentu menjadi penentu hubungannya dengan negara lain. Pada dasarnya, diplomasi dalam bahasa Inggris berarti pemeliharaan dan evaluasi dari surat-surat resmi atau capaian-capaian, yang didapat dari beberapa perjanjian. Pada abad ke-18 dokumen mengenai diplomasi semakin meluas maknanya khususnya bertalian dengan hubungan internasional, dan terminologi korps diplomatik biasanya dipakai di kedutaan besar, utusan-utusan, dan beberapa perwakilan resmi yang ditambahkan pada pos misi luar negeri. Pada tahun 1796 seorang filosof asal Inggris, Edmund Burke, menekan Perancis karena mereka memberlakukan

diplomasi ganda selama perang Napoleon, semenjak itu terminologi diplomasi lalu dihubungkan dengan politik internasional dan kebijakan luar negeri.

1. Sejarah Diplomasi

Sejara setelah masyarakat dunia terpecah ke dalam beberapa komunitas, kebutuhan akan pengaturan hubungan dengan memberlakukan prinsip keterwakilan (representasi) dari kelompok yang diwakili mulai nampak. Bahkan, pada awal lahirnya peradaban masalah ini sudah diundangkan.

a. Masa awal pembangunan

Peradaban yang paling baru yang membangun sebuah sistem diplomasi adalah Mesir Kuno. Para duta besar dan misionaris-misionaris khusus diutus dari kota ke kota untuk menyampaikan pesan dan peringatan-peringatan, membagikan hadiah, dan melakukan pembelaan kasus (di sidang pengadilan) bagi penduduk Mesir atas pengadilan negara-kota lain. Misi-misi diplomatik ini, meski demikian, bersifat temporer dan sporadis (belum sistematis).

Dengan mulai munculnya Mesir dan munculnya Imperium Romawi, sistem diplomasi Mesir mulai memudar. Karena ekspansi yang dilakukan oleh Roma, diplomasi mereka telah menjadi bagian dari misi pencaplokan dan invasi yang dilakukan. Orang-orang Roma cenderung tidak bisa hidup berdampingan dengan negara-negara lain, dalam hal kebersamaan dan tolong menolong. Jika Roma sudah menurunkan instruksi, artinya tidak ada lagi negosiasi.

Pada umumnya, ribuan tahun pasca kejatuhan Roma, orang-orang Eropa merasa bahwa mereka tidak terpecah ke dalam beberapa negara, melainkan lebih sebagai anggota dari beberapa kelompok masyarakat dalam naungan sistem feodal

tuan-tuan tanah. Meskipun beberapa tempat telah memiliki hubungan dari waktu ke waktu, tidak ada catatan dari adanya diplomasi resmi selama abad pertengahan.

b. Masa Renaissance

Diplomasi modern dalam bentuk aslinya dimulai semenjak masa renaissance Italia. Pada awal abad ke-15, beberapa negara-kota telah terbentuk di Italia, tetapi tidak ada satupun yang dapat istirahat dengan tenang, mereka selalu takut untuk diinvasi oleh kelompok lain. Para pembuat undang-undang dari sebagian besar negara kota ini memperoleh posisi mereka dengan kekerasan dan tekanan-tekanan. Hal ini dikarenakan mereka tidak mampu mengukur loyalitas para pendukung, mereka mengharapkan aliansi dengan cara penaklukan dan perampasan harta negara lain. Mereka selalu berusaha untuk meningkatkan kekuasaan dan memperlebar dominasi dan mereka juga senantiasa melakukan penyeimbangan kekuasaan di semenanjung Italia.

Meskipun diplomasi pada masa renaissance penuh dengan kepicikan dan amoral, negara kota Italia telah mengembangkan sejumlah institusi-institusi dengan beberapa praktek kebiasaan, yang masih ada hingga sekarang, yakni: (1) mereka memperkenalkan sebuah sistem kedutaan besar yang permanen yang mewakili kepentingan negara mereka dengan melakukan pengawasan, pelaporan, dan negosiasi. (2) masing-masing negara membangun sebuah kantor di negara lain yang bertugas melakukan evaluasi atas laporan tertulis dari duta-duta besar, menyampaikan surat perintah, membantu memformulasikan kebijakan-kebijakan, dan menjaga banyak sekali dokumen yang ada. (3) bersama-sama mereka membangun sebuah sistem kerja sama tentang protokoler, keistimewaan, dan hak imunitas bagi para diplomat. Para duta besar beserta para staf dijamin kebebasan

untuk memasuki negara lain, melakukan penyeberangan, dan keluar negara lain kapanpun diinginkan. Hukum lokal negara lain (tempat duta bertugas) tidak bisa dipakai untuk menghalangi seorang duta besar dalam melakukan tugasnya, terkecuali jika melakukan kejahatan seperti mencuri dan membunuh, maka ia juga wajib bertanggung jawab. (4) konsep extraterritorial sudah dikenal pada masa itu. Melalui prinsip ini, kantor kedutaan di negara lain (tujuan) dianggap sebagai bagian dari negara asal kedutaan tersebut, lebih lanjut, siapapun dan apapun yang ada di dalam wilayah kedutaan hanya mengacu pada hukum negaranya.

c. Diplomasi di Kawasan Negara-Negara Eropa

Kemunculan negara-bangsa pada abad 17 di Eropa menuntut adanya pembentukan konsep-konsep kepentingan nasional dan keseimbangan kekuasaan. Pencetus konsep ini bertujuan agar sasaran diplomasi negara seharusnya berdasarkan kepentingan nasional dan tidak mengacu pada ambisi pribadi, rivalitas personal (permusuhan), sentimen, ajaran agama, dan prasangka-prasangka. Teori Keseimbangan Kekuasaan didasarkan pada kepentingan bersama untuk menjaga sistem kenegaraan dengan mencari sebuah penyeimbangan kekuasaan diantara beberapa negara kuat. Diplomasi ini biasanya digunakan untuk dua kepentingan negara. Pada perkembangan selanjutnya, keberadaan kekuatan utama negara menjadi salah satu pokok politik internasional. Meskipun kemudian negara-negara kecil tidak nampak perannya, seperti Polandia ketika pecah pada abad ke-18, kekuatan yang besar mencoba membangun relasi-relasi tanpa menebar ancaman bagi eksistensi negara yang lain. Pada saat yang sama, para diplomat Eropa menjadi semakin profesional dan terpelajar. Sisi lain diplomasi seperti suap, kebohongan-kebohongan, dan kecurangan, secara perlahan

digantikan oleh kode tingkah laku yang sudah diharapkan dan diterima secara universal.

Sistem diplomasi ala Eropa tercoreng untuk pertama kalinya ketika Napoleon berusaha menaklukkan Eropa pada awal abad ke-19. Pasca kekalahan Napoleon, sistem yang berlaku di Eropa dikembalikan lagi dan tidak ada lagi perang selama satu abad kemudian.

d. Diplomasi Modern

Pada tahun 1914, negara-negara di Eropa terpolarisasi dalam konfrontasi kekerasan (bersenjata). Pertempuran yang terjadi pada Perang Dunia I membawa dampak kepada sistem diplomasi Eropa kepada satu keadaan yang buruk. Woodrow Wilson, Presiden Amerika Serikat, adalah salah satu tokoh yang menjadi pioner dalam mengkritik sistem diplomasi yang terkoyak tersebut dan dia juga salah satu penganjur tipe diplomasi terbuka dan keamanan bersama. Salah satu tujuan Wilson adalah praktek dan teori keseimbangan kekuasaan, dan perbedaan antara kekuatan besar dan kecil, pencapaian kepentingan nasional, perjanjian-perjanjian dan persetujuan-persetujuan rahasia, dan diplomasi profesional.

Pada sistem diplomasi lama Wilson menawarkan sebuah “Diplomasi Baru” dalam 14 poin utama. Open Covenant harus dibuat garis besarnya pada konferensi internasional yang diikuti oleh negara besar dan kecil yang berpartisipasi yang berkedudukan setara. Perdamaian harus dijaga dengan membuat batas-batas negara sesuai dengan batas wilayah etnik. Seluruh anggota masyarakat internasional harus berjanji untuk berani membantu mempertahankan wilayah negara lain jika ada yang melanggar perjanjian tersebut. Sebuah negara harus lebih mementingkan kepentingan bersama (internasional) di atas

kepentingan nasional dan menyelesaikan pertikaian diantara mereka dengan menggunakan forum arbitrase internasional dan resolusi perdamaian.

Banyak ide Wilson yang terakomodasi dalam Perjanjian Versailles tahun 1919 dan pada Liga Bangsa-Bangsa. Setelah Amerika Serikat menolak keberadaan Liga ini dan kembali kepada politik isolasi, namun negara-negara Eropa tetap bertahan kepada sistem keseimbangan kekuasaan dan mencapai kepentingan nasional melalui diplomat-diplomat yang profesional.

Selama Perang Dunia II, Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt tertarik kembali untuk membangun diplomasi modern, tetapi Roosevelt sendiri bersama dengan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill membangun sebuah orde internasional pasca perang berdasarkan pada persetujuan dengan pemimpin Rusia Joseph Stalin yang lebih menyetujui masuknya sistem (diplomasi) Eropa daripada masuknya ide-ide baru yang terangkum dalam Atlantic Charter dan PBB. Persatuan Bangsa-Bangsa mungkin kembali menjadi simbol dari apa yang dinamakan dengan sistem diplomasi, namun pasca Perang Dunia II politik internasional sepenuhnya mengacu pada model diplomasi gaya Eropa dan dalam hal ini, (justru) mengadopsi bagian-bagian terburuk dari diplomasi masa Renaissance.

2. Mekanisme Diplomasi

Penyelenggaraan hubungan-hubungan dengan negara lain membutuhkan tiga hal: (1) sebuah bangunan negara untuk menentukan kebijakan dan pengiriman diplomat; (2) jalur komunikasi yang terbangun dengan baik untuk melakukan kontak dengan negara lain; dan (3) para personel yang membuat sistem tersebut

bekerja. Dari semua negara yang ada, ketiga persyaratan ini menjadi semakin profesional dan birokratis. Selama abad ke-17 dan ke-18, masalah (hubungan) luar negeri berlangsung secara sangat fair. Pada abad ke-19, korp diplomatik secara terus menerus dipilih secara sangat selektif dan sangat kompetitif dalam sebuah agenda pemilihan. Meskipun beberapa duta besar acapkali dipilih berdasarkan tendensi politis, kedutaan besar tetap diisi oleh mereka yang memiliki profesionalisme tinggi dan di dalamnya terdapat staf-staf yang dibekali dengan skill yang tinggi, tampak ketika mereka melakukan analisa beberapa kasus di kedutaan.

Aktifitas misi diplomatik sungguh sangat bervariasi. Jangkauan kerja mereka dari pekerjaan yang serius seperti masalah negosiasi politik dan pelaporan dan penyimpulan beberapa kegiatan penting di luar negeri sampai pertemuan-pertemuan dengan para pelajar asing, menyusun rencana perjalanan ke seluruh negeri, dan beberapa masalah visa.

Sebagai tambahan dari pekerjaan politik dan diplomatik mereka, misi-misi ini juga berurusan dengan kerja konsulat negara asal. Kerja konsuler juga konsen dengan hubungan ekonomi dan perdagangan antar negara. Pada dasarnya, kerja konsulat dan diplomatik terpisah secara nyata karena beberapa teori mutakhir menyatakan bahwa kepentingan nasional tidak boleh dicampuri dengan masalah-masalah perdagangan yang sifatnya privat. Oleh karena itu, dua kantor kedinasan yang berbeda –diplomatik dan konsuler- pada umumnya telah ada. Kini, kebanyakan negara mengkombinasikan dua macam kedinasan ini, dan satu korp kepegawaian saja yang melayani dua urusan tersebut.

Konsuler memiliki banyak kegiatan. Konsul-konsul mengurus masalah sertifikat kelahiran, kematian dan perkawinan bagi para warga negara yang bertempat tinggal dan bepergian ke luar negeri. Para pegawai kantor konsulat juga mengatur pengapalan, dan semua warga negara yang melakukan perjalanan baik untuk urusan bisnis atau hanya sebatas berwisata, dan melaporkan urusan bisnis dan kegiatan ekonomi di luar negeri. Aktifitas-aktifitas tersebut seringkali dilakukan oleh kantor konsulat yang biasanya berada di pusat perdagangan dan kegiatan yang umumnya berada di ibu kota negara tujuan.

3. Konvensi Diplomatik

Model dan konvensi diplomasi sangat khusus dan formal. Bahasa menjadi salah satu yang terdepan, urusan emosi dalam berkata-kata juga hal yang tabu. Masalah etiket dan kebiasaan diplomatik juga sudah ditentukan secara khusus. Privelege dan hak imunitas para diplomat berasal dari konvensi-konvensi dan perjanjian-perjanjian yang telah lama disusun. Kapan etiket dilanggar, maka akan terjadi penodaan etika diplomasi. Formalitas dan ceremoni tersebut memiliki tujuan praktis: agar semua diplomat dalam mengambil sebuah kesepakatan tentang sesuatu masalah baik itu tentang perang atau perdamaian, sebaiknya dilakukan dalam kondisi yang tenang dan tanpa emosi. Dalam kondisi kritis, otak dingin, kebijaksanaan dan rasa humor yang tinggi juga penting.

a. Protokoler

Bagaimana cara dua negara saling berhubungan sudah ditetapkan sebuah aturan yang formal, secara detil dan secara umum diterima oleh semua negara. Pada masa awal munculnya sistem negara bangsa, kedatangan seorang duta besar

disambut dengan upacara khusus, yang diterima langsung oleh kepala negara tujuan.

Hal ini dikarenakan duta besar, pada dasarnya adalah perwakilan dari kepala negara atau pemerintahan, hubungan antara duta besar dalam sebuah negara pada dasarnya menjadi masalah prestise. Jadi, hal-hal seperti kendaraan yang dipakai oleh duta besar atau bagaimana duta besar masuk ke dalam ruangan, untuk pertama kalinya, menjadi masalah yang sangat serius. Masalah seperti ini pernah juga mewabah di Eropa hingga terselesaikan dengan adanya Konggres di Wina pada tahun 1815 dan Konggres Aix-la-Chapelle pada tahun 1818, dan baru-baru ini, pertemuan di Wina dengan adanya draft Konvensi tentang Hubungan Diplomatik pada tahun 1961. Beberapa hasil dari pertemuan-pertemuan ini, antara lain: para diplomat dibagi menjadi tiga macam, yakni (1) para Duta Besar, legasi, para utusan Paus yang ditunjuk oleh kepala negara; (2) para duta, para menteri, dan individu-individu yang telah ditunjuk oleh kepala negara; (3) para kuasa usaha (*chargé d'affaires*) yang ditunjuk oleh menteri luar negeri. Hanya anggota yang masuk dalam golongan pertama yang dapat mewakili pemimpin negara. Hak preseden (dianggap lebih tinggi) diantara para wakil dinilai berdasarkan senioritas dalam korps diplomatik. Anggota yang paling senior dari korp akan ditunjuk sebagai yang dituakan atau “sesepuh”. Sesepuh biasanya mewakili seluruh korp diplomatik pada upacara-upacara dan pada masalah hak istimewa dan hak imunitas diplomat. Masalah protokoler diplomasi ini secara ringkas dapat dibaca di Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomasi, yang berisi 53 pasal pendek, di bawah pengawasan PBB.

b. Hak Istimewa dan Hak Imunitas

Pada masa-masa awal, hak istimewa, imunitas dan rasa hormat telah diberlakukan dalam kedatangan setiap duta dan utusan. Pada perkembangan sekarang ini hak istimewa dan imunitas dari para diplomat berkembang dan diakui secara universal.

Untuk beberapa abad, daerah di mana misi luar negeri berada diakui sebagai “daerah kekuasaan” dari negara asal. Berdasarkan Konvensi Wina tahun 1961 hal ini tidak menjadi masalah yang berkepanjangan. Dasar pemikiran semacam itu tidak bisa diganggu gugat lagi, meskipun negara asal tetap memberikan dukungan sepenuhnya bagi para duta dan pegawainya untuk melakukan fungsinya secara maksimal. Para warga negara dari negara asal tidak bisa seenaknya masuk wilayah kedutaan tanpa ada izin dari pegawai senior kedutaan. Misi diplomasi ini terbebas dari penyelidikan, gugatan, dan hal-hal lainnya, negara memiliki tugas khusus untuk melindungi misi ini dari gangguan siapapun yang berusaha merusak. Prinsip yang sudah lama diterima ini telah dilanggar di Iran pada bulan November 1979, ketika sekelompok orang Iran memasuki wilayah kedutaan Amerika Serikat dan menyandera 50 staf kedutaan selama 14 bulan.

Komunikasi bebas antara kedutaan dengan negara asal harus diberikan oleh negara tujuan. Kurir diplomatik tidak boleh ditahan (dihambat), dan barang kiriman juga tidak bisa dibuka dan dihambat untuk sampai ke kedutaan. Negara asal juga harus selalu melindungi hak-hak ini, bahkan jika harus melawan warga negaranya sendiri, bila perlu.

Agen-agen diplomatik dan staf-stafnya tidak dapat dikenakan tuntutan dan penahanan, apapun alasannya; diplomat-diplomat ini memiliki hak imun dari hukum pidana, dan pada banyak kasus, dari yurisdiksi administratif maupun perdata. Mereka juga dibebaskan dari pembayaran pajak langsung di negara tujuan. Namun, hak imun atas hukum tidak berlaku bagi diplomat-diplomat tersebut untuk hukum dan yurisdiksi negara asalnya. Jadi, jika ada yang melakukan kejahatan, maka mereka akan dikirimkan ke negara asal dalam status pesona non grata. Para diplomat boleh menikmati hak istimewa dan hak imun tetapi juga memiliki kewajiban untuk menghargai hukum-hukum dan peraturan dari negara tujuan dan mencegah diri untuk mencampuri urusan dalam negeri negara tujuan.

Pada masa perang, negara tujuan harus memberi fasilitas khusus bagi para diplomat ini untuk dapat keluar dari negara tersebut. Jika hubungan diplomatik sedang tidak harmonis dengan negara lain, maka negara tujuan harus tetap menghargai dan melindungi asas-asas misi ini. Jika hubungan tersebut hilang, maka negara-negara tersebut biasanya mempercayakan urusan mereka kepada pihak ketiga yang menerima kedua negara.

c. Bahasa yang Digunakan dalam Diplomasi

Hingga abad ke-17, Bahasa Latin adalah bahasa yang digunakan dalam percakapan diplomatik karena Latin merupakan bahasa universal bagi kaum terpelajar seluruh Eropa. Dari abad ke-17, dalam perkembangan selanjutnya bahasa Perancis semakin diminati sebagai bahasa dalam misi diplomatik karena keunggulan Perancis di Eropa, dalam menentukan bahasa, dan bahasa Perancis juga dipakai sebagai bahasa di beberapa mahkamah di seluruh Eropa.

Masuknya Amerika Serikat sebagai peserta Perang Dunia I menandai dipakainya bahasa Inggris sebagai bahasa kedua diplomasi. Selama masa perang berlangsung, rekaman Liga Bangsa-Bangsa dipertahankan memakai bahasa Inggris dan Perancis. Kemudian, setelah Perang Dunia II, para pemrakarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa menciptakan lima bahasa dalam menyusun dokumen. Secara simultan, bahasa Perancis, Inggris, Rusia, Spanyol dan Cina dijadikan bahasa dalam setiap pertemuan. Namun, kebanyakan dokumen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dipublikasikan hanya dalam bahasa Perancis, Inggris dan Spanyol. Kemudian setelah beberapa perjanjian atau konvensi dirancang, maka event tersebut memakai satu bahasa saja, biasanya Perancis atau Inggris sebagai bahasa dasar yang dipakai dalam diskusi, baik dalam pemaknaan maupun penerjemahan-penerjemahan.

d. Negosiasi Diplomatik

Meskipun negosiasi-negosiasi secara tradisional telah ditinggalkan oleh para diplomat profesional, namun negosiasi yang sangat penting secara umum banyak dipakai secara khusus oleh para utusan atau menteri luar negeri bahkan oleh para kepala negara. Baru-baru ini, misalnya adalah “Diplomasi Timbal Balik (Shuttle Diplomacy)” dari sekretaris negara Amerika Serikat, Henry Kissinger, di Timur Tengah dan keterlibatan Presiden Jimmy Carter dalam perundingan antara presiden Mesir, Anwar al-Sadat dan Perdana Menteri Israel Menachem Begin, tentang perjanjian perdamaian. Kediaman para diplomat, oleh karena itu, setiap harinya selalu diisi dengan negosiasi-negosiasi dan interaksi antar pemimpin dari negara-negara lain.

Menentukan strategi dan taktik dalam melakukan negosiasi adalah pekerjaan yang amat sulit. Ahli ilmu politik berkebangsaan Amerika-Jerman, Hans J. Morgenthau dalam bukunya, *Politics Among Nations* (1948) secara hampir sempurna, memaparkan hal ini dalam kerangka diplomasi modern, yaitu: (1) diplomasi harus terbebas dari spirit awalnya; (2) tujuan dari politik luar negeri harus didefinisikan dalam terminologi kepentingan nasional dan harus didukung oleh kekuasaan yang memadai; (3) diplomasi harus dilihat dari kaca mata atau konteks negara lain; (4) negara-negara tersebut harus memiliki keinginan untuk melakukan kompromi atas semua masalah yang tidak begitu penting bagi mereka; (5) pasukan bersenjata harus dipahami sebagai salah satu instrumen dalam politik luar negeri, bukan yang utama; dan (6) pemerintah adalah pemimpin dari opini publik, bukan budak dari opini tersebut.¹⁸

B. Minyak Bumi

Petroleum (minyak bumi), atau minyak mentah, bahan yang secara alami merupakan bahan dasar yang mengandung minyak, batu bara muda adalah bahan-bahan yang terbentuk dari berbagai macam bahan organik secara kimiawi. Bahan-bahan tersebut dapat ditemukan dalam jumlah yang sangat besar di permukaan bumi dan digunakan sebagai bahan bakar dan sebagai bahan dasar dalam industri kimia. Umumnya, masyarakat industri modern menggunakan bahan-bahan tersebut untuk meningkatkan kemampuan daya gerak –di darat, laut, maupun di udara— setidaknya sudah hampir seratus tahun lebih. Lagi pula, petroleum dan

¹⁸ Encarta 2008, Terjemahan “Diplomacy”

segala macamnya digunakan di berbagai pabrik obat dan pupuk, makanan, plastik, bahan bangunan, cat, dan pakaian untuk menggerakkan mesin-mesin listrik.

Faktanya, peradaban modern sangat bergantung pada minyak dan produk yang dihasilkannya; struktur fisik dan gaya hidup masyarakat subur dan yang dikelilingi oleh keberadaan kota-kota besar adalah hasil dari kecukupan dan murahnya persediaan minyak. Dan tujuan dari negara-negara berkembang –dalam mengeksploitasi sumber daya alam dan untuk menyediakan bahan makanan untuk meningkatkan populasi—berdasarkan asumsi ketersediaan minyak. Akhir-akhir ini, ketersediaan minyak di seluruh dunia menurun kualitasnya namun mempunyai biaya yang tinggi. Banyak pakar meramalkan bahwa minyak tidak bisa bertahan lebih lama lagi untuk menjadi bahan komoditi pada pertengahan abad ke-21 sebagai penyedia energi dunia.

1. Ciri Khas

Komposisi kimiawi dari semua jenis minyak pada dasarnya terdiri dari hidrokarbon, meski ada juga kandungan beberapa persen oksigen dan sulfur. Kandungan sulfur sendiri sekitar 0,1 hingga 5 persen. Minyak mengandung gas, cairan, dan benda-benda padat. Kekentalan minyak berbeda-beda, dari yang cair sekali seperti bensin sampai yang agak kental. Kuantitas gas dalam minyak biasanya larut dalam cairan di dalamnya; jika kandungan gas ini semakin besar, maka kandungan minyak berbau dengan kandungan gas alam di dalamnya.

Pembedaan tiga macam minyak mentah, yaitu: tipe parafin, aspaltik dan tipe campuran. Tipe parafin dibentuk dari molekul-molekul yang kandungan hidrogennya lebih dari dua kali lipat banyaknya kandungan atom karbon. Karakter

molekul-molekul pada tipe aspaltik berupa nafta-nafta, yang mengandung dua kali lipat atom hidrogen dan atom karbon. Pada tipe campuran, terdiri dari hidro karbon dan nafta.

2. Pembentukan

Minyak terbentuk di bawah permukaan bumi yang mengalami pembusukan dengan organisme-organisme laut. Bekas organisme kecil yang hidup di laut --dan sebagian organisme yang hidup di darat (juga) yang terbawa ke laut melalui sungai-sungai dan berbagai tanaman dan tumbuhan yang tumbuh di dasar laut—yang tercampur dalam pasir-pasir dan endapan lumpur laut yang masuk ke dalam dasar laut terdalam. Endapan-endapan itu kaya akan organisme, yang nantinya menjadi bahan dasar minyak mentah. Proses pembentukan minyak dimulai sejak jutaan tahun lalu dengan berkembangnya kehidupan purba, dan proses itu berlanjut hingga sekarang. Sedimen yang dihasilkan semakin tebal di bawah permukaan laut dalam kedalaman tertentu. Endapan yang ada tersebut lambat laun semakin meningkat dan memiliki penambahan temperatur dengan kelipatan ratusan kali. Lumpur dan pasir-pasir berkembang menjadi serpihan dan batu pasir; batu karbon semakin lama menjadi kerangka dan kulit yang kemudian berubah menjadi batu gamping; dan akhirnya matinya organisme yang ada berubah menjadi minyak mentah dan gas alam.

Sekali minyak bumi mulai terbentuk, maka ia akan menyusup pada kerak bumi karena dia memiliki kepadatan yang lebih rendah dari pada air asin yang memenuhi celah-celah serpihan, pasir, dan bebatuan keras yang menyusun kerak bumi. Minyak mentah dan gas alam masuk ke dalam lubang atau celah

mikroskopik (celah yang amat sangat kecil dan sempit) dari lapisan sedimen yang ada di atasnya. Kadang-kadang, material yang terbentuk itu terbentur dengan lapisan bebatuan yang menjegah material tersebut masuk ke dalam lapisan lainnya; minyak tersebut terperangkap dan disitu kemudian terbentuk tandon (tandon) minyak bumi. Banyaknya minyak bumi yang tertahan di dalam perut bumi, namun tidak jarang pula minyak tersebut tampak di permukaan bumi atau di permukaan dasar laut. Cadangan minyak bumi yang merasuk hingga ke dataran bumi ini akan menjadi danau bituminus dan mengeluarkan gas alam.

3. Sejarah Perkembangan

Cadangan minyak mentah di dalam perut bumi telah diketahui oleh manusia semenjak ribuan tahun lalu. Di beberapa tempat, banyak juga yang digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu, misalnya untuk menambal kapal yang bocor, membuat pakaian tahan air, dan sebagai bahan bakar obor. Selama masa renaessance pada abad ke-14, endapan minyak ini disaring untuk dijadikan minyak pelumas dan untuk produk kesehatan, tetapi eksplorasi minyak mentah ini secara massal baru terjadi pada abad ke-19. Revolusi industri telah memicu perubahan baru, yakni pencarian bahan bakar jenis baru, perubahan sosial yang dihasilkan antara lain, pemenuhan kebutuhan akan barang-barang, minyak tanah murah untuk lampu, dan manusia mengharapkan agar bisa menikmati penerangan selepas gelap (malam). Meski demikian, minyak hanya tersedia bagi golongan kaya, dan gas untuk jet hanya tersedia bagi rumah-rumah moden dan apartemen-apartemen di kota metropolitan saja.

Pencarian bahan bakar terbaik untuk kehidupan menjadi sebuah kebutuhan mendasar atas minyak mentah dan beberapa ilmuwan pada pertengahan abad ke-19 lalu mengembangkan sebuah proses untuk mengkomersialisasikan penggunaan bahan bakar tersebut. Karena itulah maka seorang pengusaha asal Inggris James Young dan beberapa yang lain memulai membangun pabrik yang menghasilkan produk-produk dari minyak mentah, tetapi dia kemudian beralih ke usaha penyulingan batu bara dan eksplorasi minyak bumi. Pada 1852, seorang fisikawan asal Kanada dan seorang ahli geologi, Abraham Gessner menghasilkan hak paten atas pengolahan minyak mentah dengan cara yang relatif lebih bersih, yang dapat menjadi bahan bakar lampu yang kemudian disebut sebagai kerosin (minyak tanah); dan pada tahun 1855 seorang kimiawan asal Amerika, Benjamin Silliman, mempublikasikan sebuah laporan penelitian yang mengindikasikan adanya banyak manfaat dari produk-produk yang merupakan hasil dari penyulingan minyak bumi.

Dari sinilah, kemudian, permintaan terhadap minyak bumi yang semakin tinggi dimulai. Untuk beberapa tahun kemudian, manusia tahu bahwa penyulingan sumur minyak, dan terkadang, garam juga mengandung minyak bumi, sehingga dengan sendirinya konsep penyulingan minyak mentah mengikuti keadaan tersebut. Untuk kali pertama, diadakan penggalian sumur minyak di Jerman dari tahun 1857 hingga 1859, tetapi penggalian sumur minyak yang dianggap fenomenal adalah penggalian sumur minyak di sebuah sumur kecil, di Pennsylvania, oleh “Kolonel” Edwin L. Drake, pada tahun 1859. Drake, dikontrak oleh seorang pengusaha bernama George H. Bissell –yang selalu menyuplai Silliman dengan sampel-sampel bijih minyak bumi untuk kepentingan penelitian

yang dilakukannya— yang telah melakukan penyulingan minyak itu untuk menemukan “induk sumur minyak” yang diduga kuat berasal dari Pensilvania Barat. Tandon yang dibuat oleh Drake sebenarnya tidak terlalu dalam –hanya sekitar 21,2 meter (69,5 kaki)—dan minyak yang dihasilkan adalah minyak jenis parafin yang memancar kuat dan sangat mudah untuk disuling.

Kesuksesan Darke ini menjadi awal dari pertumbuhan pesat industri perminyakan dunia. Dengan segera, minyak bumi menjadi perhatian serius para ilmuwan, dan banyak penelitian yang berkecimpung di dalam menganalisa formasinya, pergerakan dan perhentianya. Dengan penemuan mobil dan banyaknya energi yang dipakai untuk mendukung Perang Dunia I (1914-1918), maka industri perminyakan menjadi salah satu fondasi masyarakat industri.

4. Eksplorasi Minyak Bumi

Untuk menemukan minyak mentah yang ada di perut bumi, seorang ahli geologi harus mencari sebuah lembah sedimen (lapisan) yang kaya akan serpihan bahan organik (berasal dari makhluk hidup) yang telah terkubur dalam waktu yang sangat lama, di mana minyak bumi dapat terbentuk di sana. Minyak bumi selalu dapat bergerak menuju kantong (gua) di dalam tanah yang mampu menampung sejumlah zat cair. Terciptanya minyak mentah di celah perut bumi terbatas oleh dua kondisi di atas, dan haruslah terjadi secara simulan, dan berlangsung selama puluhan juta hingga ratusan juta tahun untuk bisa menjadi bentuk minyak.

Para ahli perminyakan dan geofisika memiliki banyak alat yang menunjang kegiatan mereka, untuk mengidentifikasi daerah-daerah yang potensial untuk

dilakukan pengeboran. Karenanya, pemetaan pada permukaan bumi dimana terletak dasar sedimen memungkinkan interpretasi keadaan di bawah permukaan bumi, yang mendukung informasi untuk mengebor ke dalam kerak dan mencoba masuk ke dalam inti lapisan bebatuan. Lebih lanjut, dengan berkembangnya teknik seismik (yang berkenaan dengan pergerakan tanah) semakin mempermudah dalam menganalisa struktur dan ke-salinghubung-an berbagai lapisan yang ada di bawah permukaan bumi. Meski demikian, lagi-lagi, cara terbaik untuk membuktikan ada tidaknya kandungan minyak adalah dengan pengeboran. Kenyataannya, dalam banyak kasus, ladang-ladang minyak yang telah diidentifikasi dengan adanya resapan minyak bumi, dan kebanyakan ladang-ladang minyak yang telah ditemukan dengan cara apa yang kemudian disebut “wildcatter”, yang mengandaikan adanya kemungkinan lebih banyak unsur firasat (intuisi) daripada dengan kemajuan ilmu pengetahuan. (istilah “wildcatter” berasal dari Texas barat, di mana pada awal tahun 1920-an ada kru pengeboran minyak yang bertemu banyak kucing hutan (kucing liar) ketika melakukan penelitian di lokasi pengeboran untuk mencari sumur minyak. Perburuan kucing-kucing liar ini menemui alat pengeboran minyak, dan sumur-sumur ini kemudian dikenal sebagai sumur kucing hutan (“wildcat well”).

Sekali ladang minyak ditemukan, maka bisa jadi ia memiliki beberapa tandon, yaitu mungkin lebih dari satu, mungkin juga tandon itu saling menyambung, yang terisi oleh kumpulan minyak. Beberapa tandon itu mungkin saling bertumpuk, dan terisolasi karena adanya serpihan dan lapisan batuan kedap. Begitu juga, tandon-tandon minyak itu juga memiliki banyak jenis, dari yang memiliki luas beberapa puluh hektar hingga berpuluh-puluh kilometer persegi,

dan ada pula yang memiliki kedalaman beberapa meter hingga beberapa ratus meter atau bahkan lebih. Kebanyakan ladang minyak bumi yang telah ditemukan dan dieksplorasi di dunia berasal dari beberapa tandon minyak besar. Di Amerika Serikat, misalnya, 60 dari sekitar 10.000 ladang minyak yang ada, terhitung setengahnya adalah produktif dan sisanya cadangan.

5. Produksi Utama

Kebanyakan sumur minyak di Amerika Serikat dibor dengan menggunakan metode putar yang untuk pertama kalinya dipatenkan oleh seorang warga negara Inggris pada tahun 1844, R. Beart. Pada pengeboran sistem putar, rangkaian (kumparan) bor, satu set pipa terkoneksi, didukung oleh sebuah mesin kerekan. Rangkaian bor diputar berpasangan dengan meja yang berputar pada dasar kerekan. Mata bor pada ujung kumparan biasanya dibuat tiga kerucut berbentuk roda yang dinaikkan dengan ujung gigi yang terbuat dari bahan sangat keras. Potongan-potongan bor diangkat secara terus menerus ke permukaan dengan sebuah sistem sirkulasi cair (generator bertenaga air) yang digerakan oleh sebuah pompa.

Minyak mentah kadang-kadang terhambat oleh batu besar, sehingga dalam pengeboran, ia tidak bisa terangkat dengan lancar. Minyak tersebut tertekan karena ada daya mengapung, sehingga ia dapat keluar ke permukaan bumi. Banyak kasus menyatakan, minyak mentah ini ada yang mengandung gas alam, dan gas alam ini tetap ada di dalam tandon minyak karena adanya tekanan dari dalam. Gas ini dapat tertekan keluar jika ada tekanan dari mata bor yang masuk ke dalamnya. Dan gas yang tertekan keluar tadi, menguap lewat celah-celah tanah,

yang pada akhirnya memperlebar wilayah penampungan minyak bumi di dalam tanah.

Semakin banyak tekanan yang dilakukan pada lobang pengeboran, maka gas alam ini pun semakin menipis, menguap ke permukaan. Terkadang, cairan minyak tidak bisa menyentuh permukaan tanah, dalam hal ini maka mata bor perlu diset ulang untuk mendapatkan kembali performa terbaik. Terkadang, arus aliran minyak mentah ini menjadi semakin kecil, dan dengan demikian biaya pengangkatan minyak ke permukaan juga semakin meningkat, bahkan biaya yang diperlukan terkadang melebihi nilai jual (setelah dihitung seluruh biaya operasional, pajak, asuransi dan modal awal). Ketika nilai ekonomis sebuah sumur minyak tidak lagi tercapai, maka sumur itu pun ditinggalkan.

6. Volume Produksi dan Cadangan Minyak

Minyak mentah mungkin barang yang paling banyak digunakan yang tersedia bagi manusia. Selama 2003, Amerika Serikat telah memakai 7 milyar barel minyak bumi per tahun, dan konsumsi di seluruh dunia mencapai 29,3 milyar barel per tahun.

a. Cadangan Minyak

Cadangan minyak yang dapat dipulihkan di dunia secara teknis, bertambah sekitar satu trilyun barel, di mana 73 milyar barel berada di Amerika Utara. Meski demikian, hanya sedikit saja cadangan minyak yang dapat diambil. Cadangan minyak yang telah dikenal dapat dijadikan komoditas ekonomi, lebih dari setengahnya berada di Timur Tengah, dan hanya sebagian kecil berada di Amerika Utara.

b. Proyeksi ke Depan

Penemuan lokasi cadangan minyak di seluruh dunia selalu di usahakan, dan teknologi selalu dikembangkan dari tahun ke tahun untuk mengembangkan sebuah sistem recovery. Namun, tidak ada satupun pakar yang optimis, jika penemuan-penemuan tersebut mampu menyediakan minyak mentah murah dari waktu ke waktu. Sebagai contoh, ladang minyak Prudhoe Bay di lereng utara Alaska adalah ladang minyak paling besar yang pernah ditemukan. Ladang ini diharapkan mampu memproduksi minyak mentah sebanyak 10 milyar barel, yang diharapkan akan mampu menyediakan kebutuhan minyak Amerika Serikat selama 2 tahun, tetapi hanya satu saja lahan minyak yang ada di sana selama lebih dari satu abad lamanya, yang ditemukan.

c. Alternatif-alternatif

Melihat keadaan yang demikian, maka diperlukan adanya pemikiran untuk tetap menjaga kelangsungan peradaban manusia ke depannya. Pilihan yang ada sungguh sangat minim, meski sumber energi yang paling banyak menyediakan energi bagi bumi banyak dibicarakan (eksistensinya). Minyak mentah sintetik belum juga membuahkan hasil yang menggembirakan, dan masalah serius yang muncul kemudian adalah berkisar tentang perlombaan biaya produksi dan volume produksi yang dapat dicapai dengan sumber daya potensial yang ada. Namun demikian, sumber-sumber energi alternatif seperti energi panas bumi, tenaga matahari, dan tenaga nuklir, telah terbukti ekonomis dapat menggantikan bahan bakar minyak.

7. Kerusakan lingkungan akibat penggunaan bahan bakar minyak

Permasalahan baru yang muncul berkaitan dengan pencarian energi alternatif selain minyak dan bahan bakar dari fosil adalah masalah pemanasan global. Bahan bakar minyak menghasilkan karbon dioksida, masuk ke dalam atmosfer dan banyak ahli atmosfer yang percaya bahwa peningkatan efek rumah kaca akan mengakibatkan perubahan iklim. Perubahan ini akan mengakibatkan banyak masalah lingkungan, termasuk perubahan cuaca yang tidak menentu dan mencairnya es. Perubahan cuaca secara tidak menentu akan mengakibatkan kekeringan yang luar biasa. Dan mencairnya es di kutub akan mengakibatkan banjir dan naiknya permukaan laut. Banyak sekali organisasi internasional yang mengusulkan kepada pemerintah dan semua penduduk bumi untuk mengurangi emisi gas dengan melakukan penghematan energi dengan teknologi yang ramah lingkungan dan berbagai cara lain. Di Amerika Serikat banyak organisasi pecinta lingkungan yang mengusulkan kepada pemerintah AS untuk meratifikasi protokol Kyoto, sebuah perjanjian internasional yang secara spesifik memberi batas waktu bagi pengurangan emisi gas buang.

Pengeboran sumur minyak juga menciptakan masalah lingkungan yang serius, karena minyak yang terpompa keluar dari dasar tandon biasanya tidak bisa bercampur dengan air asin. Hal ini mengakibatkan pencemaran air, sehingga harus dimasukkan kembali ke dalam kerak bebatuan bumi.

Minyak bumi, biasanya juga dipindahkan melalui jarak yang jauh dengan menggunakan tanker atau pipa untuk mencapai tempat penyulingan. Pada proses ini, acapkali mengalami kecelakaan dan tumpah. Tumpahan minyak, khususnya

dalam jumlah besar dapat juga mencemari lingkungan dan mengganggu ekosistem dan habitat makhluk hidup.¹⁹

C. Politik

Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain:²⁰

- a. politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles)
- b. politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara
- c. politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat
- d. politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik.

Maka hal ini yang membuat beberapa negara yang memiliki pasokan minyak yang berlimpah dapat memanfaatkannya menjadi suatu hal yang dapat menguntungkan, dengan cara membuat suatu kebijakan pemerintah baik untuk warga negara mereka sendiri atau bahkan pada tingkatan internasional. Dapat

¹⁹ Encarta 2008, Terjemahan "Petroleum"

²⁰ Politik dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Politik>, di akses pada tanggal 1 februari 2008

dilihat dimana Irak memiliki jumlah minyak yang jauh lebih banyak dari negara-negara lain di dunia (kecuali Arab Saudi). Banyak kebijakan yang lahir dari pemerintahan di Irak, kebijakan yang yang dikeluarkan oleh Irak sendiri pada dunia internasional yaitu, Irak memiliki hak yang besar dalam menentukan jumlah minyak yang boleh di ekspor ke dunia barat dan harga yang sesuai mereka sepakati.

Di dalam suatu konsep politik memerlukan adanya generalisasi yang abstrak mengenai beberapa fenomena yang di sebut teori. Dalam menyusun generalisasi itu teori selalu memakai konsep-konsep. Konsep timbul berdasar pikiran manusia dan hal itu yang membuatnya abstrak, walaupun fakta-fakta dapat di pakai sebagai batu loncatan. Teori politik adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik. Dengan perkataan lain teori politik adalah bahasan dan renungan atas a) tujuan dari kegiatan politik, b) cara-cara mencapai tujuan itu, c) kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan-kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik yang tertentu dan, d) kewajiban-kewajiban (obligations) yang diakibatkan oleh oleh tujuan politik itu.²¹

Menurut Thomas P. Jenkin dalam *The Study of Political Theory* dibedakan dua macam teori politik, sekalipun perbedaan antara kedua kelompok teori tidak bersifat mutlak.

- a. Teori-teori yang mempunyai dasar moral dan yang menentukan norma-norma politik (norms for political behavior). Karena adanya unsure norma-norma dan nilai (value) maka teori-teori ini boleh dinamakan valuational

²¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2001, hal 30

(mengandung nilai). Yang termasuk dalam golongan ini antarlain filsafat politik, teori politik sistematis, ideology, dan sebagainya.

- b. Teori-teori yang menggambarkan dan membahas fenomena dan fakta-fakta politik dengan tidak mempersoalkan norma-norma atau nilai. Teri-teori ini dapat dinamakan non-valuational atau value free (bebas nilai). Ia biasanya bersifat diskriptif (menggambarkan) dan komparatif (membandingkan). Ia berusaha untuk membahas fakta-fakta kehidupan politik sedemikian rupa sehingga dapat disistematisir dan disimpulkan dalam generalisasi-generalisasi.

D. Interelasi Diplomasi, Minyak dan Politik

Harold Nicholson, seorang pengkaji dan praktisi yang pandai dalam hal diplomasi di abad keduapuluh menegaskan bahwa dalam bahasa yang lebih mutakhir kata diplomasi secara gegabah diambil untuk menunjukan paling tidak lima hal yang berbeda. Dari kelima hal tersebut empat hal yang pertama menyangkut:²² (1) politik luar negeri, (2) negosiasi, (3) mekanisme pelaksanaan negosiasi tersebut, dan (4) suatu cabang Dinas Luar Negeri. Ia selanjutnya mengatakan bahwa interpretasi kelima merupakan suatu kualitas abstrak pemberian, yang dalam arti baik mencakup keahlian dalam pelaksanaan negosiasi internasional; dan dalam arti yang buruk mencakup tindakan taktik yang lebih licik. Dan pada, The Oxford English Dictionary memberi konotasi sebagai berikut: “manajemen hubungan internasional melalui negosiasi; yang mana hubungan ini diselaraskan dan diatur oleh duta besar dan para wakil; bisnis atau

²² Ibid, hal 3

seni para diplomat.” Menurut *the Chamber’s Twentieth Century Dictionary*, diplomasi adalah “the art of negotiation, especially of treaties between states; politica skill.” (seni berunding, khususnya tentang perjajian di antara Negara-negara ; keahlian politik).²³

Apabila dilihat dari beberapa definisi diatas, maka pada dasarnya suatu diplomasi merupakan suatu tindakan untuk kepentingan luar negeri suatu Negara. Dan kepentingan suatu Negara tidak terlepas pada kekuatan Negara itu sendiri, dimana kekuatan Negara yang sanga mendasar menjadi modal penting bagi sebuah Negara dalam memenangkan pertikaian dengan Negara lain. Hans J. Morgenthau, seorang Profesor Ilmu Hubungan Internasional, menyebut salah satu elemen kekuatan suatu Negara yaitu sumber-sumber alam. Minyak merupakan suatu sumber daya alam yang sangat berpotensi dalam meningkatkan kualitas diplomasi negaranya, dimana minyak merupakan sumber alam atau kebutuhan yang sangat besar pengaruhnya dalam kemajuan perekonomian, perindustrian dan bahkan dapat meningkatkan kekuatan militer Negara.

Adanya pengaruh minyak dalam sebuah politik tiap Negara, dapat pula terlihat peranan yang sangat signifikan mengenai suatu tindakan diplomasi yang dilakukan Negara tersebut. Dalam suatu sudut pandang politik dapat berupa usaha yang ditempuh warga Negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles)²⁴, hal tersebut juga dapat dilakukan dengan suatu tindakan diplomasi. Dengan dilakukannya diplomasi dengan Negara lain maka, terjadi pula interaksi antara politik luar negeri kedua Negara.

²³ S.L. Roy, *Diplomasi*, Rajawali Pers, Jakarta, hal 2

²⁴ Politik, Op.Cit.

1. Minyak Sebagai Issue Sentral Ekonomi dan Politik Internasional

Krisis energi yang berlangsung di era 1970-an lalu telah menggetarkan sendi-sendi kehidupan ekonomi dan politik dunia. Suatu penelitian berjangkauan panjang yang telah dibuat tahun 1960-an tidak pernah menandakan bahwa energi adalah merupakan suatu persoalan pokok dalam tatakrama kehidupan. Namun diawal tahun 1970-an, energi tiba-tiba menjelma menjadi sebuah issue sentral baik dibidang ekonomi maupun dipanggung politik internasional. Adanya ketidak-tentuan pasar minyak internasional membuat energi akan tetap unggul sebagai bahan baku pembangkit tenaga. Segi-segi keunikannya terletak pada adanya kecenderungan meningkatnya harga mengikuti menciutnya pengadaan termasuk perubahan mendasar disektor permintaan. Kondisi seperti ini memaparkan adanya keterbatasan sumber-sumber minyak, dan sekaligus memperlihatkan bahwa hubungan historis antara tingkat permintaan energi dengan skala aktivitas ekonomi masih tetap relevan, sekalipun dengan harga penjualan yang cukup tinggi. Sebenarnya, ppenurunan konsumsi energi disebagian besar Negara industri maju tahun 1974 dan 1975 lalu tidak semata-mata disebabkan adanya gejolak harga pasar tetapi lebih merupakan akibat langsung dari pukulan internasional yang berkepanjangan. Sekalipun sector energi hanya memberikan andil kecil terhadap pembentukan GNP Negara-negara maju namun ia adalah merupakan faktor penentu pokok bagi berprosesnya roda-roda ekonomi dan industri mereka. Dengan sendirinya, masalah pengadaan energi yang tergantung pada jumlah deposit yang terbatas dan harga yang menggejolak akan

merupakan determinan yang sering mengganggu tingkat pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi disana.²⁵

a. Hubungan Minyak dan Ekonomi

Bersandar pada kenyataan, dapat ditandaskan bahwa mekanisme ekonomi pasar lebih-lebih melalui pengendalian tingkat harga, hanya akan mampu menjaga keseimbangan permintaan dan pengadaan sepanjang satu periode waktu yang relative singkat, mungkin 25-30 tahun. Pada waktu yang sama, faktor politik seperti kebijaksanaan dan preperensi yang diberikan oleh berbagai Negara eksportir utama akan memiliki pengaruh yang lebih tinggi dalam mengendalikan hal yang sama dibandingkan dengan kekuatan pasar tersebut. Kebijaksanaan menekan permintaan dan konsumen demi mengendalikan harga kelihatannya tidak akan dapat membuahkan hasil optimal seperti waktu yang sudah-sudah, dan itu pun hanya mungkin dilakukan oleh Amerika serta sejumlah kecil Negara industry maju. Keadaan ini mungkin disebabkan telah menyusutnya sumber-sumber minyak yang bbisa dieksploitor serta meningkatkannya kebutuhan dana invertasi yang harus ditanam disitu, sementara cadangan modal internnasional kian mengecil.²⁶

Terbatasnya kemampuan mekanisme harga untuk mengendalikan keseimbangan penawaran dan permintaan otomatis menciptakan kekacauan penting diberbagai segi lebih-lebih disektor harga. Hal ini disebabkan oleh tekanan faktor politik dan memburuknya manajemen organisasi minyak internasiol. Dewasa ini, tingkat harga jual minyak secara relatif telah ditentukan

²⁵ Qystein Noreng, *Minyak Dalam Politik (upaya mencapai consensus internasional)*, Rajawali Pers, Jakarta 1983, hal 2.

²⁶ Ibid

oleh transaksi terbuka di pasar bebas. Tegasnya, tidak ada hubungan pengaruh-mempengaruhi antara harga minyak dengan biaya produksi.²⁷ Sementara dimasa-masa yang lalu, disebabkan adanya pengaruh kekuatan politik dan wibawa organisasi, percaturan bisnis minyak internasional selalu diarahkan untuk memberi keuntungan bagi konsumen di negara maju. Ketika kendali pasar minyak beralih ketangan produsen, pihak konsumen mendadak mendapat pukulan berarti termasuk kegoncangan pengadaan. Untuk menghindarkan ketidakstabilan baik politik maupun ekonomis dalam jangka pendek sambil berupaya menciptakan keseimbangan jangka panjang, pihak negara maju merasa perlu menempuh kebijaksanaan politik demi terselesaikannya kemelut ini secara mendasar. Cara yang mereka pilih adalah melalui negosiasi persetujuan minyak internasional. Sebaliknya, pihak negara produsen menekankan bahwa kerangka persetujuan tersebut harus benar-benar mampu mengamankan kepentingan vital mereka.

Dengan menggunakan model ekonomi politik yang berlangsung dipasar minyak internasional, maka faktor utama dari persetujuan minyak internasional yang disajikan dapat diperinci atas beberapa elemen penting. Salah satu diantaranya : hubungan rasional antara harga dan pengadaan. Kemungkinan besar akan terjadi peningkatan produksi minyak secara gradual sejalan dengan pertumbuhan konsumsi, dan sampai tingkat harga tertentu, OPEC pasti pula akan memberi jaminan tambahan produksi.²⁸

²⁷ Ibid

²⁸ Ibid

Faktor kedua bersangkutan dengan kesiagaan para produsen minyak untuk menciptakan perluasan pengadaan, sekaligus mencari metode untuk mengurangi beban neraca pembayaran negara konsumen. Nampaknya hal ini bisa diwujudkan melalui paket jaminan investasi surplus petro dollar OPEC di negara OECD (Organization for Economic Cooperation and Development), yang ditujukan untuk menralisir tekanan inflasi dan kemungkinan depresiasi termasuk nasionalisasi.

Faktor ketiga adalah perolehan produsen atas berbagai kepentingan langsung dari konsumsi minyak dan energy yang dibeli oleh importir termasuk intensifikasi usaha pengembangan sumber energy alternative mereka.

Faktor keempat, sama halnya dengan faktor ketiga, adalah merupakan perpaduan antara dua kepentingan. Yang pertama tersirat adanya kepentingan OPEC akan usaha diversifikasi sumber-sumber pendapatan mereka sedang yang kedua berhubungan dengan interest negara maju untuk tetap mempertahankan bahkan mempertegas ketergantungan negara berkembang pada kemampuan ekonomi dan politik mereka.²⁹

b. Politisasi Minyak

Produksi dan konsumsi energi yang berasal dari sumber-sumber yang dapat diperbaharui bisa dilihat dari kemampuannya untuk memproses secara utuh, dimana sumber dasar dan kemampuan pengadaan tidak pernah terkikis oleh penggunaan yang terus menerus. Contohnya tenaga hidroulik dan sumber panas bumi. Sebaliknya, produksi dan konsumsi energi yang berasal dari sumber yang tak dapat diperbaharui selalu terpengaruh oleh kemungkinan menipisnya

²⁹ Ibid

cadangan sejalan dengan kuantitas dan intensitas penggunaan.³⁰ Contohnya minyak bumi dan gas alam cair.

Dalam konteks politik, hal ini menjelaskan bahwa hubungan antara kekuatan dan pengendalian industry daapat berubah secara drastis sepanjang waktu. Dasar-dasar bagi diadakannya control politik terhadap kehidupan industry juga akan berubah sejalan dengan perkembangan jaman. Pengadaan energi internasional dewasa ini berada pada periode penyesuaian yang serba memusingkan. Pasar minyak telah memperlihatkan perubahan penting sejak awal tahun 1970-an, berawal ketika produksi mulai kendur dan konsumsi menggerogoti persediaan cadangan.

Penemuan sumber-sumber minyak baru jelas menunjukkan satu ketidakseimbangan antar wilayah. Lokasi sumur minyak yang paling potensial justru ditemukan di Amerika Utara dan Uni Soviet, sedang wilayah sumber baru yang membutuhkan biaya eksplorasi murah adalah Timur Tengah. Total cadangan minyak dunia yang bisa dieksploitir dewasa ini diperkirakan telah mencapai 88 juta matrik ton atau sama dengan 650 juta barrel.³¹

Kedudukan kritis minyak dalam keseimbangan energi dunia serta ketidakmerataan distribusi sumber-sumbernya. Membuat minyak tampil sebagai satu jenis komoditi yang baik secara ekonomis, politis bahkan strategis sedemikian pentingnya. Politik penentuan harga dan kendali pengadaannya seringkali menjadi sumber ketegangan internasional yang begitu eksplosif. Singkatnya, minyak

³⁰30 Nicholas Georgescu-Roegen, "Energy and Economic Myths", Southern Economic Journal, vol. 41, no. 3, January 1975, p. 367, dalam buku Minyak Dalam Politik.

³¹ International Petroleum Encyclopedia, 1977, The Petroleum Publishing Co, Tulsa, Okla, 1977, pp. 303-306. Dalam buku Minyak Dalam Politik

mempunyai satu hubungan fungsional dengan berbagai issue penting dalam tertib kehidupan umat manusia. Sejak hampir semua negara di dunia menjadi pengimpor minyak sekaligus menggantungkan sebagian besar konsumsi dan kebutuhan energi mereka pada minyak impor, tak dapat dihindarkan bahwa harga dan proses pengendaliannya telah mempengaruhi kemandirian ekonomi dan kebijaksanaan politik luar negeri semua negara tersebut. Untuk mempertegas pernyataan diatas, bisa kita katakan bahwa minyak berkaitan secara sistematis dengan sejumlah masalah penting seperti dengan derajat pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, inflasi, dan orientasi kebijakan politik luar negeri secara umum.³²

Konsekuensinya, segala persoalan yang bersangkutan dengan minyak pasti memiliki satu prioritas tinggi dalam industry, ekonomi, perdagangan dan kebijaksanaan politik luar negeri, baik dinegara importir maupun eksportir sendiri, tak peduli apakah negara itu sudah tergolong maju apalagi negara berkembang.

2. Keterkaitan Diplomasi dan Politik Terhadap Minyak

Seperti yang kita tahu bahwa diplomasi diyakini berasal dari kata Yunani “*diploun*” yang berarti melipat, salah seorang pengkaji dan praktisi yang pandai dalam hal diplomasi di abad keduapuluh ini, menegaskan bahwa dalam bahasa yang mutakhir kata diplomasi secara gegabah diambil untuk menunjukkan paling tidak lima hal yang berbeda. Dari kelima hal tersebut ialah: (1) politik luar negeri, (2) negosiasi, (3) mekanisme pelaksanaan negosiasi tersebut, (4) suatu cabang

³² Willrich, “*Energy and World Politics*”, p. 180ff

Dinas Luar negeri, dan (5) merupakan suatu kualitas abstrak pemberian, yang dalam arti baik mencakup keahlian dalam pelaksanaan negosiasi internasional.³³

Pemikiran yang lebih komprehensif dikemukakan oleh Nicholson, menurutnya diplomasi paling tidak mempunyai beberapa poin, salah satunya yaitu; diplomasi sering dihubungkan dengan tujuan politik suatu negara, ia juga mengatakan bahwa diplomasi adalah perundingan yang dilakukan untuk memajukan kepentingan suatu negara yang dimaksud.

Menurut Margenthau minyak dapat meningkatkan suatu kualitas diplomasi suatu negara, karena sumber alam dan kualitas diplomasi merupakan salah satu kekuatan nasional (*national power*). Minyak merupakan sumber daya alam yang sangat bermanfaat bagi perekonomian dan perindustrian, bahkan minyak juga dapat membuat suatu suasana baru dalam perpolitikan internasional. Dimana hampir semua negara didunia mengimpor minyak sebagai energi penggerak ekonomi dan militer mereka.

Negara yang hanya memiliki pasokan minyak sedikit, secara otomatis akan mengimpor dari para produsen. Contohnya Negara Cina telah menandatangani kesepakatan kerjasama dengan Irak untuk memperluas wilayah minyaknya. Tidak hanya Cina yang melakukan suatu diplomasi karena minyak, melainkan Negara-negara Eropa seperti German, Prancis dan Rusia. Dewasa ini perundingan yang terjadi yaitu antara Amerika Serikat dan negara yang memiliki pasokan minyak terbesar kedua yaitu Irak, walau perundingan tersebut tidak tampak jelas dan berakhir dengan konflik (perang).

³³ S.L.Roy, *Diplomasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal 3

BAB III

Faktor dan Tindakan yang Dilakukan Amerika Serikat Dalam Rangka Invasi Ke Irak

Semua kejadian yang terjadi di dunia Internasional, terutama yang melibatkan lebih dari satu negara tidak akan pernah lepas dari yang namanya konflik. Baik itu yang bersifat hanya konflik ringan bahkan hingga terjadinya baku tembak (war). Tanggal 11 September 2001 pagi, sejumlah teroris menumpang pesawat bajakan untuk membunuh hampir tiga ribu orang di New York City, Washington DC., dan Pennsylvania. Hanya lima jam berselang, dengan asab masih mengepul di koridor akibat serangan ke Pentagon, Menteri Pertahanan Donald Rumsfeld sudah terbayang akan Saddam Hussein, dictator Irak. Dalam rapat di ruang tengah Pentagon, ia mengungkapkan dengan blak-blakan siapa target yang ingin ia habisi. “Pukul S.H. sekaligus bukan hanya OBL,” geramnya, seperti yang dicatat salah seorang asisten yang menggunakan singkatan untuk Saddam Hussein dan Osama bin Laden, pemimpin Al Qaeda.³⁴

Pasca terjadi tragedi 11 September 2001 (11/9), AS mengutuk keras terhadap pelaku yang telah menghancurkan kota dan pusat pertahanan AS. AS sendiri telah menuding kelompok Al-Qaeda yang melakukannya, kelompok ini pun di tuding oleh AS merupakan kelompok teroris yang dapat membahayakan

³⁴ Mark Fineman, Robin Wright, dan Doyle McManus, “Washington’s Battle Plan; Preparing for War, Stumbling to Peace; U.S. Is Paying the Price for Missteps Made on Iraq,” *Los Angeles Times*, 18 Juli 2003, hal. A1. Dalam T.Christian Miller, *Blood Money*, UFUK, Jakarta, hal 11

dunia yang bermarkas di Timur Tengah. Sehingga sampai saat ini banyak negara barat ikut dalam rencana AS untuk membumi hanguskan Timur Tengah.

Peranan negara-negara barat dalam persoalan politik dan ekonomi di Timur Tengah lebih banyak diwarnai oleh dominannya campur tangan Amerika Serikat (AS). Hal ini, terutama, berkaitan dengan kebijakan Washington dalam memimpin pengusiran pasukan Irak dari bumi Kuwait (1990-1991) dan kemudian menjatuhkan kekuasaan Saddam Hussein, serta dalam memonopoli proses perdamaian Arab-Israel. Namun, campur tangan politik AS di Timur Tengah tidak selamanya berjalan mulus. Bahkan sejak pertengahan 1990-an terlihat suatu fenomena dimana semakin banyak negara Timur Tengah, termasuk para sekutu AS sendiri, yang mulai menolak dominasi dan hegemoni politik Washington.³⁵ Ada terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi politik luar negeri AS dalam serangannya ke Irak.

A. Era Bill Clinton

Penandatanganan perjanjian perdamaian antara yordania dan Israel berlangsung pada 26 Oktober 1994 dan disaksikan langsung oleh Presiden AS Bill Clinton. Bagi Yordania sendiri, khususnya bagi Raja Hussein bin Talal, perdamaian dengan Israel jelas sangat menguntungkan. Dengan berdamai dengan Israel, Yordania berharap akan diterima kembali oleh kalangan Negara-negara barat yang telah sempat mengucilkannya akibat dukungan yang diberikan Raja Hussein pada Presiden Irak Saddam Hussein selama berkobar krisis dan perang Kuwait (1990-1991). Waktu itu pemerintahan Clinton menjanjikan untuk

³⁵ Riza Sihbudi, *Menyandera Timur Tengah*, Jakarta : Mizan, 2007, hal 131

menghapuskan utang Yordania pada AS yang berjumlah puluhan milyar dolar, setelah ditandatangani perjanjian damai Amman-Tel Aviv. Banyak warga Yordania yang keturunan Palestina, di mana mereka pun mendukung langkah Hussein itu, karena Presiden Yasser Arafat dan Otoritas Palestinya juga sudah menandatangani perjanjian serupa dengan Israel (Perjanjian Oslo 1993).

Akan tetapi, yang paling diuntungkan dari perjanjian damai Yordania-Israel, tidak lain dari AS dan Israel sendiri. Bagi AS, peristiwa itu semakin meneguhkan dominasi dan hegemoni politiknya di Timur Tengah, khususnya Dunia Arab. Pada saat itu bias dikatakan tidak ada Negara Arab yang berani melawan AS. Memang masih ada Sudan, Libya, dan Irak. Namun, ketiganya masih terus menerus menghadapi tekanan yang luar biasa kerasnya dari AS dan sekutunya. “Orde Dunia Baru” yang muncul pasca-Perang Dingin memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi AS untuk memanfaatkan PBB berikut segala perangkatnya guna memaksakan Washington. Atas nama PBB, misalnya, AS “berhasil” mengucilkan Irak, Iran, dan membungkam Libya. “Politik pengucilan” berupa sanksi dan embargo yang dilakukan Clinton dan Pbb terhadap Libya dan Irak cenderung terus dilakukan, kendati kedua Negara itu bersedia mematuhi hampir semua resolusi PBB.³⁶

1. Clinton dan Embargo

Embargo pada hakekatnya merupakan sebuah langkah (reaksi) pengucilan politik yang dilakukan oleh satu atau beberapa Negara atau organisasi internasional terhadap Negara tertentu dengan tujuan agar Negara tersebut

³⁶ Ibid, 132

mengikuti kemauan, keinginan, atau tauran main yang dibuat pihak pengembargo. Embargo dapat berbentuk suatu sanksi atau pemboikotan ekonomi, militer, pengucilan diplomatik, atau kombinasi dari ketiganya. Dalam sejarah politik modern, sangat jarang (atau bahkan belum pernah ada?) suatu kebijakan embargo yang dapat memenuhi sasaran yang dituju pihak pengembargo. Afrika Selatan dan Taiwan, kedua Negara ini pernah mengalami masa yang panjang menjadi “korban” embargo,³⁷ namun kedua Negara tersebut pada kenyataannya masih tetap *survive*. Bahkan kedua Negara menjadi Negara yang paling maju di kawasan masing-masing pada waktu itu. Contoh lain, Israel yang pernah juga di embargo secara ekonomi dan politik oleh mayoritas negara Dunia Ketiga, akan tetapi negara Yahudi itu pun tetap bisa *survive*. Bahkan, Israel tidak pernah mengalami kekalahan dalam peperangannya melawan para tetangga Arab-nya. Kasus paling belakangan adalah embargo ekonomi-politik-militer yang dikenakan pada Libya, Irak, dan Serbia. Ketiga negara ini pun, kendati mengalami dampak ekonomi, namun tidak sampai membuat mereka menjadi “bangkrut”.

2. Clinton vs Arab-Irak

Kuatnya perlawanan terhadap campur tangan politik Washington di Timur Tengah terlihat pula pada konflik Irak (Saddam) vs AS (Clinton) yang bermula dari adanya reaksi keras Presiden Irak Saddam Hussein terhadap arogansi Washington yang dengan memanfaatkan PBB terus berusaha “menelanjangi” Baghdad. Reaksi Saddam diwujudkan dalam bentuk penolakan tegas Baghdad

³⁷ Afrika Selatan karena politik *apartheid*-nya; Taiwan karena sengketa dengan RRC yang memiliki lobi internasional lebih kuat. Lihat juga, Sihbudi, “Embargo and Lesson from History,” *The Jakarta Post* (30 September 2000), dalam Riza Sihbudi, *Menyandera Timur Tengah*, Jakarta, Mizan, hal 139

terhadap keterlibatan para anggota CIA (dinas intelijen AS) dalam komisi khusus PBB (UNSCOM, *United Nations Speial Commission*) untuk melucuti senjata Irak. Clinton yang sebelumnya begitu optimis akan mampu menggalang dukungan dari negara-negara Arab “moderat” guna menggulingkan kekuasaan Saddam Hussein, ternyata justru harus “menanggung malu” karena tidak tidak satu negara Arab pun yang bersedia mendukung kebijakan Clinton terhadap Baghdad.

Seperti yang telah diketahui bahwa, para pengambil kebijakan luar negeri AS didominasi oleh mereka yang menganut doktrin “*Israel First*,” yaitu sebuah doktrin yang menyebutkan bahwa setiap kebijakan luar negeri AS di Timur Tengah, harus selalu menguntungkan pihak Israel. Oleh sebab itu AS akan terus berusaha mencegah munculnya negara-negara lain di Timur Tengah yang dicurigai mampu membangun kekuasaan militernya sehingga mendekati, apalagi melebihi, kekuatan militer yang dimiliki Israel. Dan, dua negara Timur Tengah yang selalu dicurigai Clinton itu, tidak lain, adalah Irak dan Iran.

Krisis Irak-AS pada era Clinton, mulai muncul kepermukaan sejak akhir Oktober 1997. Artinya, tidak lebih dari sebulan sejak terjadinya ketegangan Iran dan AS. Oleh karena itu, Baghdad mungkin “memanfaatkan” ketegangan Iran-AS yang berlangsung sejak awal Oktober 1997. ketika konflik Irak-AS semakin eksplosif, Iran memang tidak secara terang-terangan berpihak kepada kubu Baghdad. Namun, Teheran jelas menentang keras pengarahannya kekuatan militer AS secara besar-besaran. Bagi Saddam, sikap Teheran ini sudah dianggap sebagai suatu “kemenangan politis” di pihak Baghdad. Saddam menyadari bahwa selama ini AS selalu menjalankan kebijakan yang memusuhi Iran (sebagaimana tercermin dari diberlakukannya ILSA). Karenanya, Saddam waktu itu merasa yakin negeri

kaum mullah itu sangat kecil kemungkinannya untuk mendukung aksi militer AS terhadap Irak.³⁸

B. Kepemimpinan George Walker Bush

Pemilihan presiden AS 4 November 2000 dimenangkan secara kontroversial oleh George Walker Bush, yang tidak lain dari anak George Bush (presiden AS 1988-1992). Sejak pertama kali menginjak kakinya di Gedung Putih sebagai seorang presiden pada 1 Januari 2001, Bush sudah bertekad menyerbu Irak dan menggulingkan Saddam Hussein. Bush menyimpan dendam kesumat pada Saddam, lantaran sang bapak (Bush senior) gagal menggulingkan Saddam, dan Bush senior pun bahkan gagal terpilih kembali dalam Pemilu AS tahun 1992. Bush junior menganggap Saddam telah mempermalukan Bush senior, juga karena ada lantai sebuah hotel termewah di Baghdad bergambar wajah Bush senior dengan sendirinya setiap hari diinjak-injak oleh kaki para tamu hotel itu. Bush sejak awal menyebut dirinya sebagai “seorang presiden perang.”

Oleh sebab itu setelah pada Oktober 2001 meluluhlantakkan Afghanistan, Bush berencana melancarkan agresi terhadap rakyat dan negara Irak tanpa dikutuk apalagi di cegah oleh PBB. Bush yang didukung sepenuhnya oleh Inggris, Australia dan Spanyol sama sekali tidak menghiraukan kecaman dan keberatan dari berbagai negara yang antiperang. Sejak awal Bush memang tidak mempunyai opsi lain selain mengumandangkan gendang perang. AS bahkan tidak perlu menunggu hasil sidang DK PBB yang semula hendak memperdebatkan rancangan resolusi kedua yang mereka buat bersama Inggris, Prancis dan Rusia

³⁸ Ibid, 143

yang memiliki hak veto di DK PBB sudah dipastikan akan menjegal rancangan resolusi yang memberikan wewenang penggunaan kekuatan militer terhadap Irak itu.

AS akan melancarkan agresinya bersama para sekutunya. Bagaimanapun kekuatan militer Irak tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan militer para agresor (AS). Apalagi sebelum diduduki, Irak terlebih dahulu dilucuti oleh PBB. Skenario AS pun sejak awal sudah diketahui, yaitu membentuk pemerintahan boneka di Irak. Tujuan utamanya, menguasai ladang minyak Irak. Komoditas minyak memang belum bisa digantikan oleh energi lain untuk kebutuhan industri. Jadi, penguasaan minyak sangat strategis buat AS. Apalagi, cadangan minyak di Irak merupakan yang terbesar setelah Arab Saudi. Di samping itu Bush sendiri seorang pengusaha minyak.

Dengan menguasai Irak, AS juga mendapatkan pijakan baru di kawasan Teluk Parsi, karena setelah Revolusi Islam di Iran (1979), AS kehilangan basis utamanya di kawasan ini. Bush dan para anteknya menjadikan para pembelot Irak untuk berkuasa di Baghdad menggantikan rezim Saddam Hussein, kendati kekuatan kelompok oposisi di Irak di luar suku Kurdi dan kaum Muslim Syiah sebenarnya tidak begitu kuat. Mereka bahkan cenderung terpecah-pecah, karena tidak adanya figur yang mampu menjadi tokoh pemersatu gerakan anti-Saddam.³⁹

³⁹ Ibid, 144

Paling tidak, ada enam faktor yang memotivasi Bush di balik ambisi perangnya.⁴⁰ *Pertama*, Bush menggunakan isu “perang Irak” untuk menutupi berbagai ketidakberhasilannya dalam mengatasi persoalan sosial-ekonomi di dalam negerinya sendiri. Ini misalnya terlihat dari salah satu slogan yang diusung para penggiat anti perang Irak di Washington DC pada saat itu, yaitu “*Money for Jobs, Not for War*” (gunakan uang negara untuk menciptakan lapangan kerja, bukan untuk membiayai perang).

Kedua, keinginan Bush untuk melampiaskan dendam keluarganya terhadap Saddam. Bush tidak pernah menyembunyikan kemurkaannya pada Saddam Hussein yang dituduh pernah berupaya membunuh ayahnya, Bush senior. Ketika membombardir Irak pada 1990-1991, Bush senior memang berhasil mengusir pasukan Irak dari Kuwait, namun ia gagal menggulingkan kekuasaan Saddam. Ironisnya, justru ia sendiri yang kemudian “terguling” dari kekuasaan karena dikalahkan oleh Bill Clinton dalam pemilihan presiden AS tahun 1992. Kegagalan sang bapak itulah yang kemudian hari hendak di tebus oleh sang anak.

Ketiga, Bush ingin menutupi kegagalannya dalam memburu Osama bin Laden dan Mullah Umar di Afghanistan. Sekalipun ia sukses meluluhlantakkan Afghanistan dengan mengorbankan ribuan nyawa warga sipil negeri ini namun Bush gagal total dalam mengejar target utamanya, yaitu menangkap (hidup atau mati) pemimpin Al-Qaidah, Osama bin Laden, yang di tuding sebagai pelaku utama serangan yang sangat fenomenal terhadap WTC dan Pentagon pada 11

⁴⁰ Lihat juga, Tim ISMES, *Saddam Melawan Amerika* (Jakarta: Pensil 324, 2003), hlm. 33-34, dalam Riza Sihbudi, *Menyandera Timur Tengah*, Jakarta, Mizan, hal 149

September 2001, serta pemimpin Taliban, Mullah Umar, yang menjadi sekutu utama Osama.

Keempat, terinspirasi oleh keberhasilannya dalam menghancurkan rezim Taliban dan menciptakan rezim boneka di Afghanistan, Bush berusaha melakukan hal yang sama di Irak. Oleh sebab itu setelah menggulingkan Taliban, obsesi Bush berikutnya adalah menggulingkan Saddam Hussein dan mendirikan rezim boneka di Irak yang dapat didikte oleh Washington. Tujuannya, tidak lain, untuk menguasai minyak Irak. Seperti di ketahui, Irak menjadi salah satu negara yang memiliki cadangan minyak terbesar di dunia. Menguasai minyak di Irak sangat berarti baik bagi AS maupun Bush pribadi, yang keluarganya memiliki bisnis minyak. Saddam yang dimasa lalu, di pertahankan oleh AS untuk di jadikan sebagai “monster” bagi negara-negara kaya minyak di kawasan Teluk Parsi agar mereka selalu berlindung di bawah payung AS, di anggap sudah tidak memiliki arti strategis lagi bagi Bush.

Kelima, seperti dalam kasus kampanye antiterorisme yang dikembangkan AS pascatragedi 11 September 2001, dalam kasus Irak pun tampak jelas kuatnya pengaruh faksi garis keras di kalangan elite politik Gedung Putih. Mereka, yang di motori Wapres Dick Cheney, Menhan Donald Rumsfeld, Deputi Menhan Paul Wolfowitz, serta penasehat Keamanan Nasional (NSC) Condoleezza Rice, memang di kenal sebagai kelompok “neokonservatif” yang selalu mengedepankan pendekatan pragmatis dan sangat militeristis. Yang ada di benak mereka hanya perang dan perang. Sementara persoalan HAM dan demokrasi justru dikesampingkan. Tidak mengherankan, jika seorang Nelson Mandela (mantan

Presiden Afrika Selatan) menuduh AS di bawah Bush sebagai negara yang sama sekali tidak memiliki sopan santun dalam pergaulan internasional.

Keenam, selain berwatak militeristis, mereka juga dikenal sangat pro-Israel. Oleh karena itu, ambisi Bush untuk melucuti senjata Irak juga dimaksudkan untuk mengeliminasi ancaman militer Arab terhadap Israel. Irak adalah satu-satunya negara Arab yang pernah “mengirim” rudal Scud ke Israel sewaktu berlangsung Perang Teluk 1991. Memang ini sudah menjadi kebijakan dasar AS yang tidak akan membiarkan negara Arab mana pun memiliki kekuatan militer yang menyamai, apalagi melebihi, kekuatan militer Israel. Di sisi lain, dengan mengobarkan perang terhadap Irak, Bush dan para pendukungnya terhadap dunia Internasional akan mengalihkan perhatian dari kekejaman dan kebiadapan yang terus menerus dilakukan rezim Israel di bawah Ariel Sharon terhadap warga sipil Palestina.⁴¹

Memang pada dasarnya AS benar-benar menginginkan penguasaan sepenuhnya terhadap Irak, terutama dengan adanya sumber minyak yang melimpah yang dimiliki Irak. Secara jelas bahwa Bush sendiri telah menyembunyikan niat jahat yang sebenarnya, yaitu menguasai sumber minyak untuk kepentingan AS sendiri maupun untuk kepentingan Israel. Bahkan ada kemungkinan pula akan adanya kepentingan individu yang dilakukan Bush sebagai salah satu pembisnis minyak, dimana dia dapat dengan mudah melakukan monopoli pasar dengan mengatur harga minyak. Jelas ada perhitungan-perhitungan ekonomi dan bisnis yang mendasari agresi AS ke Irak.

⁴¹ Ibid, 149-151

1. Perhitungan Ekonomi-Bisnis Bush

Setelah berakhirnya era Perang Dingin yang ditandai dengan runtuhnya komunisme Uni Soviet dan Eropa Timur, Francis Fukuyama menyebut abad ke-21 sebagai era kemenangan gemilang demokrasi dan Liberalisme.⁴² Tapi, barnarisme yang dipertontonkan Bush dan para sekutunya terhadap rakyat Irak, tampaknya telah memporak-porandakan tesis Fukuyama.

Bush jelas menyembunyikan niat jahat yang sebenarnya, yaitu menguasai sumber-sumber minyak milik Irak, baik untuk kepentingan AS sendiri maupun untuk kepentingan Israel. Berbagai dalih yang dipakainya untuk menyerang Irak dengan mudah dapat dipatahkan. Oleh sebab itu, Irak jelas bukan target akhir dan satu-satunya dari Bush dan para anteknya. Setelah Irak, target berikutnya adalah Iran, Suriah, Libya dan Arab Saudi. Keberhasilan “Proyek” Irak akan mendorong Bush yang dikendalikan kaum Zionis internasional untuk menjalankan “proyek” berikutnya. Dengan demikian, sangat sulit mempercayai begitu saja argumen-argumen tentang kepemilikan senjata pemusnah massal Irak, keterkaitan Saddam dengan jaringan “terorisme” internasional, dan sikap represif Saddam yang dipakai Bush untuk melancarkan agresinya di Irak. Jelas perhitungan-perhitungan ekonomi dan bisnis yang mendasari agresi AS ke Irak.⁴³

Pertama, Irak adalah sebuah negara yang memiliki cadangan minyak kedua terbesar di dunia setelah Arab Saudi. Oleh Centre for Global Energy Studies (CGES) London, Irak diperkirakan memiliki 112 milyar barrel cadangan minyak. Bahkan cadangan minyak diperkirakan lebih tinggi dari angka itu, karena

⁴² Francis Fukuyama, *The End of History and The Last Man* (New York: The Five Press, 1992), dalam Reza Sihbudi, *Menyandera imur Tengah*, Jakarta, Mizan, hal 153

⁴³ Reza Sihbudi, *Menyandera Timur Tengah*, Jakarta, Mizan, hal 153

sumber minyak di kawasan Gurun Pasir Barat yang belum dieksploitasi, misalnya, kemungkinan masih bisa menghasilkan sumber minyak tambahan. Dengan memiliki cadangan minyak 112 milyar barrel, Irak merupakan pemilik 11 persen cadangan minyak dunia yang belum sepenuhnya terjamah. Irak memiliki sekitar 2.000 ladang minyak yang menghasilkan sekitar 2,5 juta barrel minyak/hari dari 15 deposit utama minyak di sebelah utara, selatan, dan timur Irak. Kapasitas sebenarnya ladang-ladang minyak itu diperkirakan dapat mencapai 2,8 juta barrel/hari.

Irak juga mempunyai 12 pabrik penyulingan minyak dengan total kapasitas 677.000 barrel/hari, terbesar ada di daerah selatan dan utara. Masing-masing kilang itu memiliki kapasitas 170.000 dan 150.000 barrel/hari. Sebelum perang teluk 1991, Irak mengekspor minyak melalui empat pipa ke Turki, Suriah, Arab Saudi dan dua pelabuhan di Teluk Parsi antara lain di Min-Al-Bakr yang dapat melayani *supertankers* dan mengapalkan hingga 1,3 juta barrel/hari. Sumber daya minyak Irak diperkirakan dapat memenuhi kebutuhan impor minyak AS selama hampir satu abad. Kesimpulannya, posisi Timur Tengah (termasuk Irak), masih cukup signifikan dalam pasokan minyak dunia.

Kedua, minyak dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi dunia jika harganya tidak stabil, terutama jika harga minyak naik secara tajam. Hal itu menyebabkan nilai impor meningkat, biaya produksi meningkat, yang akhirnya akan menurunkan produktivitas. Produktivitas ekonomi yang anjlok, akan merosotkan perekonomian, dan menghambat pertumbuhan kesempatan kerja. Pertumbuhan ekonomi tentu penting bagi AS. Irak memiliki potensi memainkan harga minyak dunia karena persediannya yang melimpah. Bila harga minyak tiba-

tiba merosot US\$10 saja, AS diperkirakan akan kehilangan pemasukan pajak sebesar US\$100 milyar. Oleh karena itu, AS merasa khawatir terhadap kestabilan harga dan pasokan minyak dunia. Misalnya, jika rezim Saddam Hussein mendadak menghancurkan fasilitas minyak di Irak, dan kemudian Kuwait, Iran dan Arab Saudi. Pada perang teluk 1991, Irak menghancurkan infrastrukturperminyakan Kuwait. Kekawatiran lain adalah, adanya potensi pengurangan produksi minyak di Teluk. Itu pernah terjadi melalui aksi embargo AS dan negara-negara barat lainnya yang mendukung Israel, ketika menjadi perang Arab-Israel 1973.

AS sangat khawatir, jika kontrol produksi minyak jatuh ketangan pihak yang anti-Barat,--pengulingan Saddam di Irak dianggap akan mampu menghentikan permasalahan minyak dunia dengan meningkatkan pasokan. Selama ini produksi minyak Irak telah terganggu karena terbatasnya investasi dan faktor politik di negeri ini. Perubahan rezim di Irak, di harapkan dapat menambah pasokan minyak dunia sebesar 3-5 juta barrel/hari.

Ketiga, pada 17 September 2002, Gedung Putih, dengan titipan pesan dari Bush, mengeluarkan dokumen 30 halaman berjudul *The National Security Strategy of The United States*. Gambaran umum dari dokumen itu adalah, tentang strategi kebijakan nasional AS didasarkan pada keunikan internasionalisasi AS yang merefleksikan kesatuan nilai-nilai dan kepentingan nasional mereka. Tujuan dari strategi itu adalah membentuk dunia yang --tentu saja menurut persepsi AS-- tidak saja “lebih aman,” tetapi juga “lebih baik.” Tujuannya adalah, “kebebasan” ekonomi dan politik, hubungan “serasi” dengan Negara-negara lain, dan “penghargaan” pada nilai-nilai kemanusiaan. Untuk mencapai tujuan itu, AS akan

meningkatkan aspirasi soal nilai-nilai kemanusiaan; memperkuat aliansi untuk membasmi “terorisme” dan bekerja untuk menghindari serangan pada AS dan sekutunya; bekerja dengan pihak lain untuk “menghindari” konflik regional; mencegah ancaman musuh terhadap AS dan sekutunya dengan senjata pemusnah massal; menciptakan era baru untuk pertumbuhan ekonomi global lewat pasar bebas dan perdagangan bebas; meningkatkan siklus pembangunan dengan membuka komunitas dan membangun sarana demokrasi; menciptakan agenda untuk aksi kerja sama dengan pusat-pusat kekuatan global; serta mentransformasikan lembaga keamanan nasional AS untuk menghadapi tantangan dan kesempatan abad 21. Namun, dalam praktiknya, penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan diabaikan oleh AS demi perhitungan ekonomi dan bisnis, sebagaimana terlihat dari agresi ke Irak.

Sejak 1998 Chevron Texas (salah satu perusahaan minyak terbesar di AS) sudah mengincar minyak Irak. Dan, sejak 2002, AS kekurangan pasokan minyak 1,5 juta barel/hari akibat krisis politik di Nigeria dan Venezuela. Sejak Perang Teluk 1991, perusahaan-perusahaan AS benar-benar vakum dari bisnis minyak di Irak. Produksi minyak di Irak termasuk terendah di dunia. Namun, hal itu juga sekaligus membuatnya sangat menarik bagi investor asing. Menurut US Energy Information Administration, hanya 15 dari 73 ladang minyak yang telah dikembangkan sebagai akibat Perang Teluk 1991 dan sanksi PBB. Pada awal April 2003, ada pertemuan antara para eksekutif perusahaan minyak AS dengan Dick Cheney dan para pejabat Deplu AS. Topik yang dibahas; “kepentingan menata industry minyak Irak pasca-Saddam.” Saat itu kubu garis keras yang

dimotori Cheney dan Rumsfeld menghendaki kontrol penuh AS atas minyak Irak, yang ditolak kubu (Menlu AS) Collin Powell.

Keempat, konflik internasional selalu melahirkan tragedi kemanusiaan, yaitu situasi di mana setidaknya ribuan warga sipil menderita kelaparan atau mati tanpa bantuan internasional. Pada 1991 PBB menemukan kondisi itu di 23 negara. Akibat situasi itu PBB harus menanggung beban besar, baik beban kemanusiaan maupun biaya material. Sebagai contoh, lebih dari US\$4 milyar yang telah dikeluarkan PBB untuk melaksanakan misinya di Kamboja dan Somalia serta US\$5 juta/hari di Yugoslavia untuk keperluan *peacekeeping operation* oleh NATO. Dalam kasus agresi ke Irak, AS diperkirakan telah menganggarkan dana US\$60-95 milyar. Dana itu selain digunakan untuk operasi militer, juga untuk rehabilitasi fisik dan kemanusiaan Irak pascaperang.

Kelima, setia berakhirnya sebuah peperangan, pasti disusul dengan tahap rekonstruksi atau pembangunan kembali infrastruktur yang hancur. Pada 1991, ketika Kuwait dibebaskan pasukan Sekutu yang dipimpin AS dari belenggu aneksasi Irak, negara Arab kaya tersebut harus mengeluarkan dana rekonstruksi sampai US\$200 milyar. Proyek sebanyak itu jatuh ke kontraktor-kontraktor AS, yang kemudian membaginya kepada negara-negara lain sekutu “proyek” perang tersebut. Jika kasus Kuwait bisa dijadikan sebagai bahan perbandingan, maka biaya rekonstruksi Irak pascaagresi AS diperkirakan mencapai US\$200 milyar. Jumlah ini jelas sangat signifikan bagi AS, setidaknya sebanding dengan ongkos yang telah dikeluarkan untuk agresinya ke Irak. Artinya, pendarahan (*bleeding*) pada anggaran defisit AS dapat dihentikan. Sebelum melancarkan agresi ke Irak, defisit anggaran AS pada 2003 diperkirakan mencapai US\$300 milyar yang

merupakan rekor terburuk selama ini. Begitu melancarkan agresi, proyeksi defisit diduga melonjak menjadi US\$400 milyar. Dengan berakhirnya agresi, *bleeding* anggaran dapat dihentikan dan keadaan yang lebih buruk bagi perekonomian AS dapat dihindari.

Keenam, pada 5 April 2003, tokoh-tokoh Irak di pengasingan dan sejumlah pejabat senior AS melakukan pertemuan di London. Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan bahwa perusahaan-perusahaan minyak internasional akan diberikan peran utama untuk menghidupkan kembali industri perminyakan Irak di masa pascaagresi. Pemerintah Bush juga mendapatkan persetujuan Kongres AS untuk biaya awal rekonstruksi di Irak sebesar US\$2,45 milyar. Anak perusahaan Halliburton (terkait dengan Dick Cheney) bernama Kellogg, Brown, dan Root (KBR), tanpa tender sudah memenangkan kontrak pemadaman api di ladang-ladang minyak Irak yang terbakar selama invasi. Perusahaan AS lainnya bernama Bechtel Group (terkait dengan pemerintahan Ronald Reagan dan mantan Menlu AS George Shultz serta mantan Menhan AS Caspar Weinberger), Fluor Corp (di perusahaan ini Philip Carroll berperan sebagai Chief Executive Officer), Parsons Corp, Louis Berger Group, dan Washington Group International. Semua perusahaan –yang pernah menyumbang dana kampanye politik Bush-Cheney sebesar US\$3,5 juta—telah memenangkan sebagian besar kontrak bisnis di Irak.

2. Propaganda AS

Rencananya, setelah berakhirnya perang dan tertangkapnya Saddam Hussein, AS pun segera mengumumkan akan mengajukan Saddam ke mahkamah internasional. Memang, mantan diktator Irak ini layak diajukan ke mahkamah

internasional lantaran dua “kejahatan perang” yang dilakukannya, yaitu *pertama*, ketika secara sepihak ia membatalkan “Perjanjian Aljier” 1975 dan kemudian melancarkan serangan besar-besaran ke Iran pada September 1980. Padahal Saddam (waktu itu dalam kapasitas sebagai Wakil Presiden Irak) sendirilah yang menandatangani perjanjian perdamaian Irak-Iran itu, bersama mantan diktator Kerajaan Iran, Syah Mohammad Reza Pahlevi. Waktu itu Saddam mengira Iran yang baru saja dilanda revolusi Islam pimpinan Imam Ayatullah Khomeini akan dengan mudah dikalahkannya. Namun, perang ternyata berjalan seimbang dan memakan waktu sekitar delapan tahun dengan ratusan ribu korban tewas di kedua pihak.

Kedua, sepuluh tahun kemudian, pada Agustus 1990, giliran Kuwait yang diserang tentara Saddam dan diklaim sebagai “provinsi Irak yang ke-19.” Lagi-lagi Saddam melakukan miscalculasi. Kendati kecil, Kuwait justru dibela oleh mayoritas negara-negara Arab dan kekuatan koalisi Sekutu pimpinan AS. Saddam tampaknya melupakan sumbangan yang diberikan Kuwait –dan Negara-negara monarki minyak Arab lainnya—kepada Irak selama berkobar perang Iran-Irak (1980-1988).

Saddam tergiur menyerbu Kuwait karena beberapa hari sebelumnya mendapat jaminan dari pemerintah AS, melalui duta besarnya di Irak waktu itu, April Glaspie, bahwa Washington tidak akan ikut campur tangan dalam konflik Irak-Kuwait. Begitu pula sewaktu menyerbu Iran, di mana Saddam mendapat dukungan penuh dari AS yang tidak ingin melihat menjalarnya pengaruh revolusi Islam Iran ke negara-negara monarki Arab sekutu AS. Pada masa perang Iran-Irak, AS (bersama negara-negara Barat lainnya) menjadi pemasok senjata utama

bagi Saddam. Karenanya, AS sebenarnya ikut bertanggung jawab terhadap pembangunan militer Irak di bawah Saddam, dengan sendirinya termasuk senjata pemusnah massalnya.

Dengan kata lain, AS sebenarnya terkait dengan dua kejahatan perang yang dilakukan Saddam Hussein semasa berkuasa. Oleh sebab itulah, sangat masuk akal pandangan bahwa selain Saddam, George Bush senior pun harus ikut diseret ke mahkamah internasional. Bush junior juga layak diajukan ke mahkamah internasional, karena melancarkan invasi dan menduduki negara Irak secara ilegal.

Apalagi jika dakwaan terhadap Saddam meliputi juga pelanggaran HAM serta tindak kejahatan terorisme yang dilakukannya. Bush pun pada prinsipnya melakukan hal yang sama. Berapa ribu warga sipil yang menjadi korban keganasan mesin perang Bush di Irak maupun di Afghanistan? Selama ini Saddam memang tidak bisa dipungkiri telah memerintah bangsa dan negaranya dengan tangan besi. Ia tak akan segan-segan menyiksa dan menghukum mati para lawan politiknya atau siapa pun yang menolak kebijakannya. Namun, apa yang dilakukan Bush pun sebenarnya sama dengan yang dilakukan Saddam. AS di bawah Bush tidak hanya membunuh ribuan warga sipil Irak dan Afghanistan, melainkan juga menyengsarakan jutaan rakyat di kedua negara itu. AS di bawah Bush telah menghancurkan infrastruktur sosial dan ekonomi Irak dan Afghanistan. Lalu, dengan rasa percaya diri yang tinggi, Bush justru meminta dunia internasional untuk ikut menanggung beban pembangunan kembali Irak dan Afghanistan yang telah dihancurkan AS. Di sisi lain, Bush merasa memiliki hak sepenuhnya untuk memonopoli minyak Irak.

Ironisnya, semua itu dilakukan Bush atas nama “perang melawan terorisme” dan “menegakkan demokrasi” serta “menciptakan perdamaian dunia.” Tampaknya benar, jika cendekiawan Muslim moderat sekelas Nurcholish Madjid pun menjuluki Bush sebagai seorang pembohong besar. Namun, di AS sendiri berbagai kebohongan Bush mulai diungkapkan secara besar-besaran. Bahkan salah satu buku yang menjadi *bestseller* pada akhir 2003 adalah karya David Corn yang berjudul *The Lies of George W. Bush: Mastering The Politics of Deception*, yang membongkar kebohongan-kebohongan Bush sejak sebelum menjadi Presiden hingga pada saat Ia memutuskan untuk melancarkan invasi ke Irak. Dalam buku ini, Corn antara lain menulis:

“George W. Bush is a liar. He has lied large and small. He has lied directly and by omission. He has misstated facts, knowingly or not. He has misled. He has broken promises, been unfaithful to political vows.... A liar in the white House is not a remarkable development. Most presidents lie, many brazenly and with impunity. Only a few have had to pay a political cost for their dissimulations... All presidents ought to be truth-tested. But George W. Bush has invited more than routine scrutiny...”

Dan, Bush kembali menunjukkan kepiawaiannya sebagai “*the big liar*”, ketika mengatakan bahwa tertangkapnya Saddam Hussein berarti “kebebasan” bagi rakyat Irak. Padahal yang terjadi sesungguhnya rakyat Irak ibarat baru keluar dari kandang singa tapi masuk ke kandang buaya. Rakyat Irak memang baru terbebas dari cengkeraman rezim tirani Saddam, tapi mereka kemudian justru berada di bawah cengkeraman tirani kelas dunia di bawah Bush.

Seiring dengan menguatnya Perang Dingin, Amerika Serikat (AS) melibatkan bahaya ekspansionisme politik Uni Soviet di Timur Tengah sehingga merasa perlu secepatnya meletakkan dasar-dasar kebijakannya di Timur

Tengah untuk menangkal ekspansionisme Sovyet dan menyelamatkan kepentingan vitalnya.⁴⁴

Timur Tengah mempunyai arti vital dan strategis bagi AS sebagaimana nampak dari pidato mantan Presiden Gerald di san Francisco pada bulan Oktober 1975 :

“ American concern for the Middle East is not a matter of choice’ it is a matter of vital necessity. It is a strategic part of the world and source of significant and growing portion of our energy resources and those of Western Europe and Japan”.

Presiden AS Jimmy Carter lewat Doctrin Carter menegaskan bahwa *“Persia Gulf an are of” vital interest “to United State, Which world, if necessary, be defended militarly”* Strategi suatu negara ditentukan sepenuhnya oleh kepentingan nasionalnya. Di Timur Tengah kepentingan nasional AS pada pokoknya berkisar pada hal-hal sebagai berikut :

1. megusahakan agar sumber-sumber alam Timur Tengah tidak jatuh ketangan musuh;
2. menjamin tersalurnya sumber-sumber alam yang penting bagi industri dan militer AS dan sekutu-sekutunya;
3. memelihara kontinuitas mengalirnya keuntungan investasi dan usaha-usaha komersial AS;
4. menjaga kredibilitas dengan jalan memenuhi komitmen AS di Timur Tengah;
5. meneruskan hak transit dan “overflight” bagipesawat udara dan kapal laut;

⁴⁴ Sidik Jatmika, *AS Penghambat Demokrasi”membongkar politik standar ganda amerika serikat”*, Yogyakarta : BIGRAF Publishing, 2000, hal 137

6. menjaga eksistensi penguasa-penguasa Timur Tengah yang menjadi sekutu AS;
7. mempertahankan diri dari ancaman komunis (di masa perang dingin) dan kekuatan-kekuatan revolusioner atau fundamentalisme islam yang dapat membahayakan dominasi pengaruh AS dan persekutuan Barat di kawasan Timur Tengah.

Mudah dipahami jika AS melihat Timur Tengah sebagai kawasan penting dan khusus, oleh karena kepentingan AS di Teluk Persia, Samudra India dan Afrika banyak ditentukan oleh kekuatan posisinya di Timur Tengah.⁴⁵

Tiga negara Korea Utara, Iran, dan Irak membentuk “poros setan”, sesumbar Bush. “saya tidak akan duduk menunggu sementara bahaya kian membesar. Saya tidak akan diam saja sementara ancaman bergerak semakin dekat. Amerika Serikat tidak akan mebiarkan rezim-rezim paling berbahaya mengancam kami dengan senjata pemusnah missal,” ucapnya yang disambut dengan tepuk tangan meriah. Pidato itu adalah pertanda pertama bahwa sejak saat itu Amerika akan “berinisiatif”: menggempur negara lain sebelum mereka memiliki kesempatan untuk menyerang. Pemerintah memformalkan doktrin tindakan inisiatif itu dalam pidato Bush ketika melantik kadet West Point, cikal bakal militer terbaik negara ini.

Keputusan baru yang agresif ini adalah buah pemikiran pemerintahan Bush pasca peristiwa 11/9. Presiden dan timnya percaya bahwa ancaman terbesar AS adalah kombinasi antara Al Qaeda dan senjata pemusnah massal. Alasannya banyak. Diantara ketiganya, Irak adalah target paling mudah. Sedangkan baik

⁴⁵ Ibid

dengan Iran maupun Korea Utara, AS menghadapi masalah strategi yang sulit. Korea Utara berada dalam kisaran artileri ibu kota Korea Selatan, Seoul. Iran memiliki banyak populasi dan dukungan dari negara-negara Eropayang menjadi sekutu AS. Di pihak lain, Saddam Hussein sudah menjadi target kutukan internasional. Memang, setelah Perang Teluk pertama, AS telah menjatuhkan sanksi kepada Irak yang mengecilkan kekuatan militer dan politiknya. Saddam itu lemah, tidak mempunyai teman, dan berbahaya.⁴⁶

Doktrin Bush, itulah landasan resmi strategi kemanan nasional Pemerintahan Amerika Serikat (AS) sekarang. Tetapi, itu pula yang melahirkan kegelisahan bangsa-bangsa di Dunia Ketiga. Sebab, hakekat doktrin ini “mendahului perang , sebelum musuh melaksanakan ancamannya”. Ancaman diletakkan dalam konteks senjata pemusnah missal, seperti senjata biologis, kimia, dan nuklir. Tanpa perlu dijelaskan, semua orang tahu dampak penggunaan senjata tersebut. Dalam pidatonya di West Point, juni 2002, Presiden AS George Bush mengatakan, perang melawan terorisme tidak akan dimenangkan dengan cara defensive. AS harus menghadapi langsung ancaman itu dengan memindahkan pertempuran dikandang musuh dan menghancurkan rencana jahat mereka.⁴⁷

C. Kejahatan Politik dan Kemanusiaan AS

Apa sesungguhnya yang menjadi alasan AS menggempur Irak. Sejumlah dokumen mengungkapkan bahwa niat dan tekad untuk menyingkirkan Saddam Hussein dari puncak kekuatan di Irak sudah lama menjadi cita-cita atau impian

⁴⁶ T Christian Miller, *Blood Money*, UFUK, Jakarta, hal 13

⁴⁷ Budiarto Shambazy, *Obrak-Abrik Irak*, Kompas, Jakarta, hal 1

para pemimpin AS. Beberapa tahun sebelum George W Bush masuk gedung putih atau menjadi presiden AS, beberapa tahun sebelum tragedi 11 September 2001, sekelompok kaum neokonservatif yang berpengaruh menyusun sebuah rencana untuk menyingkirkan Saddam Hussein. Kelompok itu tergabung dalam apa yang diberi nama “*Project for the New American Century*” (PNAC) dan didirikan tahun 1997.

Menurut laporan PNAC September 2000, berjudul *Rebuilding America's Defense: Strategy, Force, and Resources for a New Century*, PNAC adalah sebuah proyek nonprofit, organisasi pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kepemimpinan global AS. Tahun 1998, PNAC mengirimkan surat kepada Presiden Bill Clinton, Senator Trent Lott (Ketua Mayoritas Senat), dan Newt Gingrich (Ketua Kongres). Dalam surat itu mereka mendesak agar Amerika Serikat bersikap lebih tegas terhadap Irak.⁴⁸

Seperti yang diketahui bahwa Amerika Serikat sering kali menjadi kan musuhnya kewalahan atau kebingungan karena ditekan oleh beberapa sekutu AS juga, sudah menjadi semacam “tradisi” di AS, bahwa “musuh bersama” senantiasa diperlukan guna mengangkat popularitas seorang presiden. Masih segar dalam ingatan, bagaimana dua pendahulu Clinton: Ronald Reagan dan George Bush (senior), menjadikan Libya dan Irak sebagai “musuh bersama” AS. Reagan memang berhasil, tetapi sebaliknya dengan Bush senior. Clinton pun berusaha mengikuti jejak pendahulunya. Bedanya Clinton merasa “kurang cukup” hanya menjadikan Irak dan Libya sebagai “musuh bersama.” Maka ia pun perlu memasukan satu negara lagi: Iran. Dari sudut sasaran ekstern, Clinton tampaknya

⁴⁸ Trias Kuncahyono, *Irak Korban Ambisi Kaum Hawkish*, Kompas, Jakarta, hal 2

melakukan *test case* terhadap kepemimpinannya di dunia internasional. Sayangnya ajakan Clinton untuk mengembargo Iran justru kurang disetujui para sekutunya, terutama dikalangan negara-negara Uni Eropa. Bahkan Rusia pun menolak untuk didikte begitu saja oleh Clinton.⁴⁹

Tidak dipungkiri perang Irak adalah untuk kepentingan Israel. Langkah koordinasi Amerika-Israel ini membenarkan dugaan bahwa perang Irak ini bukanlah untuk membebaskan rakyat Irak dari penindasan, tetapi untuk meluaskan daerah jajahan Israel. Ini juga berarti bahwa Irak bukanlah satu-satunya. Ada negara lain yang menjadi target berikutnya untuk kepentingan zionisme internasional. "Irak itu cuma permulaan," begitu kutipan New York Times. Ini bukan isapan jempol belaka.⁵⁰

Menurut doktrin *Israel First* dasar utama dari kebijakan AS di Timur Tengah adalah mendukung dan melindungi kepentingan Israel. Karenanya, tidak akan pernah sekalipun seorang presiden AS yang "berani" meninggalkan Israel.⁵¹ Itu sebabnya, mengapa Clinton kemudian menjatuhkan vetonya terhadap rancangan resolusi DK PBB yang mengecam Israel yang juga tentu saja demi meraih dukungan dan simpati yang lebih luas dari kalangan Yahudi AS. Dan, meningkatkan dukungan dari kalangan Lobi Yahudi AS, khususnya yang tergabung dalam AIPAC (*American-Israeli Public Affairs Committee*), tentu sangat diperlukan.⁵² Sebenarnya sangat sulit untuk menggambarkan dengan kata-

⁴⁹ Riza Sihbudi, *Menyandera Timur Tengah*, Mizan, Jakarta, hal 140

⁵⁰ Israel, Amerika dan Coca-cola, <http://forum.dudung.net/index.php?topic=318.0;wap2> diakses pada tanggal 20 Februari 2008

⁵¹ Lihat juga, Sihbudi, "US Government Remains 'Hostage' of Israel," *The Jakarta Post* (17 Oktober 2000). Dalam Reza Sihbudi, *Menyandera Timur Tengah*, Mizan, Jakarta, hal 137

⁵² Ibid

kata perihal kejahatan politik dan kemanusiaan yang dilakukan AS di bawah Bush.

1. Mereka menyerang Irak tanpa payung hukum dari PBB. Suara dari mayoritas warga dunia termasuk dari para tokoh berbagai agama yang menentang perang, sama sekali tak dihiraukan Bush serta para pembantu dan sekutu dekatnya. Dengan bangga Bush bahkan memproklamirkan dirinya sebagai seorang “presiden perang”.
2. Mereka ternyata tidak mampu membuktikan tuduhan tentang keberadaan senjata pemusnah missal Irak dan keterkaitan saddam Hussein dengan jaringan terorisme internasional (dua alasan yang selalu dijadikan dalih Bush untuk menyerang Irak).
3. Pasukan Bush bukan hanya tanpa pandang bulu membunuh dan membuat cacat seumur hidup ribuan warga sipil Irak serta menghancurkan harta benda mereka, melainkan juga menginjak-injak harga diri bangsa Irak seperti terlihat dari terungkapnya kasus pelecehan dan penyiksaan atas tawanan perang Irak di penjara Abu Ghuraib, serta bagaimana pasukan pendudukan AS memperlakukan mantan Presiden Irak Saddam Hussein. Semuanya dilakukan Bush dan anak buahnya tanpa mempedulikan Konvensi Jenewa dan aturan-aturan hukum internasional lainnya.
4. Seperti layaknya politik kaum colonial pada umumnya, Bush pun menjalankan politik adu domba di antara sesama warga Irak. Seorang pensiunan Angkatan Uara AS Letjen Thomas McInerney yang pernah bertugas di Irak mengakui, pasukan pendudukan AS terus mendorong agar orang-orang Irak sendirilah yang akan membunuh Muqtada Al-Sadr. “Let

the Iraqis kill him,” katanya. Rekannya, John Hillen menimpali, “You need to make it Iraqi versus Iraqi. You’ve got to discredit him by his own people and find legitimate sources on our side. Make this as much a Shi’ite-to-Shi’ite issue as opposed to the Americans versus Sadr.

5. Rezim Bush terus-menerus membohongi rakyat Irak (juga warga dunia pada umumnya) dengan menciptakan pemerintahan boneka dan “penyerahan kedaulatan” serta janji masa depan “demokrasi dan kebebasan” yang bakal dinikmati rakyat Irak. Padahal demokrasi jelas tak dapat ditegakkan dengan laras-laras senjata dan darah ribuan warga sipil tak berdosa. Jadi, misi Bush sebenarnya adalah menguras dan merampok sumber minyak Irak.
6. Mereka menghancurkan situs-situs bersejarah Babylonia yang menjadi lambing peradaban dunia ribuan tahun lalu yang tak hanya menjadi kebanggaan bagi bangsa dan rakyat Irak, melainkan juga bagi umat manusia yang beradab dan berilmu di sleuruh dunia. Mungkin benar ketika Futurolog Alvin Toffler mengatakan bahwa Bush sebenarnya tak tahu apa-apa tentang sejarah. Para serdadu Bush dan sekutunya pun terus berupaya menghancurkan tempat yang paling disucikan oleh mayoritas umat beragama di Irak. Semua orang barangkali tahu kalau Sddam itu orang jahat atau bahkan “biadab”, tapi haruskah seluruh rakyat Irak yang menanggung penderitaan karenanya? Tidakkah ada cara-cara yang lebih elegan dan manusiawi untuk melenyapkan dictator seperti Saddam? Kendati perlu dicatat, sejahat-jahanya Saddam, ia masih menghormati peradaban dan tempat-tempat suci.

Bush juga pasti tahu, tak satu pun warga Negara Irak (bahkan Afghanistan, yang sudah lebih dulu diporak-porandakan) yang ikut dalam komplotan teroris pembajak pesawat sipil yang kemudian ditabrakkan ke WTC dan Pentagon pada 9/11. Ironisnya, justru seluruh warga Irak yang seakan-akan harus menanggung dosa para pelaku kejahatan 9/11. Lebih dari itu, politik penghancuran Bush di Irak hanya makin mempersulit upaya membangun dialog antarperadaban dan antarumat beragama di muka bumi ini –yang diupayakan terus-menerus oleh kaum moderat dari berbagai agama dalam rangka mencegah makin meluasnya fenomena radikalisme keagamaan, yang pada ujungnya justru dapat menjadi lading subur bagi berkembang-biaknya terorisme. Padahal pascatragedi 9/11 AS bangsa-bangsa lain sudah bertekad bulat untuk memerangi segala bentuk terorisme.⁵³

Seperti yang telah di tulis pada bab sebelumnya, dimana diketahui Bush gak pernah takut pada siapapun bahkan dengan PBB sekalipun. Dengan berlimpahnya minyak yang terdapat di kawasan Timur Tengah membuat Amerika Serikat memiliki ambisi yang sangat besar untuk menakhlukan salah satu kawasan di Timur Tengah. Irak memiliki apa yang dibutuhkan oleh AS, dimana sebanyak 115 Barel cadangan minyak yang dimiliki Irak membuat AS tergiur untuk menguasainya.

Terlihat jelas dimana AS tidak dapat dipengaruhi oleh Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-bangsa. Yang pertama adalah proposal penggunaan serangan militer untuk melucuti “senjata pemusnah massal” yang dimiliki oleh Irak. Sebuah proposal yang sebenarnya sebatas mencari legitimasi badan internasional tersebut

⁵³ Ibid 391

dan dukungan dari negara-negara imperialis lainnya. Meskipun begitu, dengan ataupun tanpa resolusi Dewan Keamanan, Pemerintahan Bush dan Blair menyatakan akan tetap melakukan serangan.⁵⁴ Kedua proposal sangat jelas mengatakan bahwa terdapat pelanggaran terhadap Resolusi 1441 Dewan Keamanan PBB, yang menyebutkan bahwa Irak harus memusnahkan semua program-program persenjataan nuklir, biologi, dan kimia.

Di dalam bidang perekonomiannya Irak memiliki kendala yang sangat besar, dimana terlihat bahwa, pertanian merupakan bidang yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Meskipun demikian bidang pertanian di Irak masih menghadapi kekurangan modal, kurang semangatnya petani menggunakan peralatan modern dan system penanaman yang kurang efisien. Padahal apabila dimanfaatkan dengan kapasitas penuh pertanian yang ada di Irak akan mampu member makan bagi dua kali jumlah penduduk Irak sekarang. Dengan demikian apabila Irak dikelola secara lebih baik akan menjadikan negara tersebut sebagai salah satu negara yang punya potensi ekonomi seimbang antara pertanian dan industrinya.

Bantuan luar negeri yang dimanfaatkan Irak sebagian besar datang dari Uni Soviet. Bantuan ini terutama digunakan untuk proyek-proyek pertanian seperti misalnya pembangunan irigasi. Kemampuan ekonomi yang meningkat ternyata membuat Irak melakukan program militerisasi yang sangat besar. Dalam beberapa kasus kita dibuat tercengang oleh kegigihan Irak memperoleh persenjataan modern dari Barat non Soviet Khususnya guna pembangunan

⁵⁴ Geopolitik dalam <http://abimanyu.free.fr/index.php/?p=71>, diakses tanggal 19 juli 2007

kemampuan nuklir. Meskipun demikian program militerisasi besar-besaran ini akhirnya telah menghancurkan potensi ekonominya sendiri.

Perang Iran-Irak selama tahun 1980-1988 banyak menguras kemampuan ekonomi Irak dan merupakan salah satu faktor pendorong invasinya ke Kuwait pada bulan Agustus 1990. Sekarang, dengan masih berlakuknya sanksi ekonomi yang dimotori Amerika dengan menggunakan kedok Dewan Keamanan PBB, perekonomian Irak sangat mundur. Inflasi yang sangat tinggi, kelangkaan barang-barang tertentu seperti obat dan makanan bayi, telah menyebabkan rakyat Irak cukup menderita. Menurut laporan intelijen Inggris, Irak telah banyak menjual emas cadangannya ke pasaran internasional guna mengatasi kesulitan ekonomi akibat perbuatan Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya. Solidaritas Arab diperoleh hanya dari Yordania yang banyak membantu upaya mengatasi kesulitan ekonomi. Berkenaan dengan telah di hancurkannya fasilitas-fasilitas nuklir Irak oleh PBB tentunya pencabutan sanksi dan embargo ekonomi akan sangat membantu rakyat Irak dari penderitaan yang paling mendalam.⁵⁵

Embargo yang diterapkan Amerika Serikat dengan menggunakan nama DK-PBB bulan Agustus 1990 ini seakan-akan merupakan hukuman abadi. Apaun yang diminta Irak untuk meringankan dan atau mencabut embargo ini tidak pernah berhasil akibat adanya rekayasa AS yang mendominasi Dewan Keamanan. Di DK-PBB AS didukung pembantu setiannya, Inggris, bersikeras bahwa sanksi ekonomi terhadap Irak belum bias dicabut karena Irak belum memenuhi seluruh resolusi PBB yang ditujukan kepadanya sejak krisis teluk 1990-1991. Artinya, meskipun Irak sudah menghancurkan senjata-senjata pemusnah massalnya dan

⁵⁵ Harwanto Dahlan, Modul Kuliah "*Timur Tengah*", Yogyakarta, hal 68

bersedia menerima komisi pemantau dari PBB seperti yang dituntut Resolusi No. 687 ternyata sanksi bahkan diperpanjang atas rekayasa AS.

Amerika dengan berbagai alasan selalu mempertahankan embargo atas Irak. Yang dituntutkan melalui resolusi 687 berupa keputusan Irak pada hal-hal yang berkaitan dengan persenjataan, dan sudah dipatuhi Irak, ternyata ditambah dengan syarat-syarat imbuhan versi Amerika seperti pengakuan kedaulatan Kuwait, penghentian kekerasan terhadap warga Kurdi dan Shi'ah, penghormatan hak asasi, penghentian aksi terror dan ganti rugi bagi para korban perang. Hal ini tentu saja sangat berlebihan dan sangat mungkin terdapat kepentingan bisnis maupun politis. Kepentingan bisnis itu misalnya, dikaitkannya pelonggaran embargo dengan perundingan perdamaian isyu-isyu hubungan perdagangan preperensial dengan perusahaan-perusahaan AS. Kepentingan politis AS lebih terkait dengan popularitas Presiden Clinton yang terkenal sangat Pro-Israel karena ketika Clinton mengambil sikap keras kepada Irak popularitasnya naik dalam sigi pendapat umum.⁵⁶

D. Pengaruh Perusahaan AS di Irak

Beberapa abad lalu, berbagai sumber alam negara-negara dunia ketiga, telah dirampok dan dirampas oleh para imperialis Eropa dan AS. Kini pun, sebagai pemimpin negara-negara liberalis Barat, AS tengah mempraktekkan ajaran ideologi ini dengan merampas kekayaan nasional rakyat Irak. Sejak perusahaan AS telah bersiap diri untuk hadir di Irak untuk mengeruk kekayaan dan dan fasilitas yang ada di negara ini. Akan tetapi mereka merahasiakan aksi

⁵⁶ Ibid 73

perampokan ini sedapat mungkin, jangan sampai menimbulkan keraguan dan penentangan. Berkenaan dengan aktifitas luas berbagai perusahaan AS di Irak, majalah *Global Politician*, cetakan AS, menulis, "Sektor swasta AS memainkan peran aktif yang sangat luas di Irak, mulai dari penyediaan senjata bagi militer AS, penyediaan tenaga sipil, perbaikan jembatan, bendungan, hingga penyediaan alat-alat tulis dan perancangan program-program pendidikan bagi putra-putri Irak. Dari semua aktifitas tersebut, mereka memperoleh bagian dari hasil-hasil yang dicapai oleh pasukan militer AS di Irak."

Pada tahun 2002, Lockheed sudah meneken kontrak dengan Pentagon dengan nilai sekitar 17 miliar USD, dimana perusahaan ini akan mempersiapkan senjata-senjata yang diperlukan oleh militer AS untuk menyerang Irak. Dua perusahaan besar lainnya, yaitu Boeing dan Rayton, juga berusaha untuk tidak tertinggal dari pesta pora ini, sedangkan perusahaan Rayton berhasil menjual lebih banyak rudal-rudal Tomahawk dan Patriot kepada militer AS. Tentu saja, pada akhirnya, rakyat Irak jugalah yang menanggung semua biaya pembuatan dan pembelian senjata-senjata tersebut, yang kemudian digunakan untuk menghancurkan leburkan tanah air dan membunuh sanak saudara mereka.

Perusahaan-perusahaan nonmiliter AS pun ikut hadir di meja yang menyajikan pesta pora merenggut kekayaan rakyat Iraq ini, dan ikut pula menikmati bagian yang tidak kecil. Meskipun saat ini Irak terus menerus dirundung kerusuhan, dan kondisi seperti ini biasanya tidak disukai oleh para investor, namun berkat perlindungan yang diberikan oleh pasukan militer AS. Sementara itu alokasi dana oleh pemerintah AS untuk rekonstruksi Irak, juga muncul sebagai topik menarik perhatian dan kontroversif. Karena dalam perang

yang kejam dan liar ini, selain membunuh warga Irak, pasukan militer AS juga menghancurkan berbagai infrastruktur dan sarana-sarana umum negara ini, dan kini mengklaim bahwa untuk membangun kembali semua yang telah mereka hancurkan ini, pemerintah AS telah mengalokasikan sekian miliar dolar. Padahal semua uang itu, dengan berbagai cara dan akal licik mereka, masuk ke kantong para pemilik perusahaan-perusahaan AS.

Belum lama ini telah diumumkan bahwa di masa Paul Bremer, yang sempat menjabat sebagai kepala pemerintahan AS di Irak, 9 hingga 10 miliar USD dari budget 56 miliar USD rekonstruksi Irak, telah lenyap tak berbekas. Skandal yang sedemikian besar, mengisahkan adanya peran perusahaan-perusahaan besar AS yang bermain sulap dengan biaya yang sedianya dianggarkan untuk membangun kembali Irak itu. Selain itu, ketika perusahaan-perusahaan ini memiliki kemampuan bermain sulap seperti itu terhadap budget yang katanya dikeluarkan oleh negara mereka sendiri, maka bagaimana pula permainan sulap mereka terhadap harta kekayaan milik rakyat Irak.

Halliburton, perusahaan yang mendapat dukungan luas dari Dick Cheney, Wakil Presiden AS, adalah perusahaan yang paling aktif di bidang rekonstruksi Irak. Perusahaan swasta ini juga menjual dan menyediakan pelayanan-pelayanan di bidang militer. Bahkan cabang-cabang kecil perusahaan ini, ikut menekan sejumlah kontrak serba menguntungkan di Irak. Di bidang penyediaan layanan-layanan pendukung militer, termasuk pembuatan penjara, perusahaan Halliburton, menekan kontrak senilai 443 juta USD dengan Departemen Pertahanan AS, untuk menampung warga Irak lebih banyak dalam tahanan pasukan militer AS.

Bechtel, satu lagi perusahaan AS yang berkat hubungan dekatnya dengan sejumlah pejabat gedung putih, berhasil meneken beberapa kontrak di Irak, dan berhasil menggaet keuntungan bersih lebih dari 700 juta USD. Cukuplah kita ketahui bahwa pejabat kantor pengawas kontrak-kontrak rekonstruksi Irak, memiliki hubungan yang sangat dekat dengan perusahaan Bechtel. Kontrak senilai 600 juta USD untuk rekonstruksi infrastruktur Irak, seperti bandara-bandara, jalan-jalan raya dan sistim-sistim saluran air dan listrik, ditangani secara khusus oleh perusahaan Bechtel. Kini sudah empat tahun lewat, tapi tak satu pun dari sekian banyak kontrak itu yang sudah rampung dikerjakan. Perusahaan Dincrup, yang memiliki rapor merah dalam program rekonstruksi Bosnia, juga dilibatkan dalam rekonstruksi Irak.

Seorang pakar perminyakan Bachrawi Sanusi pernah mengatakan, selain tujuan politik, serangan Bush ke Negeri 1001 mimpi itu juga dimungkinkan karena dendam dan kepentingan duit. Ia menilai adanya dendam Bush terhadap Irak, terutama sejak menjelang terjadi perang Oktober 1973 di Timur Tengah, saat Irak berhasil melakukan nasionalisasi *Iraq Petroleum Co* (IPC) senilai 350 juta dolar AS. IPC itu terdiri atas perusahaan minyak asing seperti *British Petroleum Co Ltd*, *Cie Francaise des Petroles* (CFP), *Shell Petroleum Co Ltd*, *Near East Development Corp* (50-50 Exxon Copr Mobil Oil Corp.)

Walaupun perang Oktober 1973 juga berhasil membangkitkan berbagai energi alternatif, termasuk energi nuklir dunia, bangkitnya berbagai mesin-mesin yang serba hemat BBM, meningkatkan moneter/ekonomi negara-negara maju, dan lain-lain, namun bagi AS masih ada kerikil tajamnya. Kerikilnya ketika itu adalah Saddam Hussein yang mampu memengaruhi OPEC dan terutama memengaruhi

negara-negara Arab pengeksport minyak. Tidak heran ketika Dr Kissinger yang waktu itu sebagai Menteri Luar Negeri AS berupaya membubarkan OPEC, tetapi tidak berhasil. Kemudian pihak AS berhasil mengadu-domba antara Irak dan Iran. Bahkan terakhir, Irak diadu-domba dengan Kuwait. “Semuanya itu telah menghasilkan kehancuran, terutama kehancuran ekonomi migas Irak.”

Karenanya Bush harus menyingkirkan pemerintahan Saddam lebih dahulu. Karena ia dinilai sebagai penghalang bagi kemajuan perusahaan-perusahaan migas milik Bush beserta keluarga dan rekan-rekannya. Dilihat dari cadangan minyak mentah dunia pada Januari 1995 sekitar satu triliun barel, dari jumlah ini terdapat di Irak sekitar 10%, Arab Saudi 26,1%, Persatuan Emirat Arab 9,8%, Iran 8.9%; Kuwait 9,7%, Qatar 0,2% . Semua negara di wilayah Timur Tengah itu tidak bisa berlutut menghadapi Bush, dan hanya Irak saja. Karena itu, Saddam harus segera digulingkan.⁵⁷

Sebenarnya, kalau saja Irak tidak berhasil diadu-domba, sehingga terjadi perang antara Iran dan Iraq pada tahun 1980-1988 dan perang dengan Kuwait Agustus 1990 yang berakhir Irak terkena embargo PBB hingga sekarang, maka potensi ekonomi migas Irak pasti makin besar. Tetapi karena pihak Bush tidak senang terhadap kebijakan politik Saddam, maka berbagai cara telah dilakukan dalam upaya menggulingkan. Karena itu, ada alasan penting mengapa AS menyerang Irak. Salah satunya adalah penopang ekonomi terbesar AS saat ini adalah minyak dari Timur Tengah. Negara-negara Teluk yang saat ini memproduksi hampir 70 persen kebutuhan minyak dunia adalah 'sumber

⁵⁷ Pesta-Pora Amerika di Iraq, <http://www.arrassmah.com/news/detail/pesta-pora-amerika-di-iraq>, diakses pada tanggal 20 februari 2008

keuangan' AS. Saat ini, misalnya, lebih dari 70 persen perusahaan minyak AS beroperasi di Teluk.

E. AS Dibalik Permasalahan Irak-Kuwait

Presiden Bush memperlihatkan energi ekstra dalam menyelesaikan krisis ini. Walaupun kebanyakan alasan ketidaksetujuan dan keterlibatan Amerika Serikat adalah asumsi realis, strategi umum yang digunakan untuk membangunnnya lebih tercirikan secara liberal-fungsional bukan sekedar *lips service* terlepas dari penelitian mengenai kebenaran bahwa ini adalah era menurunnya pamor Amerika Serikat. Dalam doktrinnya, Bush menyatakan ada 4 prinsip sederhana yang akan digunakan untuk memandu kebijakannya atas krisis Irak-Kuwait. *Pertama*, mencari dan meminta penarikan pasukan Irak dari Kuwait secepatnya, tanpa syarat apapun, dan secara keseluruhan. *Kedua*, pemerintahan Kuwait yang sah harus dikembalikan untuk menggantikan rezim boneka Saddam. *Ketiga*, pemerintahannya sebagaimana halnya yang akan dilakukan oleh setiap Presiden Amerika sedari Roosevelt hingga Reagan, berkomitmen bagi keamanan dan stabilitas Teluk Persia. *Keempat*, bersumpah untuk melindungi kehidupan warga negara Amerika diluar negeri.⁵⁸

Secara konkrit, Bush kemudian mengembargo secara unilateral seluruh perdagangannya dengan Irak, membekukan aset-aset Irak di Amerika dan melindungi aset-aset Kuwait. Bush juga berbicara dengan para pemimpin di

⁵⁸ *Public Papers of the Presidents of the United States. George Bush 1990, vol. 2. Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1991* didalam <http://rizkispaputro.wordpress.com/2007/08/04/penentangan-amerika-serikatatas-invasi-irak-ke-kuwait-agustus-1990>, diakses tanggal 20 februari 2008

Timur Tengah, Eropa, Asia dan Amerika. Ia juga telah bertemu dengan Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher, Perdana Menteri Kanada Brian Mulroney, dan SekJend NATO Manfred Woerner, dan semuanya setuju bahwa Irak tidak boleh diuntungkan dari invasinya ke Kuwait. Untuk itu, Bush juga meminta agar Soviet dan China menghentikan penjualan senjatanya ke Irak, dan semuanya sepakat.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Dick Cheney juga melakukan konsultasi dengan Presiden Mesir Husni Mubarak, Raja Maroko Hassan II. Menteri Luar Negeri James A. Baker dikirim ke Eropa untuk berkonsultasi dengan para Menteri Luar Negeri NATO, demi meminta dukungan teman-teman diseluruh dunia, termasuk di dalamnya Uni Soviet, dan negara Eropa Baru, Turki, melalui Presiden Turgut Ozal.

Amerika Serikat melalui pemerintahan Bush berusaha menginternasionalisasikan permasalahan Irak-Kuwait, sehingga tidak menjadi sekedar tanggung jawab AS, tetapi juga tanggung jawab dunia dengan meminta bantuan dari Dewan Keamanan PBB. Dunia-pun selaras dan sejalur dengan rencana Amerika Serikat, mulai dari membuat resolusi yang mengecam Irak dan meminta Irak menarik diri dari Kuwait maksimal November 1991. PBB juga membuat resolusi yang isinya mengembargo Irak dari segala macam perdagangan dengan dunia luar. Membentuk pasukan Aliansi atas permintaan Amerika Serikat serta mengirimkan pasukan perdamaian PBB untuk mengawal penarikan mundur tersebut.

Karena Saddam Hussein tidak mematuhi resolusi PBB, maka pada awal tahun 1991 tentara aliansi mulai bergerak ke Kuwait untuk mendongkel pemerintahan boneka Saddam di sana. Amerika Serikat mengirimkan pasukannya

yang paling besar setelah Konflik Vietnam tahun 70an, sekaligus memimpin pasukan aliansi dalam mempertahankan garis depan negara-negara sekutu di kawasan tersebut. Melakukan strategi perang udara untuk menghancurkan fasilitas vital terutama senjata pemusnah massal, kemudian dilanjutkan dengan strategi perang darat untuk memukul pertahanan Irak di Kuwait.

Sebelumnya, Bush juga meminta produsen minyak nasional untuk meningkatkan produksinya untuk mengurangi efek dari berkurangnya *flow* minyak dalam ekonomi dunia. Bush juga meminta agar perusahaan-perusahaan minyak untuk melakukan bagi hasil keuntungan yang baik dan tidak bersaing secara ketat, demi kelangsungan hidup tentara penjaga perdamaiannya.

Akan tetapi kemudian banyak analisis dan *think tank* melihat pendongkolan pasukan Irak dari Kuwait tidak akan menyebabkan *order* bagi kawasan Timur Tengah. Maka pasukan aliansi berbalik untuk menyerang wilayah Irak, terutama di daerah vital. PBB juga mendukung gagasan *Pacific Middle East* dengan hukuman bagi Irak, embargo selama 10 tahun.

Invasi Irak ke Kuwait sebenarnya didasari kepentingan ekonomi dan geopolitik. Motivasi realis Irak ini ditanggapi oleh Amerika, satu-satunya negara superpower yang mampu bertahan pasca Perang Dingin dengan motif-motif yang juga realis. Motif-motif seperti kepentingan nasional untuk mempertahankan Tata Dunia Baru pasca Perang Dingin mewarnai pemikiran realis *foreign policy* Bush Sr. Kepentingan nasional untuk menjaga kendali industri dan penopangnya (minyak) agar tetap di tangan, menjaga agar tidak muncul negara mayor baru yang memiliki kekuatan nuklir, serta alasan menjaga perdamaian dan eksistensi sekutu di kawasan tersebut juga menjadi determinan penentangan AS atas tingkah

polah Saddam. Secara humanis, dunia juga mengutuk tindakan Saddam yang salah memperhitungkan langkahnya dengan menganeksasi Kuwait. Melihat gelagat demikian, Bush memanfaatkannya untuk internasionalisasi krisis Irak-Kuwait dengan membuat doktrin Bush yang langkah konkritnya antara lain, melakukan lobi-lobi negara besar, memanfaatkan perannya dalam Dewan Keamanan PBB, dan mengendalikan PBB yang membawahi negara-negara di sebagian besar dunia, agar sejalur dengan kebijakan AS dalam menangani masalah Irak-Kuwait. Agar hantaman kepada Irak tuntas, maka Amerika Serikat membentuk pasukan aliansi yang meruntuhkan kekuasaan Saddam dari Kuwait, sekaligus melemahkan kondisi dalam negeri Irak, setelahnya lewat perang fisik, embargo dan zona larangan terbang.⁵⁹

Bush dan sekutunya memperkirakan, serangan terhadap Irak nanti dapat diselesaikan dalam waktu singkat, dan Irak diharapkan akan bangkit lagi sekiranya orang-orang Bush di Irak sebagai pengganti Saddam Hussein mulai pegang peranan. Irak bagi AS dan sekutunya tidak seperti Afghanistan, Somalia, dan Aljazair. Negeri 1001 Malam itu punya keunikan tersendiri yang menarik bagi Bush untuk mengatur negeri itu pascaagresi. Wajar jika Bush dan sekutunya tidak memperbolehkan pihak lain termasuk PBB ikut campur urusan Irak pascaperang, terutama mengatur pampasan perang berupa minyak.⁶⁰

⁵⁹ Rizki Saputro, "Penentangan Amerika Serikat atas Invasi Irak ke Kuwait, Agustus 1990" <http://rizkisaputro.wordpress.com/2007/08/04/penentangan-amerika-serikatatas-invasi-irak-ke-kuwait-agustus-1990>, diakses tanggal 20 februari 2008

⁶⁰ A Adib, dari Analisis Berita *Suara Merdeka*, Senin, 7 April 2003

BAB IV

Irak Memanfaatkan Minyak Sebagai Alat Diplomasi Terhadap Amerika Serikat

Sebelum Amerika Serikat (AS) menggunakan powernya di Dewan Keamanan PBB sebagai sarana untuk mencapai tujuan politik luar negeri terhadap Irak, AS juga bertindak secara individu dalam kapasitasnya sebagai negara. Hal ini misalnya dapat dilihat dari tindakan membekukan sebuah asset ekonomi dengan Irak di AS dan menghentikan hubungna ekonomi dengan Irak pada tanggal 2 Agustus 1990. Pada tanggal 7 Agustus 1990, AS juga mengirimkan 210.000 pasukannya ke Arab Saudi (menjelang perang teluk II jumlah tersebut semakin bertambah)⁶¹. Bahkan presiden AS pada waktu itu, George Bush mengancam Irak dengan menyatakan “tidak akan ada perundingan, konsensi, dan hadiah bagi Saddam”⁶².

Selain meningkatkan kualitas dan kuantitas mesin perang atau pasukannya dan ancamannya terhadap Irak, AS juga melobi negara-negara Arab dan sekutunya untuk berpartisipasi dalam “pasukan multinasional”. Menurut AS, pembentukan pasukan tersebut bertujuan untuk membebaskan Kuwait dari Irak dan melindungi negara-negara teluk lainnya seperti Arab Saudi dari serangan Irak. Berkat gencarnya lobi dan propaganda AS untuk menjadikan Irak sebagai “musuh bersama”, akhirnya terbentuk pasukan koalisi anti Irak yang didukung oleh hamper semua negara Arab dan sejumlah negara sekutu AS.

⁶¹ Time, 7 Januari 1991

⁶² Riza Sihbudi, *Eksistens.*, Jakarta, Mizan, hal 26

A. Diplomasi Sumber Alam Oleh Irak Kepada Amerika Serikat

Sejak AS meningkatkan perhatiannya ke kawasan Timur Tengah, minyak merupakan salah satu kepentingan vital di kawasan tersebut. Hal ini, terutama AS menjadi salah satu importer minyak terbesar didunia. Pada tahun 1970 misalnya, AS mengimpor 19% dari total konsumsi minyak didalam negeri. Tiga tahun kemudian jumlah impor minyak naik menjadi 35,9% dari total konsumsinya. Pada tahun 1977, AS bahkan mengimpor 47% dari total konsumsi minyak nasional.⁶³ Konsumsi minyak AS adalah sekitar 16,67 juta barrel tiap hari dimana 6.68 juta barrel diperoleh dari impor. Dari jumlah impor tersebut yang datang dari OAPEC (negara-negara Arab pengekspor minyak) hanya 1,27 juta barrel dan dari angka ini yang berasal dari Saudi Arabia adalah 1,062 juta barrel.

Tabel 4.1

Ladang-Ladang Minyak Irak Terbesar Dengan Kapasitas Produksi

No	Ladang Minyak	Kapasitas produksi per hari (Ribu barel)
1	Rumaila	1.300
2	Kirkuk	720
3	West Qurnah	225
4	Zubair	220
5	Bai Hasan	100
6	Majoon	50

Sumber: http://www.republika.co.id/koran_details.asp?id=215044&kat_id=16

⁶³ Amin Rais, *Politik dan Pemerintahan Timur Tengah*, hal 260

1. Peran OKI dalam Konflik Irak dan AS

Pada tahun 1990-an, AS masih juga melakukan impor minyak dari Timur Tengah meskipun jumlahnya lebih kecil dari periode sebelumnya, yaitu sekitar 30% dari total konsumsi nasionalnya. Ketergantungan AS terhadap impor minyak dari Timur Tengah ini menyebabkan kelangsungan industri AS banyak dipengaruhi oleh kelancaran suplai minyak dari kawasan Timur Tengah. Oleh karena itu, AS sangat berkepentingan untuk menjaga kelancaran akses minyak tersebut. Namun kepentingan minyak AS di Timur Tengah khususnya di kawasan teluk terancam, karena Irak menggunakan kekuatan militernya untuk melakukan invasinya ke Kuwait dan negara-negara tetangganya seperti Arab Saudi yang merupakan sekutu terkuat dan negara-negara Barat.

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, Rabu (26/2), mengatakan bahwa negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) akan menggunakan minyak sebagai senjata untuk mencegah invasi Amerika Serikat ke Irak. OKI juga sepakat menyatukan pandangan dalam menangani masalah Irak dan Palestina. Mahathir mengemukakan, penggunaan minyak sebagai senjata sesuai melakukan pertemuan informal OKI di Gedung PWTC Kuala Lumpur yang dihadiri oleh 49 negara OKI yang juga anggota GNB, serta dua negara bukan anggota GNB.

Pada pertemuan informal itu, OKI juga akan meminta Israel untuk menghentikan aksi pembantaianya terhadap warga Palestina, serta mengimbau agar Bagdad yang dituding AS memiliki senjata pemusnah mematuhi permintaan tim inspeksi senjata PBB. Irak berulang kali menyanggah tudingan bahwa pihaknya telah memproduksi senjata pemusnah massal. Pengakuan dari Irak tersebut tidak diragukan negara anggota OKI, namun jika hal itu sebagai spekulasi

semata maka Irak dikatakannya akan menghadapi konsekuensinya. OKI juga akan melakukan pendekatan dengan negara-negara yang menentang aksi peperangan seperti Prancis, Jerman, Belgia, dan Rusia untuk mengantisipasi kemungkinan melonjaknya harga jika perang terjadi di Irak.

Mahathir juga mengatakan, penggunaan minyak yang merupakan kekayaan negara anggota OKI sebagai senjata masih merupakan konsensus yang harus dipertimbangkan. Hal itu berkaitan dengan dampaknya yang akan sangat berbahaya dan bisa terjadi secara menyeluruh, tak tercuai negara anggota GNB sebagian besar terdiri dari negara miskin yang baru menyelesaikan KTT-nya. "Harga minyak tentu saja akan meningkat yang diperkirakan akan mencapai 50 dolar AS per barel di pasaran dunia, akibatnya sudah bisa diduga, harga-harga akan naik dan tentu saja akan menambah beban biaya hidup negara-negara miskin," tutur Mahathir.

Berbicara pada akhir pertemuan khusus para pemimpin dan menteri 49 negara termasuk sekira 20 penghasil minyak seperti Arab Saudi dan Kuwait, Mahathir mengatakan, "Ada satu saran yang akan kita pertimbangkan untuk menggunakan sumber-sumber minyak kita untuk melakukan tekanan."

"Bagaimana ini dapat dilakukan itu masalah lain, tetapi ada satu konsensus tentang perlunya bagi kita untuk mempertimbangkan hal-hal ini," katanya. "Ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Sejumlah negara mengatakan hal itu mungkin menimbulkan reaksi, tetapi jika kita tidak mempertimbangkan tindakan tersebut kita tidak akan dapat menggunakan pengaruh," tambahnya.

Delegasi-delegasi pada pertemuan khusus OKI mengecam keras rencana AS dan Inggris untuk menyerang Irak jika negara itu tidak menyerahkan senjata-

senjata pemusnah massal yang menurut Washington dan London disembunyikan Bagdad. Namun, mereka juga mengimbau Irak menaati penuh ketentuan-ketentuan Resolusi 1441 PBB dan bekerja sama penuh dengan para pemeriksa senjata dari PBB. Arab Saudi, negara pengespor minyak terbesar dunia dan produser-produser penting lainnya dari negara-negara Islam seperti Iran berulang kali mengabaikan penggunaan minyak sebagai senjata, yang berpendapat bahwa konsekuensi usaha terakhir itu mengaitkan pasokan minyak dengan politik.⁶⁴

Ancaman kekuatan militer Irak dapat dipisahkan dari sikap agresif Irak. Jika saja Irak tidak agresif, Irak mungkin tidak akan menggunakan kekuatan militernya tersebut melakukan invasi ke negara-negara tetangganya. Sebaliknya, kekuatan militer Irak juga terbukti menjadi sarana penting yang menunjang keagresifan Irak. Dengan kekuatan militer yang tangguh, Irak dapat dengan mudah menduduki negara-negara tetangganya yang kaya minyak (seperti yang dilakukannya terhadap Kuwait).

Ancaman kekuatan militer Irak terhadap kepentingan minyak AS semakin lengkap jika dikaitkan dengan sikap radikal Irak. Hal ini misalnya dapat dilihat dari ancaman Saddam Hussein sebagai berikut:

*“Iraq would try to destroy all oil filed in the region, if it attacked by the U.S. led multinational force in Saudi”*⁶⁵

⁶⁴ Oki memanfaatkan minyak dalam <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0203/27/0101.htm> diakses pada tanggal 07 Marert 2008

⁶⁵ Internasional Herald Tribune, 21 September 1990

Tabel 4.2
Perbandingan Cadangan Minyak dengan Produksi Rata-rata Minyak
Per hari

No	Negara Penghasil Minyak	Cadangan Minyak (Miliar barel)	Produksi Rata-rata Minyak Per hari (juta barel)
1	Arab Saudi	259,2	7,6
2	Iraq	112,5	2,0
3	Uni Emirat Arab	94,0	2,3
4	Kuwait	92,2	1,9
5	Rusia	48,6	7,3
6	Amerika Serikat	22,4	5,9

Sumber: http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=215044&kat_id=16

Sepertihalnya ancaman kekuatan militer Irak, ancaman sikap radikal ini tidak dapat dipisahkan dari sikap agresif Irak. Dengan adanya sumber minyak yang dimiliki saat ini, Irak dapat meningkatkan kualitas diplomasi yang akan bisa menjadi ancaman yang merugikan dan membahayakan AS. Asumsinya Irak mampu merebut negara-negara kaya minyak tetapi lemah pertahanan militernya, dapat dipastikan Irak akan mengurangi atau bahkan menghentikan suplai minyak ke AS, karena seperti yang diketahui bahwa Irak sangat tidak mendukung AS. Seperti halnya ketika negara-negara Arab embargo tahun 1973. Irak dengan kontranya mungkin dapat melakukan embargo minyak ke AS. Jika hal itu terjadi maka industri AS akan mengalami kerugian, jika Irak benar-benar memaksakan ancamannya untuk menghancurkan ladang minyak yang ada di kawasan tersebut, kelancaran akses minyak di kawasan ini pasti akan terganggu. Maka secara tidak langsung akan membuat Amerika Serikat sedikit berfikir untuk menyerang Irak,

dan permasalahan yang akan muncul bila serangan yang dilancarkan AS tidak sesuai yang diharapkan atau gagal.

Tabel 4.3
Persentase Minyak dari Seluruh Impor Amerika Serikat
(Dalam miliar dollar)

Tahun	Nilai Impor Keseluruhan	Nilai Impor Minyak	% Minyak dari Keseluruhan
1970	39,9	22,9	7,3
1973	70,5	8,4	11,9
1974	103,7	26,6	25,6
1976	124,0	34,6	27,9
1978	176,0	42,3	24,0
1980	249,8	79,3	31,7
1982	247,6	61,2	24,7
1983	261,2	53,8	20,6
1984	334,0	57,5	17,2
1985	338,9	50,5	14,9
1986	365,2	34,4	9,4

Sumber: Economic Report of the President, 1982 didalam Walter S.Jones, Logika Hubungan Internasional: Kekuasaan Ekonomi-Politik Internasional, hal 280

Nasionalisasi minyak Irak sudah terjadi dan merupakan strategi obyektif Presiden Saddam Hussein sejak revolusi 17-30 Juli 1968. Puncak nasionalisasi terjadi pada 17 Juni 1972, ketika beliau memberi ultimatum dalam dua minggu agar perusahaan minyak asing di nasionalisasikan. Sebelumnya pada tanggal 1 Juni 1972 mengumumkan pada rakyat Irak mengenai nasionalisasi tersebut, dimana dikatakan bahwa Irak akan mengontrol 60% sektor produksi minyak dan 99,75% dari produksi minyak mentah.⁶⁶

⁶⁶ Dasmam Djarmaluddin, *Saddam Hussein menghalau tantangan*, Jakarta, Penebar Swadaya, 1998

Disamping pengelolaan sumber-sumber minyak, Saddam juga melakukan perluasan disekitar publik. Dan peningkatan penerimaan dari minyak akibat kenaikan minyak mentah, memungkinkan pelaksanaan-pelaksanaan pembangunan dalam hal perubahan struktur ekonomi dan social yang sesuai dengan ideology “*Arab Socialist Baath Party (ASBP)*”. Kebijakan politik dalam negeri Irak pada dasarnya untuk menciptakan stabilitas dalam negeri. Hal ini dikarenakan bahwa Saddam telah cukup banyak mengalami, dimana sejak munculnya pemerintahan republic di Irak banyak diwarnai dengan instabilitas politik dalam negeri berupa kudeta. Oleh karena itu jalan yang ditempuh oleh Saddam adalah memperkuat posisi kekuasaannya dengan membangun seperangkat kekuatan. Politik sedemikian rupa seperti pengamanan dan pasukan yang ketat, agar kekuasaannya tidak mudah goyah diterpa oleh kelompok-kelompok oposisi.

Pada sebuah perjalanan terakhir ke Jepang untuk memberikan penjelasan dan mendapatkan dukungand ari investor asing, Menteri Minyak Hussein Shahrستاني mengatakan pada para reporter bahwa perusahaan-perusahaan internasional adalah satu-satunya cara bagi Irak untuk mendapatkan target resmi mereka: Irak bertujuan untuk menarik investasi sebesar \$20 milyar dan menaikkan output hingga enam juta barrel per hari pada tahun 2012. Ia mengatakan Irak saat ini memproduksi hanya sedikit di bawah 2,5 juta barrel per hari, tetapi ia lalu menambahkan, “Kami memutuskan untuk menaikkannya pada empat hingga 4,5 juta barrel per hari pada akhir tahun 2010. Tetapi kami juga memutuskan untuk mendapatkan yang lebih dari itu dengan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan internasional.”

Ia menyalahkan penurunan produksi adalah hasil dari sabotase, tetapi ia juga menyatakan bahwa kementriannya sedang belajar untuk mengatasi hal itu. “Kami telah berusaha untuk memperbaiki hal tersebut (sabotase) dengan tingkat rata-rata 48 jam,” katanya.

Untuk saat ini, Irak terus untuk menaikkan potensi dan posisinya di dalam pasar minyak global. Dengan produksi 2,5 juta barrel per hari, ia hanya berkontribusi sekitar dua persen terhadap produksi global. Minyak Irak mempengaruhi harga minyak global, setidaknya pada perhitungan hari-ke-hari, kata Vera de Ladoucette, senior vice president dari Cambridge Energy Research Associates di Paris. Dan selama lebih dari tiga tahun ini, para pejabat minyak Irak telah terus menerus menaksir terlalu tinggi tentang betapa cepat mereka dapat mengembalikan tingkat produksi mereka. Ya, tidak ada keraguan mengenai potensi masa depan Irak. Para analis mengatakan bahwa negara tersebut dapat berkontribusi hingga delapan persen produksi minyak global pada tahun 2020 jika semua berjalan dengan baik.⁶⁷

2. Kepentingan Perancis dan Jerman

Perancis dan Jerman merupakan negara-negara industri yang sangat tergantung juga pada pasokan energi yang besar, termasuk minyak bumi. Hal itu tentu saja dipenuhi dari import dari negara-negara lain terutama dari juga dari kawasan Timur Tengah. Akses yang bebas terhadap minyak merupakan hal yang ingin dipertahankan oleh mereka. Hal ini menjadi penting, karena penguasaan secara sepihak terhadap sumber minyak bumi akan menyebabkan gangguan dalam

⁶⁷ perpolitikan minyak irak dalam <http://rizkisaputro.wordpress.com/2007/10/15/perpolitikan-minyak-irak-suram/> diakses pada tanggal 07 Maret 2008

mekanisme pasar, dan konsekuensinya akan terjadi perubahan harga secara tidak wajar. Perang Irak 1991 merupakan suatu bukti dimana pergolakan politik di negara-negara penghasil minyak mempengaruhi pasokan dan akses minyak terhadap minyak, karena Irak merupakan salah satu pemasok yang besar bagi kebutuhan energi mereka.

Krisis Irak pada saat ini menjadikan Perancis dan Jerman semakin menyadari akan pentingnya akses dan pasokan minyak bagi negaranya. Apalagi ada kecenderungan berkurangnya cadangan minyak bumi yang ada di dunia, sehingga penguasaan dan kontrol terhadap cadangan minyak bumi akan menjadi sangat penting. Hal ini mendorong kedua negara tersebut semakin intensif mendekati negara-negara penghasil minyak bumi, termasuk Irak. Potensi minyak Irak yang sangat begitu besar, dan kecenderungan kedekatan Irak dengan negara Eropa di bandingkan dengan Amerika, merupakan kesempatan yang harus dimaksimalkan oleh kedua negara tersebut untuk mengadakan kontrak kerjasama dengan pemerintah Irak di bawah Saddam Hussein.

Irak telah menandatangani beberapa kontrak yang bernilai jutaan dolar AS, terhadap beberapa perusahaan asing terutama dari Cina, Perancis, Jerman, dan Rusia, yang diperkirakan mencapai 38 milyar dolar AS terhadap pengembangan lahan minyak baru, dengan potensi kapasitas produksi mencapai 4,7 juta barel perhari jika kontrak tersebut terlaksana dengan baik.⁶⁸ Meskipun sempat terjadi ketegangan hubungan Irak dengan Perancis, akibat dukungan yang diberikan Perancis akan sanksi terhadap Irak yang dirancang oleh AS.

⁶⁸ Diambil dari artikel, *Oil* dapat diakses dari <http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/iraq.html> dalam skripsi Junianto, *Friksi dalam NATO Menghadapi Krisis Irak 2002*, UGM 2004

Adanya rencana serangan AS dan Inggris terhadap Irak, tentu saja akan membawa pengaruh terhadap kontrak kerjasama yang telah ada. Hal ini apabila serangan AS berhasil dan terjadi pergantian rezim yang berkuasa dan diikuti pergantian rezim pilihan AS, maka nasib kerjasama yang dibuat dengan rezim yang lama juga akan tidak jelas kelanjutannya. Sehingga akan menjadikan sulit bagi Prancis dan Jerman, untuk ikut memperoleh akses terhadap minyak di Irak. Karena tentu saja AS akan lebih cenderung membagi kontrol dan kekuasaan minyak Irak dengan Inggris. Hal itu secara otomatis AS dan Inggris bias lebih mengatur kerjasama dan kontrak minyak dengan perusahaan-perusahaan dan negara-negara yang telah mendukung mereka. Hal ini dapat menciptakan AS sebagai negara yang menjadi penjamin pasokan minyak ke negara lain, yang tentu saja akan membuat ketergantungan akses minyak terhadap control AS. Pergantian rezim juga tidak akan hanya membatalkan kontrak kerjasama dalam hal minyak saja tetapi juga kontrak kerjasama dalam hampir segala bidang. Hal ini tentu saja merugikan Prancis dan Jerman yang selama ini menjadi partner yang dipercaya oleh Saddam.⁶⁹

Kerjasama dalam industri minyak juga semakin diperkuat dengan memulai penggunaan mata uang Euro pada awal tahun 2000. Hal ini tentu saja menguntungkan kedua belah pihak, karena tidak perlu melakukan perdagangan dengan dollar, seperti yang selama ini dilakukan dalam system perdagangan internasional. Dengan penggunaan mata uang euro dalam perdagangan minyak, Prancis dan Jerman berusaha untuk menentang dominasi AS dalam perdagangan

⁶⁹ Prancis dan Jerman telah menjalin kerjasama dalam berbagai Lihat lamiran I <http://www.heritage.org/Research/MiddleEast/wm217cfm>

internasional serta keberadaan poundsterling yang enggan bergabung dengan euro. Dalam jangka panjang hal apabila euro berhasil diakui secara resmi sebagai standard resmi perdagangan internasional maka akan membuat Prancis dan Jerman menjadi kekuatan ekonomi dominan di dunia.

Prancis dan Jerman merupakan negara-negara yang menjadi pelopor adanya Uni Eropa. Dan pada saat ini, Uni Eropa merupakan mitra sekaligus menjadi ancaman dominasi AS. Hal ini diperkuat dengan penggunaan euro sebagai pesaing dari dollar dalam pasar internasional, dalam kasus Irak adalah dalam perdagangan minyak. Meskipun jika OPEC tidak memilih penggunaan euro dalam perdagangan minyak. Meskipun jika OPEC tidak memilih penggunaan euro dalam penggunaan perdagangan minyak secara keseluruhan, tetapi hal itu dapat menimbulkan kesulitan bagi hegemoni AS. Walaupun hanya ada sedikit saja pemakaian euro maka akan dapat menimbulkan beberapa dampak, yaitu:

- a. Meningkatkan ketertarikan anggota Uni Eropa yang lain bergabung dalam 'eurozone', yang berakibat pada menguatnya euro dan membuat ketertarikan negara-negara penghasil minyak sebagai alat perdagangan dan negara non penghasil minyak akan beralih ke euro sebagai alat perdagangan.
- b. Mengurangi peran dollar dalam perdagangan internasional.
- c. Menyebabkan kepanikan dalam pasar financial dunia, dan berakibat turunnya nilai dollar.⁷⁰

⁷⁰ Geoffrey Heard, war on Iraq: something to die for—the U.S. going head to head with Europe for World Economic Domination, dapat diakses melalui <http://www.surf.net.au/gheard/03-03-27%iraq%20war%20&%20econom.html>

Dalam beberapa tahun kedepan, AS tetap merupakan negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia, tetapi dalam bidang ekonomi bias terancam, apabila gagal dalam menghambat pertumbuhan euro dalam sebagai mata uang perdagangan internasional serta penguasaan sumber daya minyak. Hal inilah yang dicoba oleh Prancis dan Jerman untuk memulai menantang hegemoni AS di dunia, dengan memulainya lewat mulai mengembangkan penggunaan euro dalam perdagangan minyak. Rencana serangan AS-Inggris ke Irak merupakan usaha AS-Inggris yang dimaksudkan juga untuk menghentikan perkembangan euro sekaligus penguasaan dan kontrol atas sumber daya minyak, dan merupakan bagian penaklukan ekonomi yang berdimensi politik, karena merupakan upaya menjaga hegemoni AS di dunia internasional.⁷¹

B. Kebijakan Saddam Menggunakan Euro

Monopoli dollar sudah terasa sejak tahun 1960-an. Ketika itu dollar telah menggantikan poundsterling Inggris yang sebelum Perang Dunia II merajai dunia. Tapi, menjelang akhir abad ke-20, dominasi dollar mulai mendapat saingan. Uni Eropa telah menjadi embrio dari kekuatan politik dan ekonomi yang mulai menandingi AS. Euro, mata uang Uni Eropa yang digunakan 12 negara Eropa perlahan-lahan bisa mengimbangi kekuatan dollar. Inggris yang tidak bergabung dengan Uni Eropa tidak menghendaki Uni Eropa termasuk mata uang euro semakin kuat. Konstelasi seperti ini sudah mulai terasa dan perang Irak merupakan satu ukuran.⁷²

⁷¹ Ibid

⁷² Budi Cahyono & Tim Forum, “*Serangan Balasan Menghantam Dollar Amerika*”, FORUM Keadilan, No 49, 13 April 2003, hal 12-15

Begitu diluncurkan pada 1 Januari 1999 lalu, euro, mata uang Uni Eropa langsung disambut secara bergairah di berbagai belahan dunia. Mata uang keluaran ujung abad ke-20 itu, memang sempat menggelegak begitu dibuka pada harga US\$1,17 per euro, dan sudah diperkirakan akan menjadi pesaing dollar AS. Bahkan secara eksplisit para pencetus euro mengungkapkan ambisi mereka untuk menyudahi dominasi AS dalam bidang ekonomi. Catatan menunjukkan terbentuknya Uni Eropa, yang dibina oleh sebelas negara Eropa membuat persaingan negara-negara Eropa dengan AS semakin ketat. Euroland, demikian julukan ke-11 negara itu, memiliki posisi tawar yang berimbang dengan AS. Jumlah penduduk Euroland lebih tinggi ketimbang penduduk AS. Pada 1997, pertumbuhan ekspor Euroland juga lebih tinggi 25%. Begitu pula keterlibatan Euroland didalam perdagangan internasional.⁷³

Tabel 4.4
Masyarakat yang Mendukung Mata Uang Tunggal

Negara	%
Italia	81%
Belgia	76%
Luxemburg	76%
Spanyol	75%
Yunani	69%
Perancis	67%
Belanda	67%
Portugal	64%
Irlandia	63%
Jerman	50%
Finlandia	49%
Austria	48%
Denmark	40%
Swedia	40%
Inggris	22%

Sumber : Eurobarometer Survey: April-May 2001

⁷³ Proyono B. Sumbogo, *Musuh Terkuat Amerika*, FOTUM Keadilan, No 49, 13 April 2003, hal 11

Pada saat itu euro menjadi beru AS. Dengan alasan tertentu sejumlah negara melih bertransaksi dengan Euro ketimbang dollar AS. Selepas Perang Teluk I tahun 1991, Irak yang dikenai embargo ekonomi oleh PBB, menjual minyaknya dengan imbalan euro. Tatkala AS terimbas masalah krisis ekonomi dan nilai dollar di mata uang euro jatuh, Irak menangguk untung jutaan dollar AS dari penjualan euro-nya. Melihat keberuntungan Irak, beberapa negara meniru langkah Presiden Saddam Hussein. Dan tentu AS kelabakan, karena jatuhnya nilai dollar dianggap akan mengakibatkan kehancuran ekonomi negara adidaya itu.

Tabel 4.5
Kurs Euro Terhadap Mata Uang Kuat Lain per 1 Maret 2003

Mata Uang	Euro	Dollar	Yen	Poundsterling
Euro	-	1.06239	127.19664	0.63939
Dollar	0.94047	-	119.62500	063939
Yen	0.00786	0.00036	-	0.00534
Pounsterling	1.47090	1.56400	187.09356	-

Sumber: Republika, 21 Maret 2003, hal 3

Saddam Hussein adalah yang mempelopori penggunaan euro. Pada tahun 2000, ia meminta ke PBB agar proyek *Oil for Food* dibayar memakai euro. Bagi PBB, ini mengembirakan karena menggelembungnya jumlah *escrow* (titipan uang di bank) Irak dibawah pengawasan PBB berarti biaya pemulihan pasca Perang Teluk kian terjamin. Maka, mengalirlah sekitar 26 miliar euro ke *escrow account* Irak di Bank BNP Paribas, New York, untuk pembayaran 3,3 miliar barel minyak. Di mata para analis, langkah Saddam ini dianggap tindakan bodoh, karena saat itu mata uang euro sedang terpelosok. Tapi Saddam tidak peduli. Bahkan, pada tahun yang sama, Irak meminta semua transaksi pembayaran atas penjualan minyaknya

senilai US\$10 miliar dilakukan dengan mata uang Eropa tersebut. Belakangan, setelah euro mengalami apresiasi yang signifikan atas dollar, barulah para analisis memuji langkah jenius Presiden Irak ini. Saddam menanggung keuntungan jutaan dollar. Sebaliknya, AS bertambah geram. Langkah Saddam ini menginspirasi Iran dan beberapa anggota OPEC lain untuk melakukan hal yang sama terhadap penjualan minyak senilai US\$16 miliar. Arab Saudi, sekutu paling dekat AS, juga ikut-ikutan mengurangi dominasi dollar. Gara-gara sejumlah asset bisnis para pengusaha Arab Saudi di AS dibekukan karena dituding mendanai teroris Al-Qaeda, investor Arab marah. Akhirnya mereka mencairkan US\$30 miliar menjadi euro. Bahkan, investor Arab Saudi merepatriasikan US\$200 miliar dari pasar AS lalu dilarikan ke daratan Eropa. Jika pembelian dari Irak dan Iran menggunakan euro, ekonomi AS akan terpengaruh, bisa dibayangkan jika AS akan defisit setiap tahun. Selama ini dengan dollar, AS bisa menopang perekonomiannya dengan megah namun bila dukungan para pemegang dollar AS ditarik dikarenakan agresi AS ke Irak, dengan sendirinya ekonomi AS akan terpuruk.⁷⁴

Tabel 4.6
Posisi Neraca Berjalan UE dan AS
(Dalam miliar dollar)

Tahun	UE	AS
1990	-81.9	-94.3
1991	-81.9	-9.3
1992	-6.6	-10.3
1993	6.6	-99.7
1994	21.2	-147.8
1995	53.8	-148.2

Sumber: IMF, International Financial Statistic, dalam *Proceeding of an IMF conference*

⁷⁴ Cahyono, Op.cit.

Tanda tangan kontrak antara pemerintah Irak dengan sejumlah negara seperti Rusia dan Perancis tidak mengakhiri pertarungan ekonomi di antara sejumlah negara. Terutama semenjak Saddam memutuskan untuk menggunakan euro sebagai ganti dollar dalam semua transaksi minyaknya. Keputusan Saddam saat itu sebenarnya lebih merupakan keputusan politis daripada sebuah langkah investasi. Dengan melepas dollar, Irak hendak menarik distansi dan hegemoni AS. Presiden AS George Walker Bush sudah sadar jika ekonomi dunia sedang bergeser ke euro. Itulah sebabnya, sejak dilantik menjadi Presiden AS pada Januari 2001, tugas Bush adalah mencegah sirkulasi euro. Maka ia berusaha mati-matian mencegah penyebaran euro. Untuk mencegahnya, tidak ada jalan lain bagi AS selain menyerang Irak, sumber minyak kedua terbesar dunia setelah Arab Saudi. Skenario AS ini sudah tercium negara-negara Uni Eropa. Itulah sebabnya mengapa Jerman, Perancis dan Rusia menentang habis-habisan tindakan AS ini. Hanya Inggris yang mendukung AS. Memang, didaratan Eropa, Inggris tidak berkepentingan dengan euro.⁷⁵ Tidak saja negara Eropa Timur, Rusia, Cina atau Korea Utara yang membuat Amerika gusar, negara-negara di Timur Tengah juga mulai beralih ke euro dalam transaksi perdagangan minyak.

C. Saddam Hussein Membawa Sejarah Baru

Saddam Hussein lahir pada 28 April 1937, ia merupakan Presiden dan diktator Irak pada periode 16 Juli 1979 hingga 9 April 2003. Sebagai pemimpin Irak dan ketua Partai Ba'ath, ia mengambil kebijakan pan-Arabisme sekuler, modernisasi ekonomi, dan sosialisme Arab. Sebagai anggota utama Partai Ba'ath

⁷⁵ Ibid

Irak, yang menganjurkan Pan-Arabisme sekular, modernisasi ekonomi, dan sosialisme Arab, Saddam memainkan peranan penting dalam kudeta 1968 yang membuat partainya lama berkuasa di negara itu.

Sebagai wakil presiden di bawah sepupunya, Jenderal Ahmed Hassan al-Bakr yang lemah, Saddam memegang kekuasaan penuh terhadap konflik antara pemerintah dan angkatan bersenjata dengan membentuk pasukan keamanan yang menindas dan mengukuhkan wibawanya terhadap aparat pemerintahan.

Sebagai presiden, Saddam menciptakan pemerintahan yang otoriter dan mempertahankan kekuasaannya melalui Perang Iran-Irak (1980–1988) dan Perang Teluk (1991). Kedua perang itu menyebabkan penurunan drastis standar hidup dan hak asasi manusia. Pemerintahan Saddam menindas gerakan-gerakan yang dianggapnya mengancam, khususnya gerakan yang muncul dari kelompok-kelompok etnis atau keagamaan yang memperjuangkan kemerdekaan atau pemerintahan otonom. Sementara ia dianggap sebagai pahlawan yang populer di antara banyak bangsa Arab karena berani menantang Israel dan Amerika Serikat, sebagian orang di dunia internasional tetap memandang Saddam dengan perasaan curiga, khususnya setelah Perang Teluk 1991.⁷⁶

Semenjak Presiden Al-Bakr mengundurkan diri pada tanggal 16 Juli 1979, Saddam Hussein menggantikan kedudukannya menjadi pemimpin Irak (presiden). Yang semula kedudukan Saddam hanya wakil presiden, dan menjadi presiden membuat sebuah perubahan yang sangat besar. Dimana perubahan tersebut terasa

⁷⁶ Saddam Hussein dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Saddam_Hussein diakses pada tanggal 11 April 2008

pada perekonomian dan segi kekuatan militer dan bahkan dalam kanca internasional.

Dalam gerakan non-Blok, Irak sangat intensif. Negara ini aktif pada pertemuan puncak di Kuba (1979) dan berkat meningkatnya kedudukannya di beri privilese untuk menjadi tuan rumah pertemuan puncak tahun 1982. Kegiatan Irak diantara negara-negara non-Blok mempunyai dua tujuan : *Pertama*, kemandirian nasional, yaitu mencegah kawasan geostrategisnya diubah menjadi suatu kawasan konfrontasi adidaya; *Kedua*, tujuan politik, yaitu memperkuat kedudukannya di Asia Afrika, dan Amerika Latin.

Kepemimpinan Saddam Hussein telah membawa sejarah baru bagi peradaban bangsa Irak. Kepemimpinan Saddam tidak saja berpengaruh bagi kawasan Timur Tengah yang selalu rawan akan dinamika konflik politik, namun dalam skala yang lebih luas berpengaruh terhadap konfigurasi politik internasional.

Berabad-abad yang lalu Irak memang merupakan tempat bangkitnya peradaban bangsa-bangsa terutama bangsa Arab. Namun ketika kekuasaan imperialis mencaploknya, Irak sama sekali tidak mempunyai kekuatan yang berarti. kolonial inggris dengan seenaknya mengeksploitasi sumber-sumber kekayaan minyak yang merupakan simpanan terbesar kedua dunia. Di era Saddam justru keadaan berubah sangat jauh sekali. Pengalaman-pengalaman Saddam atas penjajahan Barat telah membuat Saddam sejak muda sudah terlibat dalam gerakan-gerakan politik untuk membebaskan Irak dari ketertindasan. Dalam kepemimpinannya, Saddam sangat anti kepada Barat. Sadar akan watak politik Barat maka dibangunlah semangat nasionalisme rakyat Irak dengan motor

ideologinya partai Baath, untuk selalu mempertahankan harkat dan martabat bangsa atas tindakan-tindakan politik Barat, terutama AS yang selalu “semena-mena” dalam campur tangan terhadap masalah-masalah politik dalam negeri Irak dan kawasan Timur Tengah pada umumnya.

Saddam sadar bahwa, sejakdulu Barat tidak akan melepaskan pengaruhnya di kawasan Timur Tengah terutama Irak. Hal ini jelas karena kepentingan minyak yang menjadi kebutuhan besar bagi negara-negara industry Barat. Oleh karena itu Saddam tidak akan membiarkan AS dan sekutunya untuk seenaknya mengeksploitasi minyak Irak, jalan yang ditempuh Saddam adalah membangun suatu kekuatan persenjataan militer yang kuat dan modern untuk mengimbangi kekuatan AS.

1. Manuver-manuver Presiden Saddam Hussein

Selama pelaksanaan *Operation Desert Shield* ini pemerintahan Saddam Hussein sempat beberapa kali melakukan manuver guna mengatasi kekhawatirannya atas terlibatnya AS dan pasukan multinasional dalam konflik ini. Sehingga setelah memasuki hari ke-10 pendudukan atas Kuwait, Saddam menyatakan dengan tegas bahwa ia akan menghubungkan penarikan mundur Irak dari Kuwait dengan penarikan mundur Israel dari wilayah Tepi Barat (*west bank*) dan Jalur Gaza yang diduduki serta penarikan mundur Suriah dari Libanon. “Saya menyebutkan bahwa semua kasus penduduk, atau yang dilukiskan sebagai penduduk, dapat diselesaikan pada saat yang bersamaan”.⁷⁷ Sehingga dengan pernyataan ini Saddam ingin menunjukkan kepada dunia bahwa yang melakukan

⁷⁷ Angkatan Bersenjata, 14 Agustus 1990

invasi dan pendudukan bukanlah hanya Irak, melainkan ada dua Negara lainnya yaitu Israel dan Suriah.

Pernyataan dan tuntutan dari Saddam Hussein tersebut tentu saja ditolak dengan “mentah-mentah” oleh Presiden George W. Bush. Juru bicara Gedung Putih, Marlin Fitzwater, dalam surat pernyataan tertulis mengatakan bahwa Presiden AS menolak tuntutan Presiden Saddam yang mengaitkan invasi Irak ke Kuwait dengan persengketaan Israel-Arab dan konflik di Libanon.⁷⁸

2. Usaha-usaha Penyelesaian Konflik Melalui Jalur Diplomasi

Setelah DK PBB pada tanggal 30 November 1990 menerbitkan resolusi no.678 yang memerintahkan agar Irak menarik mundur pasukannya dari Kuwait serta mematuhi segenap ketentuan yang ditetapkan PBB selambat-lambatnya tanggal 15 Januari 1991 dan jika Irak membangkang maka Irak akan dikenai tindakan yang lain yang dianggap perlu, maka posisi Irak makin terjepit. Karena AS dan sekutunya menginterpretasikan resolusi 678 tersebut sebagai pengesahan bagi penggunaan kekuatan militer Irak tak mau mematuhi ketentuan PBB sampai dengan 15 Januari 1991.

Sehari sebelumnya Presiden Bush sempat mengusulkan diadakannya lagi perundingan dengan Irak. Bush merencanakannya dengan mengundang Menlu Irak Tareq Aziz ke Washington pada tanggal 17 Desember 1990 dan meminta Saddam segera mengundang Menlu AS James Baker ke Baghdad. Usulan tersebut disikapi dengan dingin oleh pihak Irak.⁷⁹

⁷⁸ Tim Penyusun PT Media Interaksi Utama & PT Pustaka Sinar Harapan, *Perang Teluk: Malapetaka Dunia* (Jakarta, PT Sinar Agape Press, 1991), hal 232

⁷⁹ Tim Penyusun PT Media Interaksi Utama, *Op.Cit.*, hal.234

Namun setelah keluarnya resolusi PBB no. 678 pada tanggal 30 November 1990, pemerintah Irak pada tanggal 8 Desember 1990 akhirnya menerima tawaran dari Bush dan menjadwalkan untuk menerima kunjungan Menlu James Baker pada tanggal 12 Januari 1991 di Baghdad, sebagai jawaban atas kemungkinan diterimanya Menlu Irak Tareq Aziz oleh Presiden Bush pada tanggal 17 Desember 1990. Pihak AS juga meminta agar pertemuan Baker-Saddam diadakan selambat-lambatnya tanggal 3 Januari 1991.

Akan tetapi, kebijakan saling mengunjungi diantara Menlu tersebut tidak dapat terealisasikan. Sehingga pada tanggal 3 Januari 1991, Presiden Saddam menawarkan kemungkinan diadakannya pertemuan antara Menlu Baker dengan Menlu Aziz di Jenewa. Kemudian keesokan harinya tawaran tersebut diterima oleh pihak Irak dan menjadwalkan bahwa Baker dan Aziz akan saling bertemu di Jenewa pada tanggal 9 Januari 1991.⁸⁰

Pertemuan antara Baker dan Aziz memang dapat direalisasikan, namun berakhir dengan buntu. Dalam pertemuan tersebut Irak mempertanyakan mengapa ada resolusi PBB di tanah Arab yang belum dilaksanakan (Israel-Palestina dan Suriah-Libanon).

Sedangkan Menlu AS James Baker menanggapi gagalnya pertemuan ini dengan mengatakan “pertemuan ini bukan untuk membuat suatu keputusan dalam krisis Teluk ini, tapi hanya untuk saling menjelaskan pendirian masing-masing”. Sehingga gagalnya pertemuan ini dapat pula disimpulkan bahwa sebenarnya AS yang menutup kemungkinan lain untuk menyelesaikan krisis.

⁸⁰ Suara Pembaharuan, 20 Januari 1991

Walaupun gagal, sebenarnya pertemuan ini telah membawa beberapa dampak positif yang diperoleh kedua Negara, baik AS maupun Irak.⁸¹

a. Dari Pihak AS :

1. AS ingin menunjukkan kebesarannya sebagai suatu Negara adidaya yang melaksanakan kewajiban moral terhadap nilai-nilai keadilan kemerdekaan penindasan dengan menjadi “polisi dunia” dalam krisis Teluk ini dengan meminta Irak mundur dari Kuwait tanpa syarat.
2. AS tidak memberi alternative lain untuk penyelesaian krisis Teluk ini dan berperan menjadi “algojo” yang akan menggusur Irak dari Kuwait dengan kekerasan.
3. AS menggunakan pertemuan ini sebagai kesempatan akhir untuk memberikan kesempatan terakhir kepada Irak.

b. Dari Pihak Irak :

1. Irak menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan kepada dunia bahwa ada kekuatan lain di dunia yang berani menentang kekuatan adidaya AS yaitu Irak.
2. Irak menggunakan kesempatan ini untuk memancing opini masyarakat internasional bahwa Irak juga berniat menyelesaikan krisis teluk ini secara damai.
3. Irak ingin menunjukkan bahwa ada hal yang sangat prinsip yaitu ketidakadilan dalam pelaksanaan resolusi PBB di tanah Arab.

⁸¹ Tim Penyusun PT Media Interaksi Utama, Op.Cit., hal 22

KAPAL PERANG		KAPAL PERANG	
A) Sumber Pertama : IHT		B) Sumber Kedua : IHT	
I. MULTINASIONAL			
1. AS:	55	9. Spanyol :	3
2. GCC:	36	10. Australia :	2
3. Inggris:	16	11. Argentina :	2
4. Perancis :	14	12. Uni soviet :	2
5. Italia :	6	13. Denmark :	1
6. Belgia :	3	14. Yunani :	1
7. Kanada :	3	15. Norwegia :	1
8. Belanda :	3	16. Portugal :	1
TOTAL : 149			
II. IRAK	15		
TANK		TANK	
A) Sumber Pertama : IHT		B) Sumber Pertama : IHT	
I. MULTINASIONAL		II. MULTINASIONAL	
1. AS:	2.000	7. AS:	2.900
2. GCC:	800	8. GCC:	600
3. Mesir	400	9. Mesir	300
4. Suriah	270	10. Suriah	200
5. Inggris:	163	11. Inggris:	200
6. Perancis :	40	12. Perancis :	168
TOTAL	3.673	TOTAL	4.368
II. IRAK	4000	II. IRAK	5.500

Sumber: Kompas, 15 Januari 1991

D. Perang besar Irak di Kawasan Teluk

Irak di bawah pimpinan Saddam Husein, tampil sebagai negara Arab yang paling banyak mendapat sorotan dunia internasional. Selama masa kepemimpinan Saddam Husein, Irak berkali-kali terlibat dalam perang besar di kawasan Timur Tengah. Yaitu, perang Irak-Iran (1980-1983) dan perang Irak-Kuwait yang kemudian menjelma menjadi Perang Irak-Sekutu (1990-1991) dan pada awal millennium ini Irak kembali terlibat perang yaitu ketika terjadinya invasi Amerika dan Inggris pada tahun 2003.

1. Perang Teluk I

Perang teluk I yang merupakan konflik antara Irak melawan Iran berlangsung selama delapan tahun. Perang Teluk I dimulai ketika Irak melakukan invasi ke wilayah Iran pada tanggal 22 September 1980. Pada awal 70an, Iran ikut terlibat pada pemberontakan oleh kaum Kurdi di Irak. Iran memberikan bantuan kepada kaum kurdi di Irak dalam upaya untuk menggulingkan pemerintahan Saddam Husein di Iran. Dalam perjanjian damai *Algiers*, di Algeria pada tahun 1975, Iran bersedia untuk meninggalkan dukungan terhadap pemberontakan kaum Kurdi dan Irak setuju untuk membagi terusan Arab dengan Iran.⁸²

Pada bulan Januari 1979, orang-orang Syiah, pengikut Ayatullah Khomeini di Iran, melakukan pemberontakan yang berhasil menggulingkan Shah Iran. Setelah itu terbentuklah negara Iran yang berlandaskan nilai-nilai Islam Syiah menggantikan pemerintahan sebelumnya yang bersifat sekuler.

Keberhasilan Revolusi Iran ini, membuat para pemimpin Syiah di berbagai negara ingin mengikuti jejaknya, tidak terkecuali di Irak, yang notabene orang-orang Syiah merupakan komunitas mayoritas. Muhammad Baqir Al Sadr, adalah seorang pemimpin Syiah yang ingin meniru kesuksesan revolusi Iran, tetapi ia kemudian ditangkap oleh dan dihukum mati oleh pemerintahan Saddam.

Saddam Husein yang pada waktu itu termasuk orang yang terpengaruh di kawasan Timur-Tengah merasa berkewajiban membendung meluasnya pengaruh revolusi Islam Iran, baik ke Irak maupun ke negara-negara Arab lainnya.

⁸² Nathan J. Brown Wnsiclopedia 2005 (Microsoft Corporation)

Dengan menyeru Iran pada waktu itu, Saddam juga ingin diakui sebagai pahlawan dunia Arab yang telah berhasil meredam pengaruh revolusi Islam Iran ke negara Arab sekitarnya selain itu ada ambisi lain dari Saddam, yaitu ambisi untuk menjadi pemimpin dunia Arab, sekaligus tokoh yang terbesar, terkuat dan terhebat di kawasan Timur-Tengah dan ingin diakui sebagai polisi di wilayah Teluk, yang mana jabatan itu sebelumnya dipegang oleh Shah Iran.

Saddam juga sangat berambisi mendapatkan pengakuan sebagai pemimpin Dunia Arab, julukan yang pernah disandang oleh dua bekas presiden Mesir Gammal Abdul Naser dan Anwar Sadat. Hal tersebut terlihat di saat Saddam merayakan secara besar-besaran yang dia namai sebagai kemenangan Irak atas Iran, beberapa saat setelah Iran bersedia menghentikan perang.

Saddam Husein benar-benar menjadi seorang pahlawan pada waktu itu, sebagian besar negara-negara Arab mendukung dan membantu Irak dalam usahanya untuk membendung pengaruh revolusi Iran ke negara-negara Arab lainnya, negara-negara Arab pada waktu itu banyak memberikan bantuan kepada Irak yang diberikan berupa dana untuk memperkuat armada militer Irak untuk menyerang Iran. Penyerangan atas wilayah Iran ini didukung oleh ribuan tentara dan armada tempur yang besar dari Irak.

Dalam perang Irak-Iran ini, Amerika dan sekutunya juga turut terlibat dalam proses peperangan, mereka ikut mengerahkan angkatan lautnya ke kawasan Teluk dengan tujuan untuk membantu Irak melawan Iran. Washington pun memasok data-data intelijen militer penting pada Saddam sehingga Irak berhasil merebut semenanjung Faw pada tahun 1988. Selain itu Amerika juga melakukan pengiriman 60 helikopter serang jenis MD 500, delapan helikopter

anti kapal selam jenis Textron AB 212, 48 helikopter jenis Textron 214, perlengkapan infra merah, pelacak panas dan banyak lagi: Semua perlengkapan tersebut dikirim untuk membantu Saddam dalam Perang Irak-Iran.⁸³ Keberhasilan itu membuat Irak tampil sebagai super power baru di kawasan Teluk. Irak didukung oleh Negara-negara Arab moderat dan negara-negara Barat seperti Amerika, Inggris, Jerman dan Perancis.

Perang yang telah berlangsung selama delapan tahun itu akhirnya berakhir setelah PBB menyerukan kepada kedua negara untuk mengadakan gencatan senjata sesuai dengan resolusi DK PBB no 598 tahun 1988. kedua belah pihak mencapai kesepakatan untuk mengadakan gencatan senjata dan perang Irak-Iran yang telah memakan korban jiwa ratusan ribu warga Iran itu akhirnya berakhir pada tanggal 20 Agustus 1988.⁸⁴

2. Perang Teluk II

Perang teluk II adalah perang Irak melawan Kuwait yang kemudian berkembang menjadi perang antar Irak dengan pasukan sekutu di bawah pimpinan Amerika. Konflik antara Irak-Kuwait mempunyai sejarah yang panjang, sejak era pemerintahan Dinasti Ottoman Turki, krisis Irak Kuwait merupakan yang ketiga kalinya dalam abad ini, yang pertama terjadi pada Juli 1879 dan yang kedua terjadi pada Juni 1961, tidak termasuk semi krisis yang terjadi pada Maret 1939. kesemua krisis itu bermuara pada identitas Kuwait vis-a-vis Irak. sejak dulu Irak secara resmi tidak pernah menghentikan klaimnya atas wilayah Kuwait.

⁸³ Majalah Sabili no. 17 TH X, 13 Maret 2003 hal. 56

⁸⁴ Nathan J. Brown, *Loc Cit*

Masalah perbatasan ini sejak kemerdekaan Kuwait dari Inggris tahun 1961 sudah dua- kali hampir membawa Irak dan Kuwait pada peperangan. Enam hari sesudah kemerdekaan Kuwait pada tanggal 19 Juni 1961, Irak menegaskan bahwa Kuwait merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Irak, dan Irak tidak mau mengakui perjanjian kemerdekaan antara Inggris dengan Kuwait. Sebelum jatuh ke tangan Inggris, Kuwait secara nominal memang merupakan bagian dari Basra, salah satu propinsi dari kekaisaran Ustmaniyah (Ottoman) Turki, propinsi Basra sendiri kini menjadi bagian dari Irak.⁸⁵

Perang teluk II terjadi ketika pasukan Irak melakukan invasi ke Kuwait, pada tanggal 2 Agustus 1990 dan aneksasi Irak atas Kuwait pada 8 Agustus 1990, dimana Kuwait dijadikan sebagai propinsi ke 19 Irak, kemudian terjadinya pengeboman besar-besaran pasukan sekutu terhadap Irak dan Kuwait pada 17 Januari 1991.

Pada tanggal 15 Juli 1990, Menlu Irak Tariq Aziz, menyebarluaskan surat terbuka ke kalangan anggota Liga Arab, yang isinya menuduh Kuwait dan Uni Emirat Arab (UEA) telah melakukan agresi langsung terhadap Irak. Pada tanggal 17 Juli 1990, Saddam menyatakan bahwa sebagian negara Arab telah menjalankan kebijakan perminyakan yang menikam Irak dari belakang. Irak menuduh Kuwait dan UEA membanjiri pasaran minyak Internasional sehingga harga minyak turun. Tindakan itu dinilai melanggar kesepakatan kuota minyak OPEC. Menurut Baghdad, setiap penurunan Harga minyak sebesar US\$ 1 perbarel

⁸⁵ Riza Sihbudi, *Indonesia-Timur Tengah Masalah dan Prospek* Gema Insani Press, Jakarta 1997 hal. 81-85

akan mengurangi penerimaan Irak sebesar US\$ 1 milyar. Irak memperkirakan kerugian sekitar US\$ 14 milyar akibat jatuhnya harga minyak.

Kuwait dan UEA, menurut Baghdad, telah mengadakan persekongkolan dengan AS untuk menurunkan harga minyak di pasaran internasional. Kuwait dan UEA memang terkenal sering melanggar kesepakatan kuota produksi minyak yang telah ditetapkan OPEC, yang mengakibatkan *overproduction* sehingga harga minyak selalu rendah. Antara Januari-Juni 1990, misalnya, harga minyak di pasaran internasional telah merosot dari US\$ 22 menjadi US\$ 16 per barel. "Gertakan" Irak itu dilakukan menjelang pembukaan sidang OPEC di Jenewa (25 Jun 1990). Setelah "gertakan" Irak, harga minyak pun bergerak naik. Sidang OPEC di Jenewa (26 Juli 1990) memutuskan untuk menaikkan-harga minyak dari US\$ 18 menjadi US\$ 21 per barel.

Efek yang ditimbulkan akibat perang Irak-Iran juga menjadi faktor penyebab terjadinya Perang Teluk II. Selama perang Teluk I antara Irak dengan Iran, Kuwait menyuntikkan dana milyaran dolar ke Baghdad. Sejak perang teluk I, Irak meningkatkan jumlah kekuatan militernya, dari 242.250 tentara menjadi hampir 1.200.000 tentara yang mengakibatkan membengkaknya jumlah hutang luar negeri Irak, termasuk pinjaman sebesar US\$ 14 milyar ke Kuwait. Sementara hutangnya pada negara Teluk lainnya diperkirakan mencapai angka US\$ 16 milyar. Dengan terjadinya penurunan harga minyak internasional semakin mempersulit kondisi keuangan Irak, karena Irak terus mengalami kerugian.⁸⁶

Konflik yang terjadi antara Irak dan Kuwait menarik dunia Arab untuk ikut mengambil tindakan, hal itu ditunjukkan oleh Raja Fahd dari Arab Saudi dan

⁸⁶ *ibid*

Presiden Mesir Husni Mubarak yang berusaha mendinginkan pertentangan kedua negara itu dengan cara mensponsori penyelesaian konflik melalui meja perundingan yang diselenggarakan pada tanggal 31 Juli 1990 di Jeddah. Baghdad mengajukan tiga syarat untuk perundingan damai, yaitu (1) Kuwait harus bersedia memberi ganti rugi sebesar US\$ 2,4 milyar. (2) Kuwait harus menaati kuota produksi minyak OPEC. (3) Syarat yang muncul kemudian, kesediaan Kuwait menghapuskan seluruh hutang Irak.

Perundingan di Jeddah itu menemui kegagalan, dan tepat pada pukul 2 dinihari waktu setempat, 2 Agustus 1990, sekitar 100.000 tentara dan 400 tank Irak menyerbu dan menduduki Kuwait. Maka dalam waktu sekitar sembilan jam Irak sudah berhasil menduduki wilayah Kuwait secara keseluruhan.

Dewan Keamanan PBB segera mengeluarkan Resolusi yang menguak Irak, mendesak diberlakukannya gencatan senjata dan penarikan mundur pasukan Irak dari Kuwait. AS juga mengutuk agresi Irak, membekukan asset Irak dan Kuwait, dan melarang perdagangan dengan Irak. AS memobilisasi kekuatan di PBB, khususnya kalangan anggota NATO, untuk mengutuk tindakan Irak sekaligus menjatuhkan sanksi untuk menghukum Irak, sampai penarikan pasukannya dari Kuwait. Ancaman AS itu diwujudkan dalam bentuk mobilisasi besar-besaran pasukan sekutu yang berasal dari berbagai negara ke wilayah Teluk yang disebut dengan pasukan multinasional. Berbagai armada tempur baik darat maupun udara disiapkan untuk kelancaran serangan. Pihak sekutu menamakan penggelaran kekuatan militer mereka di kawasan Teluk ini dengan kode "Operasi Perisai Gurun". Bagi AS, hal itu merupakan

penggelaran kekuatan militer di luar negeri yang terbesar sejak Perang Vietnam.

Ketika batas akhir pasukan Irak untuk meninggalkan Kuwait pada 15 Januari 1991 berakhir, tetapi pasukan Irak belum juga mundur dari Kuwait, Sekutu tidak melancarkan serangan apapun, serangan baru dimulai pada tanggal 17 Januari 1991 waktu setempat. Pasukan sekutu pimpinan AS melancarkan serangan udara lebih dari 1.000 sorti dan ada 18.000 bom yang dijatuhkan di Irak dalam 14 jam pertama.⁸⁷ Serangan tersebut menandai dimulainya Perang Kuwait, yang diberi kode "Operasi Badai Gurun". Di medan perang, sampai 8 Februari 1991 sudah 49 ribu misi pengeboman yang dilakukan oleh sekitar seribu pesawat sekutu terhadap Irak. Selain itu ada juga serangan darat dari pihak sekutu dengan sandi 'Operasi Pedang Gurun' dimulai sejak 24 Februari 1991. Sesudah empat hari sejak dilancarkannya serangan darat yang dikombinasikan dengan serangan udara dan laut oleh pihak sekutu, Baghdad baru mau menerima syarat gencatan senjata, tepatnya pada 28 Februari 1991, dimana radio Baghdad yang dipantau Nicosia (Cyprus) menyiarkan berita tentang instruksi Saddam kepada semua pasukan Irak untuk kembali ke posisi tanggal 1 Agustus 1990, yaitu posisi sebelum Irak memasuki. Hal ini sekaligus mengakhiri 209 hari krisis dan perang antara Irak dengan Kuwait.⁸⁸

Perang Teluk II telah menanamkan kebencian Irak terhadap AS, hal itu karena sebelumnya Irak mendapat jaminan dari pemerintah AS, melalui duta

⁸⁷ Satrio Arismunandar, *Catatan Harian Dari Baghdad*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991 hal. 195

⁸⁸ *Ibid* hal. 96-100

besarnya di Irak waktu itu, April Glaspie, bahwa Washington tidak akan ikut campur tangan dalam konflik Irak-Kuwait untuk tidak terlibat dalam krisis Irak Kuwait,⁸⁹ tetapi hal itu berbalik ketika Irak berhasil menguasai Kuwait, AS justru mengecam Irak dan menjadi pemimpin pasukan multinasional dalam mengusir Irak dari Kuwait. Sejak saat itu hubungan Irak dengan negara-negara Barat khususnya Amerika sering terjadi saling curiga satu sama lain.

Pasca perang Teluk II, Irak tetap mendapatkan embargo ekonomi dari pihak sekutu dan PBB. Pada Juli 1991, Tim PBB menemukan sebuah proyek pengolahan nuklir Irak di Sharqat, sebuah kota kecil antara Mosul dan Tikrit. Menurut ahli Atom yang menjadi anggota tim tersebut, proyek itu jelas bukan untuk tujuan damai, tetapi mempunyai arti strategis yang sangat penting di kemudian hari, penemuan itu membuat embargo terhadap Irak tetap akan dilaksanakan selama Irak belum sepenuhnya memusnahkan proyek nuklirnya.

Minyak yang merupakan sumber devisa paling utama di Irak, yang angka penjualannya dapat menyumbangkan anggaran US\$ 21 milyar, tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal, hal itu karena sanksi dari PBB yang tidak memperbolehkan Irak untuk menjual minyaknya ke pasaran internasional dan hal itu berlaku sampai tahun 1994. Akibat dari embargo itu Irak semakin terpuruk, setelah infrastruktur sosial ekonominya mengalami kerusakan berat akibat pemboman yang dilakukan pasukan sekutu selama Perang Teluk II.

Embargo yang ekonomi telah membuat perekonomian Irak lumpuh total. Akibatnya di Irak banyak terjangkit penyakit akibat dari kekurangan makanan dan kekurangan gizi. Irak diperbolehkan menjual minyaknya pada

⁸⁹ <http://www.infopalestina.com/viewall.asp?id=3361>

1996 dalam program *oil for food*, yaitu menjual minyaknya untuk memperoleh makanan. Dengan adanya program *oil for food*, Irak sedikit bisa mengatasi krisis ekonomi dan kekurangan makanan serta krisis kekurangan gizi yang diderita rakyat Irak sejak dijatuhkannya embargo terhadap Irak pasca perang Irak-Kuwait.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Seperti yang telah dibahas oleh penyusun pada bab-bab sebelumnya. Irak merupakan salah satu negara Timur Tengah yang memiliki sumber daya alam yang sangat diminati oleh negara-negara Barat. Minyak, merupakan kekayaan alam yang sangat berlimpah yang dimiliki oleh Irak, dimana jumlah minyak yang terdapat di kawasan Irak mencapai 115 juta barel. Pasokan minyak yang berada di Irak merupakan jumlah minyak terbesar kedua dunia setelah Arab Saudi. Irak sangat bangga dengan pasokan minyak yang ada, akan tetapi hal tersebutlah yang membuat negara-negara super power atau beberapa negara Eropa menjadikan Negara Irak sebagai agenda penting dalam hubungan politik mereka.

Tidak dapat dipungkiri bahwa minyak merupakan kebutuhan semua negara. Dalam bidang perindustrian atau bahkan militer, minyak sangat memiliki pengaruh yang sangat besar. Amerika Serikat merupakan negara adidaya yang sangat membutuhkan pasokan atau cadangan minyak yang sangat banyak. Dengan perindustrian yang luas dan kekuatan militer yang sangat besar, membuat Amerika Serikat (AS) harus memiliki cadangan yang lebih. AS hanya memiliki beberapa pasokan minyak yang berada di bagian Amerika Selatan, ini membuat Pemerintahan AS harus mencari dan menguasai suatu kawasan yang memiliki pasokan minyak yang besar, dan kawasan tersebut tidak lain adalah kawasan Timur Tengah, dan khususnya Irak. Berbagai alasan yang dikeluarkan oleh AS,

baik itu mengenai kemanusiaan yang terjadi di Irak samapai mengatakan bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal. Bahkan AS dengan tegas mengatakan bahwa Irak merupakan negara terorisme. AS pernah mengajukan suatu proposal pada PBB, dimana AS mengatakan bahwa Irak harus segera di hancurkan, karena Irak sedang mengemangkan suatu senjata yang dapat membahayakan dunia, yaitu senjata mussal. Walaupun PBB menolak proposal tersebut, akan tetapi AS tetap saja akan menyerang dan memerangi Irak. Akan tetapi ada beberapa negara yang menolak tegas serangan AS ke Irak, salah satunya adalah Jerman dan Perancis.

Irak merupakan negara yang dipimpin oleh presiden yang sangat anti dengan AS. Saddam Hussein presiden Irak, merupakan orang yang tidak pernah takut terhadap kekuatan militer AS. Sadar akan watak politik Barat, Saddam membangun semangat nasionalisme rakyat Irak dengan motor ideologinya partai Baath, untuk selalu mempertahankan harkat dan martabat bangsa atas tindakan-tindakan politik Barat, terutama AS yang selalu ikut campur dalam politik dalam negeri Irak. Saddam memiliki cara yang sangat membuat AS kewalahan, dimana pada tahun 2000, Irak meminta semua pembayaran minyak dengan menggunakan mata uang euro. Dan hampir semua anggota OPEC ikut dalam permainan Saddam Hussein. AS sangat kewalahan menanggapi perubahan perdagangan internasional yang ada, dimana hampir semua negara bertransaksi menggunakan euro. Hal tersebut membuat harga dollar AS menjadi turun, bahkan mulai tahun 1999, harga dollar tiap tahunnya mengalami defisit.

Walaupun perekonomian AS sangat dirugikan oleh permainan Irak, namun AS masih saja ingin menghancurkan Irak. Apalagi ditambah kebencian AS

setelah Irak mempermainkan nilai mata uang dollar, AS semakin geram. Hingga pada akhirnya pada pertengahan bulan maret 2003, AS menyerang kota Baghdad dan dimulailah perang AS-Irak.

Tabel 5.1
Data Korban Pasca Perang Irak

No	Peristiwa	Tewas	Luka-luka
1	Pengeboman markas PBB di Irak bulan Agustus 2003	22	150
2	Peledakan sepasang bom mobil di dekat kantor-kantor pemerintah Irak di Baghdad	18	30
3	Ledakan bom mobil pada upacara pemakaman warga Kurdi	20	50
4	Bom bunuh diri di depan Bank Al- Rafiudin	19	53
5	7 Ledakan bom di Baghdad tanggal 22 dan 23 Juni 2005	30	-
6	4 Ledakan bom di distrik Karrada tanggal 23 Juni 2005	15	28
7	3 Ledakan bom di distrik Shuala	23	48

Sumber: Harian Kompas tanggal 5 November 2003, 15 April 2005, 3 Mei 2005, 15 Juni 2005 dan 24 Juni 2005

Dapat terlihat pada penelitian bahwa terdapat suatu fenomena politik yang sangat menarik. Dimana terdapat suatu Negara yang memiliki power yang sangat besar tapi hanya sedikit memiliki sumber daya alam (AS), dan ada pula suatu Negara yang memiliki power yang tidak terlalu kuat namun memiliki sumber daya alam yang berlebih (Irak). Dan kedua Negara tersebut saling berhubungan dalam politik dan militernya.

Seperti yang kita ketahui bahwa pada akhirnya AS tetap menyerang dan menghancurkan berbagai kota di Irak, dan membuktikan bahwa diplomasi yang dilakukan Irak dengan menggunakan minyak tidak berhasil. Bahkan pada akhirnya Presiden Irak, Saddam Hussein tertangkap dan dihukum mati pada tahun 2006. Disini penyusun berharap, bahwa skripsi ini dapat dijadikan referensi tambahan bila ada yang ingin meneliti tentang, penyebab kegagalan Irak dalam mempertahankan diri dari ancaman invasi AS tahun 2003.

Daftar Pustaka

Buku:

- Abd. Rahman, Musthafa. "Geliat Irak Menuju Era Pasca Saddam", Kompas, 2006.
- Arismunandar, Satrio. 1991. "*Catatan Harian Dari Baghdad*". Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Al-Adnani, Abu Fatiah, "Misteri Negeri-Negeri Akhir Zaman", Granada Media Tama, 2007.
- Atmo Sudirdjo, Prajudi, "Beberapa Pandangan Ilmu Tentang Pengambilan Keputusan (Decision Making)", Jakarta, 1976.
- Budiardjo, Miriam, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001
- Centre for Strategic and Int'l Studies (CSIS), "Timur Tengah Pasca Perang Teluk : Dimensi Internal dan Eksternal", 1991.
- Cipto, Bambang, "Tekanan Amerika Terhadap Indonesia : Kajian Atas Kebijakan Luar Negeri Clinton Terhadap Indonesia", Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.
- Dipoyudo, Kirdi / CSIS. "Timur Tengah Dalam Pergolakan", Jakarta, 1977.
- Djarmaluddin, Dasmam. 1998. *Saddam Hussein menghalau tantangan*. Jakarta: Penebar Swadaya.

- Fukuyama, Francis. 1992. *The End of History and The Last Man*. New York: The Five Press.
- Ibrahimy, M. Nur EL. 1955. *Peran Minyak di Timur Tengah*. P.3
- Jatmika, Sidik. 2000. *AS Penghambat Demokrasi (Membongkar Politik Standar Ganda Amerika Serikat)*. Yogyakarta : BIGRAF Publishing.
- Noreng, Qystein. *Minyak Dalam Politik (upaya mencapai consensus internasional)*, Rajawali Pers, Jakarta 1983
- Rais, M. Amin. “Minyak Dalam Politik : Upaya Mencapai Konsensus Internasional”, Rajawali, Jakarta, 1983.
- Roy, S.L. *Diplomasi*, PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1995
- Sihbudi, Riza, “Menyandera Timur Tengah”, Mizan, Jakarta, 2007
- Shambazy, Budiarto. *Obrak-Abrik Irak*. Jakarta: Kompas
- Setiawati, Siti Mutiah, “Irak dibawah Kekuasaan Amerika : Dampaknya Bagi Stabilitas Politik Timur Tengah dan Reaksi (rakyat) Indonesia”, Jurusan Ilmu HI. Fisipol UGM dan Dep LNRI, 2004.
- Miller, T. Christian, “Blood Money”, UFUK Press, Jakarta, 2007
- Morgenthau, 1966 seperti dikutip Frans-Bona Sihombing, Ilmu Politik Internasional, Teori, Konsep, dan Sistem. Indonesia: Ghalia 1984.
- Kuncahyono, Trias, “Bulan Sabit Diatas Baghdad”, Kompas, Jakata, 2006.
- Kuncahyono, Trias, “Irak Korban Ambisi Kaum Hawkish”, Kompas, Jakarta, 2005.

Tim Penyusun PT Media Interaksi Utama & PT Pustaka Sinar Harapan. 1991.
Perang Teluk: Malapetaka Dunia. Jakarta: PT Sinar Agape Press.

Jurnal:

FORUM Keadilan, No 49, 13 April 2003.

Jurnal Ilmu Politik 12.

Koran dan Majalah:

Kompas, 15 Januari 1991

Majalah Sabili no. 17 TH X, 13 Maret 2003.

Suara Pembaharuan, 20 Januari 1991

Time, 7 Januari 1991

Bahan Kuliah:

Harwanto Dahlan. Modul Mata Kuliah “Diplomasi”, Yogyakarta. 2002

_____. Modul Kuliah “*Timur Tengah*”. Yogyakarta

_____. Diktat Kuliah “*Politik dan Pemerintahan Timur Tengah*”,
Yogyakarta. 1997

Jatmika, Sidik, Bahan Kuliah “Politik Timur Tengah”, Fotocopy-an, Yogyakarta,
2004.

Web :

<http://abimanyu.free>.

<http://forum.dudung.net>

<http://id.wikipedia.org>

<http://iwansetiyabudi.blogspot.com>

<http://rizkisaputro.wordpress.com>

<http://www.eia.doe.gov>

<http://www.arahmah.com>

<http://www.heritage.org>

<http://www.infopalestina.com>

<http://www.pikiran-rakyat.com>

<http://www.republika.co.id>

<http://www.surf.net.au>

www.google.co.id

www.kompas.com

www.swaramuslim.net

www.yahoo.co.id

LAMPIRAN

Facts on Who Benefits From Keeping Saddam Hussein In Power

by Carrie Satterlee

WebMemo #217

February 28, 2003 - updated, April 1, 2003

France

1. France controls over 22.5 percent of Iraq's imports. French total trade with Iraq under the oil-for-food program is the third largest, totaling \$3.1 billion since 1996, according to the United Nations,
2. In 2001 France became Iraq's largest European trading partner. Roughly 60 French companies did an estimated \$1.5 billion in trade with Baghdad in 2001 under the U.N. *oil-for-food* program.
3. France's largest oil company, Total Fina Elf has negotiated extensive oil: contracts to develop the Majnoon and Nahr Umar oil fields in southern Iraq. Both the Majnoon and Nahr Umar fields are estimated to contain as much as 25 percent of the country's oil reserves. The two fields purportedly contain an estimated 26 billion barrels of oil. In 2002, the non-war price per barrel of oil was \$25. Based on that average these two fields have the potential to provide a gross return near \$650 billion.
4. France's Alcatel company, a major telecom firm, is negotiating a \$76 million contract to rehabilitate Iraq's telephone system.
5. In 2001 French carmaker Renault SA sold \$75 million worth of farming equipment to Iraq.
6. More objections have been lodged against French export contracts with Iraq than any other exporting country under the oil-for-food program, according to a report published by the London Times. In addition French companies have signed contracts with Iraq worth more than \$150 million that are suspected of being linked to its military operations. Some of the goods offered by French companies to Iraq, detailed by UN documents, include refrigerated trucks that can be used as storage facilities and mobile laboratories for biological weapons.

7. Iraq owes France an estimated \$6 billion in foreign debt accrued *from* arms sales in the 1970s and `80s.
8. From 1981 to 2001, according to the Stockholm International Peace Research " Institute (SIPRI), France was responsible for over 13 percent of Iraq's arms imports.

Germany

1. Direct trade between Germany and Iraq amounts to about \$350 million annually, and another \$1 billion is reportedly sold through third parties.
2. It has recently been reported that Saddam Hussein has ordered Iraqi domestic businesses to show preference to German, companies as a reward for Germany's "firm, positive stand in rejecting the launching of a military attack against Iraq." It was also reported that over 101 German companies were present at the Baghdad Annual exposition.
3. During the 35th Annual Baghdad international Fair in November 2002, a German company signed a contract for \$80 million for 5,000 cars and spare parts.
4. In 2002, DaimlerChrysler was awarded over \$13 million in contracts for German trucks and spare parts.
5. Germany is owed billions by Iraq in foreign debt generated during the 1980's.
6. German officials are investigating a German corporation accused of illegally channeling weapons to Iraq via Jordan. The equipment in question is used for boring the barrels of large cannons and is allegedly intended for Saddam Hussein's AI Fao Supercannon project. An article in the German daily *Tageszeitung* reported that of the more than 80 German companies that have done business with Baghdad since around 1975 and have continued to do so up until 2001, many have supplied whole systems or components for weapons of mass destruction.

United States

1. The United States remains the largest importer of Iraqi oil under the UN Oil for-Food program. However, U.S. companies can no longer deal directly with Iraq for its oil imports: U.S. companies are forced to deal with third party vendors as a result of a ban on all American companies imposed by Iraq. In 2002, the U.S. imported \$3.5 billion worth of Iraqi oil.
2. Iraq is the sixth largest supplier of oil to the United States. In 2002, imports from Iraq accounted for only 5 percent of total U.S. oil imports, dropping down from 8.5 percent in 2001. In addition, American oil companies have not signed a contract with Baghdad since 1972.
3. In 2002, the U.S. exported \$31 million worth of goods to Iraq. The exports consisted mostly of agricultural goods and machine parts. U.S. sales to Iraq dropped off after the Gulf War and resumed only on a limited scale in 1996 under the UN Oil-for-Food program.
4. According to the SIPRI arms transfers' database, from 1981 to 2001, the United States was the 11th largest supplier of weapons and arms to Iraq, supplying approximately \$200 million of Iraq's weapons imports. The top three suppliers, from 1981 to 2001, were Russia, China and France respectively.

KRONOLOGI PERISTIWA-PERISTIWA BESAR DI IRAK

- 1920 25 April-Irak ditempatkan di bawah mandat Inggris.
- 1921 23 Agustus-Faisal, anak Hussein Bin Ali, seorang Syarif di Makkah, dinobatkan sebagai raja pertama Irak.
- 1932 3 Oktober-Irak menjadi Negara merdeka.
- 1958 14 Juli-Sistem monarki tumbang oleh kudeta militer pimpinan Brigadir Abd-Al-Karim Qasim dan Kolonel Abd-Al-Salam Muhammad Arif. Irak dideklarasikan sebagai Negara republic dan Qasim menjadi perdana menteri.
- 1963 8 Februari-Qasim tumbang oleh kudeta Partai Ba'ath Arab, (ASBP). Arif menjadi presiden.
- 1963 18 November-Pemerintahan Partai Ba'ath dibubarkan oleh Presiden Arif dan sekelompok pejabat.
- 1966 17 April-Setelah Arif tewas dalam kecelakaan helicopter pada 13 April, jabatan kepresidenan digantikan oleh saudara tuanya, May.Jend Abd-Al-Rahman Muhammad Arif.
- 1968 17 Juli-Kudeta Partai Ba'ath menggulingkan Abd-Rahman Muhammad Arif dan Jendral Ahmad Hasan Al-Bakr menjadi presiden.
- 1970 11 Maret-Dewan Komando Revolusi (RCC) dan Mullah Mustafa Barzani, pemimpin Partai Demokrat Kurdistan (KDP), menandatangani perjanjian damai.
- 1972 Penandatanganan Perjanjian Persahabatan dan Kerja sama selama 15 tahun antara Irak dan Uni Soviet.
- 1972 Irak menasionalisasi Perusahaan Minyak Irak (IPC).
- 1974 Sebagai pelaksanaan dari kesepakatan tahun 1970, Irak memberikan otonomi terbatas pada suku Kurdi tetapi Partai Demokrat Kurdi (KDP) menolaknya.
- 1975 Maret-Pada pertemuan organisasi Negara-negara pengekspor minyak (OPEC) di Aljazair, Irak dan Iran menandatangani perjanjian yang mengakhiri perselisihan mereka.
- 1979 16 Juli-Presiden Al-Bakr mengundurkan diri dan digantikan oleh Wakil Presiden Saddam Hussein.
- 1980 1 April-Partai Dakwah pro-Iran mengklaim bertanggung jawab atas penyerangan terhadap Wakil Perdana Menteri, Tariq Aziz, di Universitas Mustansiiriyah, Baghdad.
- 1980 17 September-Irak membatalkan perjanjian tahun 1975 dengan Iran.
- 1980 22 September-Irak menyerang landasan udara Iran.

- 1980 23 September-Iran membom sasaran militer dan ekonomi Irak.
- 1981 7 Juni-Israel menyerang pusat penelitian nuklir Irak di Tuwaithat, dekat Baghdad.
- 1988 16 Maret-Irak dinyatakan telah menggunakan senjata kimia untuk menyerang kota Kurdi, Halabiyah.
- 1988 20 Agustus-berlaku perjanjian damai yang diawasi oleh kelompok pengamat kelompok Iran-Irak dari PBB (Uniimog).
- 1990 15 Maret-Farzad Bazoft, seorang jurnalis kelahiran Iran yang bekerja untuk surat kabar London, *Observer*, digantung di Baghdad atas tuduhan memata-matai instalasi militer.
- 1990 2 Agustus-Irak menginvasi Kuwait dan dikutuk oleh Dewan Keamanan PBB (UNSC) dengan keluarnya Resolusi nomor 660 yang meminta penarikan secara penuh.
- 1990 6 Agustus-Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 661 menjatuhkan sanksi ekonomi di Irak.
- 1990 8 Agustus-Irak menyatakan penggabungan wilayah Irak dan Kuwait.
- 1990 29 November-Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 678 memberi wewenang pada Negara-negara yang memiliki kerjasama dengan Kuwait untuk menggunakan "segala cara" guna menjalankan Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 660.
- 1991 16-17 Januari-Perang Teluk dimulai ketika pasukan sekutu membom Irak dari udara (dikenal dengan "Operasi Badai Gurun Pasir").
- 1991 13 Februari-Pesawat-pesawat AS menghancurkan lubang persembunyian di Amriyah, Baghdad, menewaskan lebih dari 300 orang.
- 1991 24 Februari-Dimulainya Operasi darat yang berhasil membebaskan Kuwait pada 27 Februari.
- 1991 3 Maret-Irak menerima syarat-syarat perjanjian damai.
- 1991 Pertengahan Maret/awal April-Pasukan Irak memadamkan pemberontakan di wilayah selatan dan utara di negeri itu.
- 1991 8 April-Persetujuan rencana membangun zona aman PBB di Irak utara untuk melindungi suku Kurdi dalam pertemuan Uni Eropa. Pada tanggal 10 April, AS memerintahkan Irak untuk mengakhiri semua aktifitas militernya.
- 1992 26 Agustus-Ditetapkannya sebuah zona larangan terbang bagi pesawat-pesawat Irak di wilayah Irak selatan, dengan garis lintang 32 derajat ke utara.
- 1993 27 Juni-Pasukan AS melancarkan serangan peluru penjelajah ke markas intelijen Irak di Baghdad sebagai balasan atas usaha pembunuhan Presiden AS George Bush di Kuwait pada bulan April.

- 1994 29 Mei-Saddam Hussein menjadi perdana menteri.
- 1994 10 November-Majelis Nasional Irak mengakui kemerdekaan dan batas wilayah Kuwait.
- 1995 14 April-Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 986 mengizinkan pembukaan kembali sebagian ekspor minyak Irak untuk membeli makanan dan obat-obatan (“program minyak untuk makanan”). Namun resolusi ini baru di terima oleh Irak pada bulan Mei 1996 dan dilaksanakan pada bulan Desember 1996.
- 1995 Agustus-Menanatu Saddam Hussein, Jenderal Hussein Kamil Hasan Al-Majid, beserta saudara dan anggota keluarganya meninggalkan Irak untuk mencari suaka di Yordania.
- 1995 15 Oktober-Saddam Hussein memenangkan referendum yang membuatnya menjadi presiden untuk 7 tahun berikutnya.
- 1996 20 Februari-Hussein Kamil Hasan Al-Majid dan saudaranya, yang di janjikan pengampunan oleh Saddam Hussein, kembali ke Baghdad, namun kemudian dibunuh pada 23 Februari.
- 1996 31 Agustus-setelah Partai Demokrat Kurdistan (KDP) meminta bantuan, pasukan Irak melancarkan serangan ke wilayah bebas terbatas di utara dan berhasil menangkap Irbil.
- 1996 3 September-AS meluaskan wilayah bebas terbang di Irak selatan ke arah utara dengan garis lintang utara 33 derajat, tepat diselatan Baghdad.
- 1996 12 Desember-Anak tertua Saddam Hussein, Uday, terluka parah dalam usaha pembunuhan di Baghdad.
- 1998 31 Oktober-Irak mengakhiri kerjasama dengan komisi khusus PBB yang mengawasi penghancuran senjata pemusnah massal Irak (Unscm).
- 1998 16-19 Desember-Setelah staf PBB dievakuasi dari Baghdad, AS dan Inggris melancarkan serangan bom dengan nama “Operasi Kancil Padang Pasir”, untuk menghancurkan senjata biologis, kimia dan nuklir Irak.
- 1999 19 Februari-Pemimpin Besar Ayatullah Sayyid Muhammad Sadiq Al-Sadr, selaku pemimpin spiritual komunitas Syiah, dibunuh di Najaf.
- 1999 17 Desember-Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1284 membentuk Komosi Pengawasan, Verifikasi, dan Inspeksi (Unmovic) untuk menggantikan Unscm. Irak menolak resolusi tersebut.
- 2001 Februari-Inggris dan AS melakukan serangan untuk melucuti pertahanan udara Irak. Pemboman ini mendapat sedikit dukungan internasional.
- 2001 Mei-Anak Saddam, Qusay, terpilih sebagai pemimpin Partai Ba’ath yang berkuasa, menimbulkan spekulasi bahwa ia adalah pengganti ayahnya.
- 2002 April-Baghdad menunda ekspor minyak sebagai protes atas serbuan Israel ke wilayah Palestina. Meskipun Saddam mengeluarkan seruan protes ini,

namun tak ada warga Arab yang mengikutinya. Ekspor minyak dimulai kembali 30 hari kemudian.

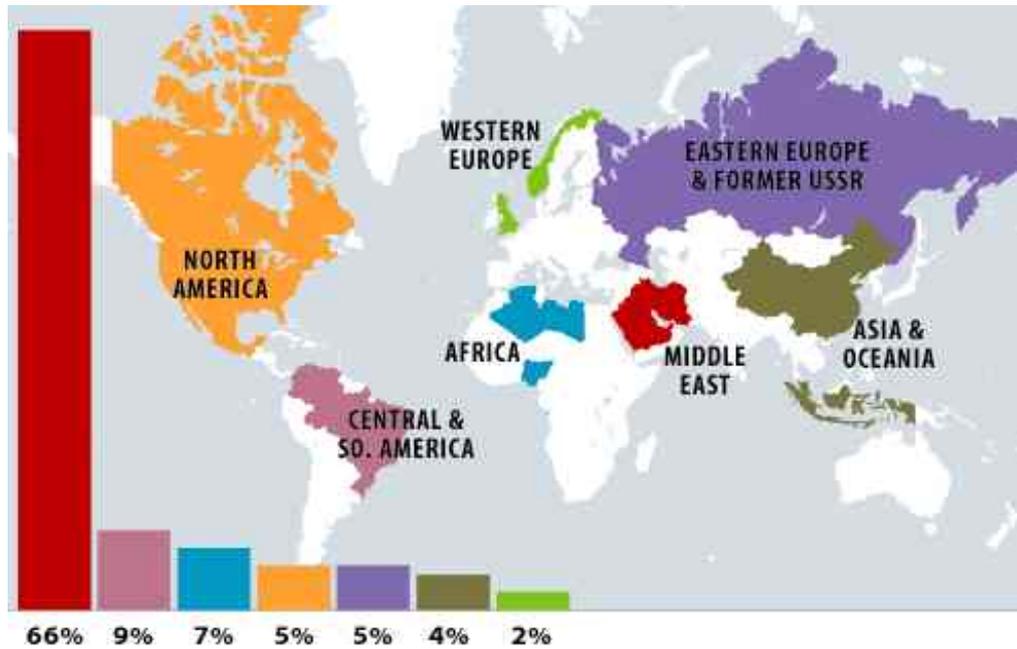
- 2002 September-Presiden AS, George W. Bush, berbicara pada para pemimpin dunia yang skeptis pada sesi pertemuan Majelis Umum PBB tentang menghadapi “Bahaya Genteng Irak” atau menyingkirkan saja, menurut sudut pandang AS. Pada bulan yang sama, Perdana Menteri Inggris Tony Blair mempublikasikan dokumen yang berisi kemampuan militer Irak.
- 2002 November-Para pengawas senjata PBB kembali ke Irak dengan dukungan resolusi PBB yang memberikan ancaman serius pada Irak jika melakukan “pelanggaran material” yang telah ditetapkan.
- 2003 Maret-Ketua pengawas senjata, Hans Blix, menyatakan tentang kesediaan kerja sama Irak tetapi para pengawas memerlukan waktu tambahan untuk memverifikasinya.
- 2003 17 Maret-Duta Besar Inggris untuk PBB menyatakan bahwa proses diplomatik di Irak telah berakhir; para pengawas senjata mengungsi; Presiden AS, George W. Bush, member waktu 24 jam pada Saddam Hussein dan anak-anaknya untuk meninggalkan Irak atau menghadapi perang.
- 2003 20 Maret-Peluru-peluru Amerika menghantam sasaran di Baghdad, menandai awal mula serangan pimpinan AS untuk menumbangkan Saddam Hussein. Pada hari-hari selanjutnya, AS dan Inggris mendaratkan pasukan untuk memasuki Irak dari selatan.
- 2003 9 April-Pasukan AS maju ke jantung Baghdad. Cengkeraman Saddam Hussein atas kota tersebut terpatahkan. Pada hari-hari berikutnya, para pejuang suku Kurdi dan pasukan AS menguasai kota-kota di sebelah utara Kirkuk dan Mosul. Terjadi banyak penjarahan di ibukota dan kota-kota lain.
- 2003 April-AS mengeluarkan daftar 55 orang yang paling dicari dari para bekas pejabat rejim Saddam Hussein dalam bentuk kartu-kartu. Mantan Wakil Perdana Menteri Tariq Aziz ditangkap.
- 2003 Mei-Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi pemerintahan pimpinan AS di Irak dan mencabut sanksi ekonomi. Para pejabat AS membubarkan Partai Ba’ath dan institusi-institusi dari rejim Saddam Hussein.
- 2003 Juli-Dewan Pemerintahan yang ditunjuk oleh AS bersidang untuk pertama kalinya. Komandan pasukan AS bahwa pasukannya sedang menghadapi perang gerilya berintensitas rendah. Anak Saddam, Uday dan Qusay terbunuh dalam pertempuran di Mosul.
- 2003 Agustus-Serangan bom menghantam kedutaan Yordania di Baghdad, menewaskan 11 orang; serang di markas PBB di Baghdad menewaskan 22 orang termasuk ketua delegasi PBB. Sepupu Saddam, Ali Hasan Al-Majid, atau Chemical Ali, tertangkap. Bom mobil di Najaf menewaskan 125 orang, termasuk pimpinan Syiah, Ayatollah Mohammed Baqr Al-Hakim.

- 2003 Oktober-Dewan Keamanan PBB menyetujui amandemen resolusi PBB atas Irak yang memberik legitimasi baru pada pemerintahan pimpinan AS tetapi menekankan perlunya alih kekuasaan yang segera pada bangsa Irak. Tentara dan orang-orang sipil menjadi target kekerasan berkelanjutan pada bulan November 2003-situasi keamanan memburuk. Pada awal November- 6 bulan setelah Presiden Bush menyatakan berakhirnya perang- kematian serdadu AS lebih banyak dari pada selama perang menumbangkan Saddam. Selama bulan itu, sebanyak 105 pasukan koalisi terbunuh- jumlah kematian terbanyak semenjak perang dimulai.
- 2003 14 Desember- Saddam Hussein tertangkap di Tikrit.
- 2004 Februari-Lebih dari 100 orang terbunuh di Irbil dalam serang bunuh diri di kantor utama faksi Kurdi.
- 2004 April/Mei-Para milisi Syiah yang setia pada ulama radikal, Moqtada Sadr, menggabungkan kekuatan. Ratusan orang dilaporkan tewas dalam pertempuran selama masa pendudukan AS atas Muslim Sunni, Falluja. Muncul gambar-gambar penyiksaan atas tahanan Irak oleh pasukan AS.
- 2004 Juni-AS menyerahkan kekuasaan pada pemerintahan sementara pimpinan Perdana Menteri Iyad Allawi. Saddam Hussein dipindahkan ke tahanan resmi Irak.
- 2004 Agustus-Pertempuran di Najaf antara pasukan AS dan milisi Syiah pimpinan ulama radikal, Moqtada Sadr.
- 2004 November-Serangan besar-besaran pimpinan AS terhadap para pemberontak di Falluja.
- 2005 30 Januari-Kira-kira delapan juta orang memberikan suara pada pemilu untuk memilih anggota Majelis Nasional Peralihan. Aliansi Syiah Irak ersatu memenangkan kursi mayoritas di majelis. Partai-partai Kurdi berada pada urutan kedua.
- 2005 28 Februari-Lebih dari 100 orang terbunuh dalam serang bom bunuh diri massif di Hilla, selatan Baghdad. Ini merupakan peristiwa terburuk sejak invasi pimpinan AS.
- 2005 April-Parlemen memilih pemimpin Kurdi, Jalal Talabani, sebagai Presiden, dari kelompok Syiah, Ibrahim Jaafari di tuntuk sebagai perdana Menteri. Pemebentukan pemerintahan baru di tengah-tengah eskalasi kekerasan yang mematikan.
- 2005 Mei-Meningkatnya bom mobil, ledakan bom dan penembakan: Kementerian Irak mencatat korban tewas dari penduduk sipil sebanyak 672, dari 364 di bulan April.
- 2005 Juni-Massoud Barzani disumpah sebagai presiden Kurdistan, Irak.

Sumber: BBC dalam Riza Sihbudi, Menyandera Timur Tengah.



PETA PERBATASAN IRAK, KUWAIT DAN ARAB SAUDI



Peta cadangan minyak dunia



PETA KUWAIT



Helikopter Black Hawk 101st Airborne Division memasuki Irak



MASYARAKAT IRAK MENYELAMATKAN DIRI



Encarta Encyclopedia, Oliver Coret/Corbis

PENGEMBOMAN DI BAGHDAD 2003



Encarta Encyclopedia, Jerome Delay/AP/Wide World Photos

SALAH SATU BENGUNAN DI BAGHDAD TERKENA SERANGAN



Encarta Encyclopedia, REUTERS/THE BETTMANN ARCHIVE

PASUKAN AS PADA PERANG TELUK JANUARI 2001



Encarta Encyclopedia, Anja Niedringhaus/AP/Wide World Photos

TENTARA AS DI KOTA AL FALLUJAH, BAGHDAD BARAT, IRAK